



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMPULO**

Jl. Indra Budiman No. 12 Lampulo, Banda Aceh 23127
Telepon : (0651) 6303980, Fax (0651) 6303149, Email : psdkp.lampulo@kcp.go.id

Nomor : B.161/PSDKPLan.1/TU.210/I/2025 17 Januari 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo
Tahun 2024

Yth. Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
di
Jalan Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2024, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2024, berkas terlampir dalam link Google Drive yang dapat diakses melalui tautan: https://drive.google.com/drive/folders/1s_2uZfHz5Gp5d1JSfT-X2udozfEazcE.

Demikian kami sampaikan kepada Bapak, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Lampulo



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sahono Budiarto

Tembusan:
Sekretaris Ditjen. PSDKP



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

**# 2024
KKP BEYOND**

**# PSDKP
SAHABAT
NELAYAN**



LAPORAN KINERJA

**PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMPULO
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta target kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada tahun 2024. Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Instansi Pemerintah serta bagian dari perwujudan transparansi dan akuntabilitas UPT Pangkalan PSDKP Lampulo dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam kaitannya dengan terselenggaranya *good governance*.

Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2024 memberikan gambaran terhadap capaian kinerja selama tahun 2024, dari aktivitas kegiatan yang telah menjadi target pada tahun tersebut. Dalam Laporan Kinerja ini, juga menjabarkan langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka perbaikan capaian ke depan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Saran dan masukan dalam rangka perbaikan laporan ini di masa datang sangat kami harapkan. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif, sehingga laporan kinerja ini dapat disusun dan diterbitkan.

Banda Aceh, 14 Januari 2025

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya
Perikanan dan Kelautan Lampulo



RINGKASAN EKSEKUTIF

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Instansi Pemerintah, maka disusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 UPT Pangkalan PSDKP Lampulo. Laporan Kinerja ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja UPT Pangkalan PSDKP Lampulo yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan RKT Tahun 2024. Sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja, pada tahun 2024 terdapat 8 (delapan) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 11 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 14 Indikator Kinerja Manajerial (IKM) yang harus dilaksanakan oleh UPT Pangkalan PSDKP Lampulo sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Pangkalan PSDKP Lampulo mengalami keberhasilan pencapaian target terhadap 25 indikator kinerja selama tahun 2024. Hasil capaian IKU+IKM Pangkalan PSDKP Lampulo pada tahun 2024 diperoleh sebesar 105,33 dengan status indikator berwarna hijau. Adapun hasil capaian berada dalam kisaran >100 (Baik).

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Pangkalan PSDKP Lampulo tahun anggaran 2024 sebesar Rp 31.315.530.000,00 (Tiga Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribuan Rupiah). Sampai dengan 31 Desember 2024, anggaran telah terserap sebesar Rp 31.022.620.640,00 (Tiga Puluh Satu Miliar Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribuan Enam Ratus Empat Puluh Rupiah). Persentase realisasi anggaran diperoleh sebesar 100%. Data tersebut diambil dari Penyerapan Anggaran pada Aplikasi SAKTI.

Melalui Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 ini, diharapkan menjadi bahan masukan untuk perbaikan kinerja di tahun berikutnya, sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKT dan dokumen Perjanjian Kinerja dapat tercapai.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) UPT Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2024 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah desiminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan Kinerja ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus UPT Pangkalan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam dokumen perencanaan kinerja (Perjanjian Kinerja dan RKA-KL).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan “*good governance*”.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Laporan Kinerja UPT Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2024 adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan Sasaran Kegiatan selama tahun 2024 kepada para *stakeholders* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah. Laporan ini merupakan perwujudan salah satu kewajiban untuk menjawab (*obligation to answer*) tentang apa yang sudah diamanatkan kepada UPT Pangkalan PSDKP Lampulo. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini merupakan sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai selama dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang telah diterima.

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja UPT Pangkalan PSDKP Lampulo dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja ke arah yang lebih baik dimasa mendatang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan, dan evaluasinya.

C. Aspek Strategis dan Isu Aktual pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki 5 (lima) Strategi Ekonomi Biru sebagai langkah Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan dunia, antara lain sebagai berikut:

- 1.) Target perluasan kawasan konservasi 30% dari seluruh wilayah perairan Indonesia;
- 2.) Penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota berdasarkan zonasi;
- 3.) Pengembangan budidaya untuk mendorong nelayan-nelayan di zona penangkapan terukur agar dapat beralih pada budidaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;
- 4.) Menjamin wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terjaga dengan baik;
- 5.) Program “Bulan Cinta Laut” dengan membersihkan laut dari sampah di seluruh perairan Indonesia dan melibatkan nelayan lokal.

Aspek Strategis yang dapat menunjang pencapaian kinerja di Pangkalan PSDKP Lampulo, antara lain sebagai berikut:

- 1.) Terjadi peningkatan jumlah dan ketaatan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan, sehingga target kinerja dapat tercapai dengan baik.
- 2.) Wilayah kerja Pangkalan PSDKP Lampulo yang luas, sehingga pelaku usaha yang diawasi setiap tahunnya mengalami variasi.
- 3.) Penyadartahuan terhadap POKMASWAS sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Adapun Isu Aktual pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Pangkalan PSDKP Lampulo, antara lain sebagai berikut:

1. Bidang Perikanan Tangkap

Isu aktual pada bidang perikanan tangkap, antara lain sebagai berikut:

- a. Masih maraknya kegiatan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) baik yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) maupun Kapal Ikan Asing (KIA).
- b. Kegiatan pembongkaran ikan tidak pada pelabuhan pangkalan yang menyebabkan tidak terdatanya hasil tangkapan dengan tepat, sehingga tidak sesuai dengan program penangkapan ikan terukur. Selain itu, data hasil tangkapan yang tidak diinformasikan dengan benar memicu terjadinya pemalsuan data penangkapan ikan terukur dan penerimaan PNBPN jadi berkurang.

- c. Masih maraknya penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan serta merusak sumber daya ikan dan lingkungannya, seperti di wilayah Aceh Barat, Simeulue, Sibolga, Sumatera Barat, dan Bengkulu;
- d. Masih minimnya sarana dan prasarana pengawasan di laut;
- e. Kurangnya SDM Pengawas Perikanan untuk melaksanakan kegiatan penegakan hukum dan pengawasan penangkapan ikan;
- f. Adanya konflik antara nelayan tradisional dan nelayan pengguna alat tangkap trawl di Bengkulu dan Aceh Barat.

2. Bidang Perikanan Budidaya

Isu aktual terkait bidang perikanan budidaya adalah belum terdapat kejelasan terkait perizinan budidaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Belum semua pelaku usaha pembudidayaan ikan menerapkan prinsip Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).

3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan

Isu yang diambil dari bidang pengolahan hasil perikanan adalah IPAL yang dimiliki oleh pelaku usaha pengolahan hasil perikanan belum memenuhi standar IPAL yang seharusnya. Masih terdapat pelaku usaha pengolahan hasil perikanan skala mikro kecil yang belum menerapkan standar kelayakan pengolahan (SKP).

4. Bidang Pemasaran Hasil Perikanan

Isu aktual pada bidang pemasaran hasil perikanan, antara lain sebagai berikut:

- a. Belum terdatanya hasil perikanan yang terdistribusikan dan daerah distribusi hasil perikanan;
- b. Adanya dugaan beredarnya ikan yang merupakan komoditas impor pada wilayah kerja Pangkalan PSDKP Lampulo yang tidak sesuai peruntukan;
- c. Masih maraknya distribusi benih bening lobster (BBL) yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Isu aktual pada bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, antara lain sebagai berikut:

- a. Kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang dan penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti: bom, racun, dan setrum;
- b. Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir, laut, dan perairan darat; dan
- c. Belum dilengkapinya PKKPR oleh para pelaku usaha.

6. Bidang Kawasan Konservasi

Masih banyak pelaku usaha di kawasan konservasi yang tidak memiliki perizinan berusaha dan memasuki zona inti dari kawasan konservasi.

7. Bidang Pemanfaatan Ruang Laut

Masih terdapat pelaku usaha dan pemerintah yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang belum melengkapi PKKPR dan KKKPR.

D. Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Lampulo

1. Tugas Pokok dan Fungsi

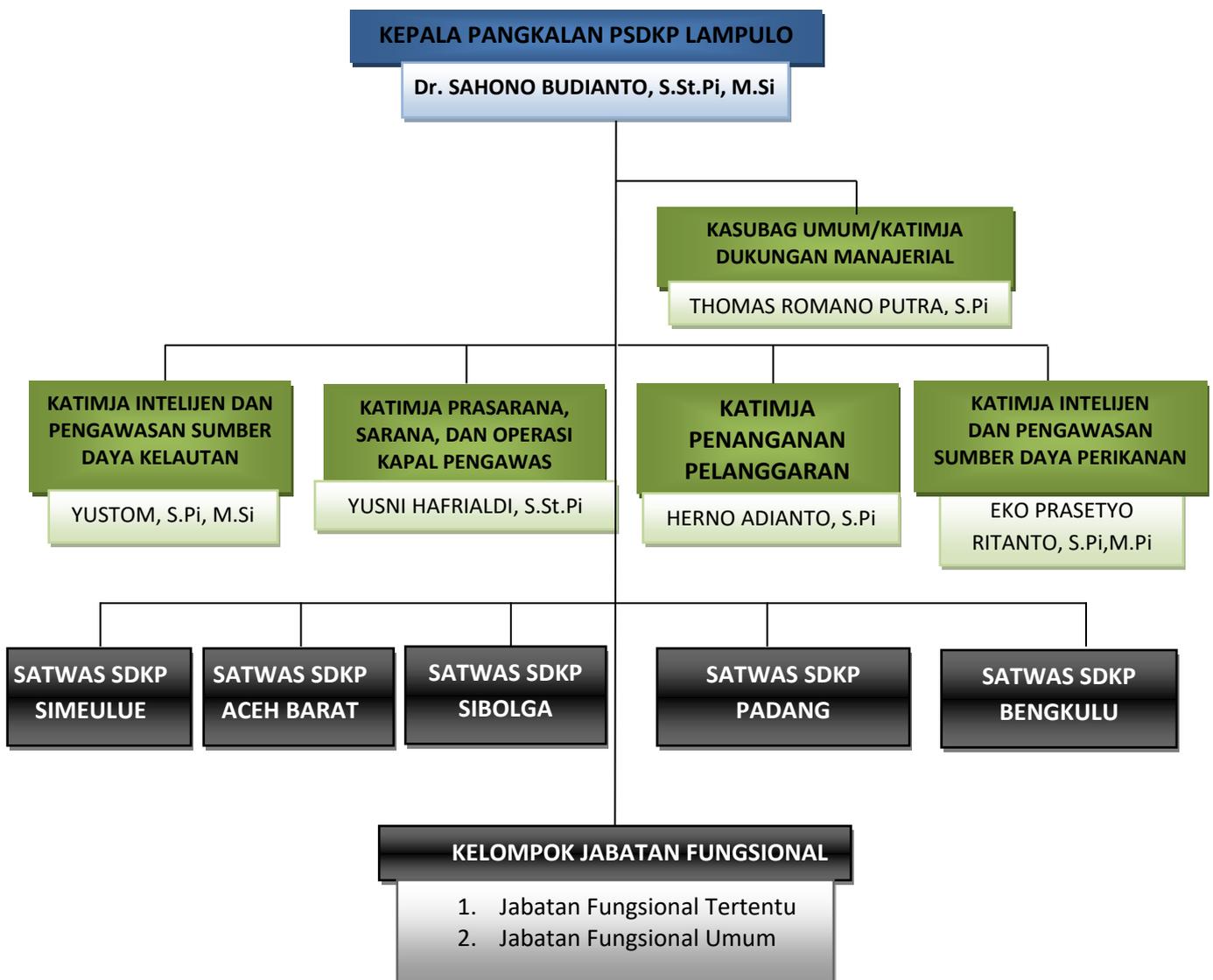
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pangkalan PSDKP Lampulo merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Pangkalan PSDKP Lampulo menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a) Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b) Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c) Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- d) Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- e) Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi

Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala Pangkalan membawahi Kepala Sub Bagian Umum dengan anggota kelompok Ketua Tim Kerja yang terdiri dari jabatan fungsional tertentu (JFT) dan kelompok jabatan fungsional umum (JFU). Penunjukkan Ketua Tim Kerja dan Anggota Tim Kerja dibuktikan dengan Surat Tugas Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo Nomor: B.1191/PSDKPLan.1/KP.440/X/2023 tentang Pembentukan Tim Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo Tanggal 5 Oktober 2023. Adapun gambaran terkait Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Lampulo, disajikan pada gambar berikut:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Lampulo

Struktur organisasi Pangkalan PSDKP Lampulo, masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan, yang diuraikan sebagai berikut:

a) Kepala Pangkalan

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Struktural eselon III/a. Tugas dan kewenangan dari Kepala Pangkalan, yaitu merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkungan UPT Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b) Kepala Sub Bagian Umum

Kepala Sub Bagian Umum pada Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural eselon IV/a. Tugas dan kewenangan dari Kepala Sub Bagian Umum, yaitu melakukan melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keluarga, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik Negara dan perlengkapan.

c) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional

Koordinator Pelaksana Fungsional, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

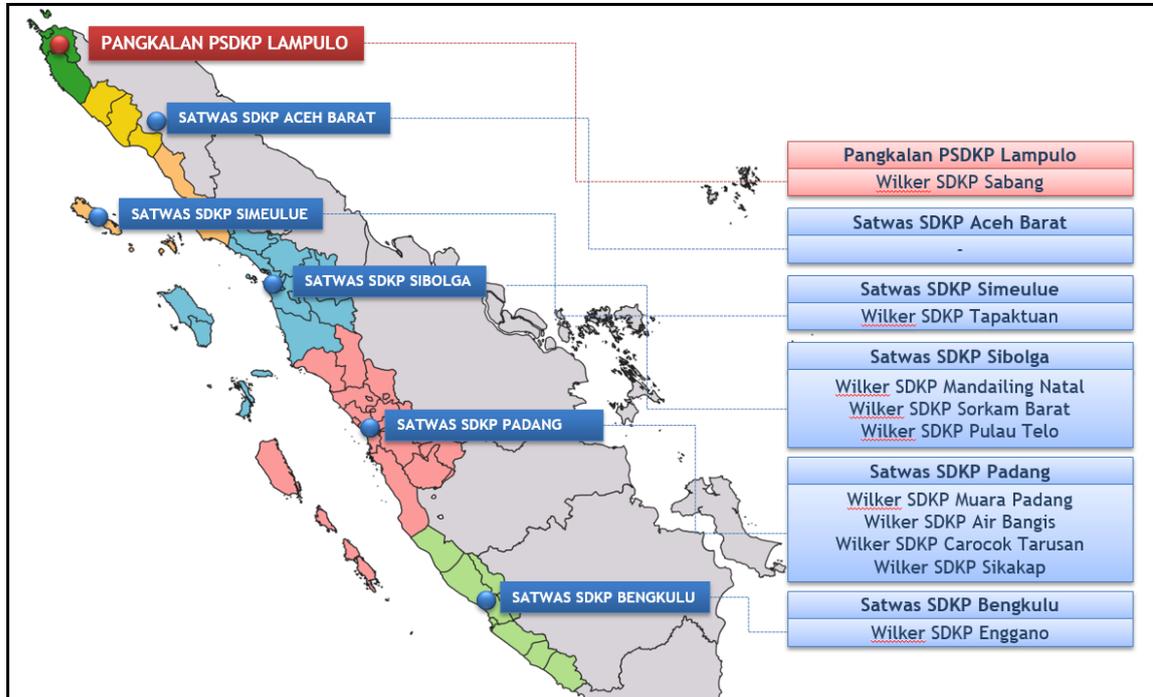
d) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

e) Satuan PSDKP

Pada Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dibentuk satuan pengawasan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan analisis beban kerja. Satuan Pengawasan PSDKP, merupakan unit organisasi non-struktural di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dipimpin oleh Koordinator Satuan Pengawasan.

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan PSDKP secara baik sampai ke daerah, maka telah di bentuk Satuan PSDKP dan Wilayah Kerja PSDKP di bawah koordinasi UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, yang meliputi 5 Satuan PSDKP dan 10 Wilayah Kerja PSDKP, yang disajikan pada gambar berikut:



Gambar 1.2. Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Lampulo

E. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Tahun 2024 UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, secara garis besar diuraikan sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Kinerja, tugas dan fungsi Unit Kerja serta data umum UPT Pangkalan PSDKP Lampulo.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas tentang rencana strategis UPT Pangkalan PSDKP Lampulo untuk periode 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan

Menjelaskan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, dan akuntabilitas keuangan.

4. Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Tahun 2024 UPT Pangkalan PSDKP Lampulo dan rekomendasi perbaikan kinerja di masa mendatang.

5. Bab V Lampiran

Menyajikan lampiran yang berisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: (1) Rencana Kerja; dan (2) Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah disempurnakan dengan pendekatan sistem pengelolaan kinerja berbasis implementasi kerangka berfikir logis.

A. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024

Renstra disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2020 – 2024.

Adapun proses Penyusunan Renstra Ditjen. PSDKP sudah dilakukan dimulai akhir periode renstra 2015 – 2019. Renstra disusun dengan menggunakan evaluasi renstra periode sebelumnya, asumsi yang dipertanggungjawabkan serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterliatan Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup Ditjen. PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Secara ringkas arah kebijakan Ditjen. PSDKP Tahun 2020 – 2024 untuk mendukung Sasaran Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan PSDKP;
3. Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla);
4. Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
5. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam PSDKP.

Berdasarkan arah kebijakan PSDKP tersebut, ditetapkan Sasaran Kegiatan pencapaian dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran Kegiatan tersebut digunakan juga untuk Penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja Ditjen. PSDKP.

1. Strategis Pencapaian Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, dilakukan melalui:
 - a. Membangun Budaya Kerja Ditjen PSDKP;
 - b. Mengembangkan Kompetensi SDM Aparatur PSDKP;
 - c. Membangun Pola Karir PNS Ditjen. PSDKP;
 - d. Meningkatkan Jumlah dan Sebaran SDM Aparatur PSDKP.
2. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan PSDKP, dilakukan melalui:
 - a. Membangun Sarana Pengawasan (Kapal Pengawas, Speed Boat dan Sarana Pengawasan lainnya);
 - b. Membangun Infrastruktur Pengawasan yang memadai;
 - c. Meningkatkan Pemeliharaan Kapal Pengawas agar siap operasional;
 - d. Mengembangkan Kelembagaan Pengawasan.
3. Strategis Pencapaian Kebijakan Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla), dilakukan melalui:
 - a. Operasi Bersama Pengawasan di Laut;
 - b. Pertukaran Data;
 - c. Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan;
 - d. Peningkatan Kapasitas SDM Pengawasan.
4. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan komunikasi dengan *stakeholder* dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dilakukan melalui:
 - a. Memperkuat sinergitas dan harmonisasi PSDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor di tingkat Pusat;
 - b. Memelihara komitmen bersama dengan Lembaga Internasional dan Regional dalam pemberantasan *IUU Fishing*;
 - c. Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (*preventif*), pembinaan, represif (*ultimum remedium*);

- d. Menerapkan metode *auditing* dalam PSDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan.
5. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam PSDKP, dilakukan melalui:
- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab;
 - b. Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain;
 - c. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung PSDKP melalui POKMASWAS;
 - d. Menanamkan pengetahuan pengelolaan SDKP yang bertanggungjawab sejak dini melalui “PSDKP Mengajar”;
 - e. Meningkatkan peran aktif pemuda melalui “Pemuda Pelopor Pengawasan”;
 - f. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar.

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) di dalam dokumen Renstra Pangkalan PSDKP Lampulo 2020-2024 merupakan suatu bentuk upaya inovatif-adaptif di dalam penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi katalis untuk mempercepat pencapaian target sekaligus memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024, terdapat 4 (empat) pengarusutamaan, yaitu:

1) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pangkalan PSDKP Lampulo senantiasa berkomitmen dalam agenda memerangi *IUU Fishing* sambil terus mengembangkan secara simultan indikator-indikator yang esensial dan operasional di lapangan. Berkaitan dengan indikator persentase kepatuhan pelaku usaha dan perikanan yang sudah tercantum baik di dalam RPJMN 2020-2024 maupun Renstra KKP 2020-2024, Pangkalan PSDKP Lampulo akan mengadopsi langsung sebagai indikator kinerja utama pada level program yang secara simultan terus melakukan pengembangan dalam hal metode pemeriksaan kepatuhan maupun metode pengukurannya sehingga dapat menggambarkan kondisi kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang sebenarnya.

2) Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, melalui strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan khususnya di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

3) Pendekatan Sosial Budaya

Pendekatan sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta Penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khasanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa. Pembangunan kebudayaan ingin memastikan bahwa setiap individu maupun kelompok memperoleh perlindungan hak kebudayaan dan kebebasan berekspresi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Peningkatan pembangunan inklusif dan berwawasan budaya lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, antara lain sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan penyadartahuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab senantiasa memperhatikan nilai budaya, kearifan lokal dan keragaman SDA hayati,
- (2) Penumbuhan partisipasi masyarakat dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara inklusif dan terbuka
- (3) Pengembangan dan penguatan budaya kerja serta budaya organisasi lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dilakukan secara kolektif, adaptif, dan inovatif menggunakan berbagai pendekatan yang efektif dalam menjawab tantangan kompleksitas permasalahan pada lingkungan strategis.

4) Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan big data. Optimalisasi teknologi digital sebagai salah satu arus utama pada lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dilakukan melalui:

- (1) Optimalisasi peranan *Regional Monitoring Center* (RMC) Pangkalan PSDKP Lampulo dalam mengintegrasikan berbagai teknologi pemantauan jarak jauh terhadap seluruh aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menghasilkan informasi yang cepat dan akurat dalam mendukung setiap operasi pengawasan,
- (2) Pengembangan sistem pengelolaan data pengawasan sumber daya kelautan berbasis digital,
- (3) Pemanfaatan *Information Technology Forensic* (teknologi forensik digital) dan *intelegent open source* untuk pengembangan kasus tindak pidana kelautan dan perikanan (TPKP).

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Pangkalan PSDKP Lampulo sendiri memiliki Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan terkait dengan target kinerja pada Tahun 2024. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, maka sesuai jenjang hirarki UPT Pangkalan PSDKP Lampulo diberi amanah oleh Direktorat Jenderal PSDKP untuk menjalankan tugas sesuai penetapan kinerja.

Pada tahun 2024, Pangkalan PSDKP Lampulo mengalami 2 (dua) kali Revisi Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2024 disahkan pada tanggal 23 Januari 2024, mengalami Revisi Pertama yang disahkan pada 7 Oktober 2024, kemudian mengalami Revisi Kedua yang disahkan pada 27 Desember 2024. Rincian perubahan indikator kinerja dan target pada Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2024, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Rincian Perubahan Indikator Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2024

SEMULA		MENJADI		KET.
INDIKATOR SASARAN KINERJA	TARGET	INDIKATOR SASARAN KINERJA	TARGET	
Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (Indeks)	81	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (Indeks)	81	Tetap
Indeks kinerja operasi kapal pengawas (Indeks)	91	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (Indeks)	91	Tetap
Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (Indeks)	91	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (Indeks)	91	Tetap
Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas (%)	100	Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas (%)	100	Tetap
Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100	Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100	Tetap
Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100	Tetap
Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	100	Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	100	Tetap
Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	100	Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	100	Tetap
Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	80	Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	80	Tetap
Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi	75	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju	75	Berubah

SEMULA		MENJADI		KET.
(WBK) Pangkalan PSDKP Lampulo (Nilai)		Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pangkalan PSDKP Lampulo (Nilai)		
Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	100	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	100	Tetap
Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (Nilai)	70	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (Nilai)	70	Tetap
Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (Indeks)	82	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (Indeks)	82	Tetap
Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Lampulo (Nilai)	84	Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Lampulo (Nilai)	84	Tetap
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80	Tetap
Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	21	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	70	Berubah
Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Lampulo (Inovasi)	1	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Lampulo (Inovasi)	1	Tetap
Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan publik lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (Indeks)	80	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan publik lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (Indeks)	80	Tetap
Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	94	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	94	Tetap
Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	80	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	80	Tetap
Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	80	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	80	Tetap
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (Nilai)	93,76	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (Nilai)	93,76	Tetap
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (Nilai)	82	Nilai Kinerja Anggaran Perencanaan (NKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (Nilai)	82	Berubah

Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2024, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
KEGIATAN 1. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN				
SK1	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif	1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (Indeks)	81
SK2	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif	2	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (Indeks)	91
		3	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (Indeks)	91
		4	Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas (%)	100
SK3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	5	Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100
		6	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN				

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
SK4	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	7	Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	100
KEGIATAN 3. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN				
SK5	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	8	Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	100
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
SK6	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas	9	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	80
		10	Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	80
SK7	Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang berkualitas	11	Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (Indeks)	93
KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP				
SK8	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	12	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pangkalan PSDKP Lampulo (Nilai)	75
		13	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	100
		14	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (Nilai)	70
		15	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (Indeks)	82
		16	Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Lampulo (Nilai)	84
		17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
		18	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	70
		19	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Lampulo (Inovasi)	1
		20	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan publik lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (Indeks)	80
		21	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	94
		22	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	80
23	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup	80		

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	
		24 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (Nilai)	93,76
		25 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (Nilai)	71

Pada tahun 2024, Pangkalan PSDKP Lampulo mengalami 18 (delapan belas) kali Revisi Anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3. Rincian Revisi Anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2024

No.	REVISI KE-	PENJELASAN
1	KE-1 Tema Revisi : revisi permintaan pemutakhiran data Petunjuk Operasional Nomor DIPA : SP DIPA- 032.05.2.065135/2024 Revisi Ke-1 Tanggal 2 Januari 2024 Surat Usulan Revisi: B.5/PSDKPLAN.1/RC.110/I/2024 Tanggal 2 Januari 2024.	Rincian pada revisi kali ini adalah ganti akun belanja pegawai berupa belanja tunjangan kemahalan PPPK menjadi belanja tunjangan beras PPPK senilai Rp47.820.000, pergeseran anggaran dalam 1 RO untuk jenis belanja yang sama yaitu belanja keperluan kantor menjadi belanja jasa lainnya berupa honor PPNPN mejadi Honor PJLP senilai Rp526.176.000
2	KE-2 Tema Revisi : revisi DJA dan buka blokir Nomor DIPA : SP DIPA- 032.05.2.065135/2024 Revisi Ke-2 Tanggal 25 Januari 2024 Surat Usulan Revisi: B. 48/DJPSDKP/RC.420/I/2024 Tanggal 23 Januari 2024 Tanggal 23 Januari 2024.	Rincian pada revisi kali sbb: Automatic Adjustment dalam catatan halaman IVA DIPA senilai Rp1.133.669.000 meliputi: a. RO Ops KP (RM) senilai Rp537.850.000; b. RO Perawatan Armada senilai Rp335.000.000; c. RO Pengawasan SDK senilai Rp100.000.000; d. RO Pengawasan SDP senilai Rp100.000.000; dan e. RO Dukman senilai Rp60.819.000. Buka blokir penghapusan tanda blokir dalam halaman IVA DIPA meliputi RO Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi senilai Rp100.000.000.
3	KE-3 Tema Revisi : Usulan Revisi Anggaran (Kanwil) Nomor DIPA : SP DIPA- 032.05.2.065135/2024 Revisi Ke-3 Tanggal 16 Februari 2024 Surat Usulan Revisi: B. 251/PSDKPLAN.1/RC.420/II/2024 Tanggal 15 Februari 2024.	Rincian pada revisi kali sbb: 1. Tema Revisi:Revisi POK dan Revisi Adminstrasi; dan 2. Tata cara revisi : Pemutakhiran data POK dan Perubahan Halaman III DIPA. Adapun alasan dari revisi kali ini adalah (1) Terdapat pagu minus pada belanja barang pada KRO 2352.QIC Akun 524111 sebesar Rp864,000, pada Satwas SDKP Sibolga, pemenuhan pagu minus bersumber pada kegiatan yang sama yaitu kegiatan pada Lampulo sebesar Rp864,000; dan (2) Nilai IKPA pada Hal III DIPA tidak mencapai target sehingga dilakukan penyesuai antara Perencanaan dan Penyerasan sehingga Deviasi menjadi kecil
4	KE-4 Tema Revisi : Usulan Revisi Anggaran (Kanwil) Nomor DIPA : SP DIPA- 032.05.2.065135/2024 Revisi Ke-4 Tanggal 19 April 2024 Surat Usulan Revisi: B. 474/PSDKPLAN.1/RC.420/IV/2024 Tanggal 19 April 2024.	Rincian pada revisi kali sbb: a) Tema Revisi:Revisi POK dan Revisi Adminstrasi; b) Tata cara revisi : Pemutakhiran data POK dan Perubahan Halaman III DIPA. Adapun alasan dari revisi kali ini adalah sebagai berikut: a) Terdapat pagu minus pada belanja pegawai dan; b) Nilai IKPA pada Hal III DIPA tidak mencapai target sehingga dilakukan penyesuai antara Perencanaan dan Penyerasan sehingga Deviasi menjadi kecil; dan c) Pergeseran anggaran pada KRO sama dan akun yang sama, semula 2353.QIC.004.052.I.532111 menjadi 2353.QIC.004.052.G.532111 sebesar Rp3,185,000 berupa penbahan anggaran pengadaan Laptop/Tablet.
5	KE-5 Tema Revisi : Usulan Revisi Anggaran Ditjen PSDKP TA 2024 (Buka Blokir Hal IV.A DIPA) Nomor DIPA : SP DIPA- 032.05.2.065135/2024	Rincian pada revisi kali sbb: Buka blokir anggaran sebesar Rp12.050.000,- pada Satker Pangkalan PSDKP Lampulo dialihkan untuk penambahan biaya pemeliharaan sumur artesis sebesar Rp1.682.000,- dan Belanja

No.	REVISI KE-	PENJELASAN
	Revisi Ke-5 Tanggal 17 April 2024 Surat Usulan Revisi: B.232/DJPSDKP/RC.420/IV/2024 Tanggal 17 April 2024.	Penambahan Daya Tahan Tubuh yang semula hanya diberikan selama 7 hari menjadi 8 hari sebesar Rp10.368.000,-
6	<p>KE-6</p> <p>Tema Revisi : revisi pemutakhiran data POK Nomor DIPA : SP DIPA- 032.05.2.065135/2024</p> <p>Revisi Ke-6 Tanggal 5 Mei 2023</p> <p>DS:4775-3050-0052-5758</p> <p>Surat Usulan Revisi: B.725/PSDKPLan.1/RC.110/VI/2024 Tanggal 24 Juni 2024.</p>	<p>a) Revisi akan dilakukan pada KRO 2350.RBQ.001.052.A.533111 (Belanja Gedung dan Bangunan) dari nilai sebelumnya Rp 1.743.447.000 menjadi sebesar Rp1.628.871.000 dan pengurangan pada KRO 2350.RBQ.001.052.A.533115 (Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan) dari nilai sebelumnya Rp 314.784.000 menjadi sebesar Rp 123.790.000. Lalu penambahan juga pada KRO 2350.RBQ.001.052.B.533111 (Belanja Gedung dan Bangunan) dari nilai sebelumnya Rp 1.140.000.000 menjadi Rp 1.445.570.000. Usulan revisi pergeseran anggaran ini akan dialokasikan untuk mendukung Pembangunan. Kantor Satwas SDKP Padang lebih fungsional tepatnya di lantai II;</p> <p>b) Revisi pengurangan akan dilakukan pada KRO 2350.QHD.001.052.C.521211 (Belanja Bahan) dari nilai Rp 237.250.000 menjadi Rp 211.250.000 dan KRO 2350.QHD.001.052.D.524113(Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota) dari nilai Rp 1.950.000 menjadi Rp 0. Lalu penambahan pada KRO 2350.QHD.001.052.A.521211 (Belanja bahan) senilai Rp 27.950.000. Usulan revisi pergeseran anggaran ini di alokasikan untuk penambahan belanja bahan berupa pelumas dari bulan Juli sampai Desember;</p> <p>c) Revisi pengurangan akan dilakukan pada KRO 2350.RCG.001.052.B (Perawatan Prediktif Kapal Pengawas) dari nilai Rp 406.840.000 menjadi Rp400.000.000, pada KRO 2350.RCG.001.052.D (Perawatan Pencegahan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat) dari nilai Rp 685.780.000 menjadi Rp 649.403.000, pada KRO 2350.RCG.001.052.E (Perawatan Prediktif Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat) dari nilai Rp 585.711.000 menjadi Rp 578.871.000, pada KRO 2350.RCG.001.052.F (Perawatan Darurat Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat) dari nilai Rp 176.200.000 menjadi Rp 175.000.000. Lalu penambahan pada KRO 2350.RCG.001.052.A (Perawatan Pencegahan Kapal Pengawas) dari nilai Rp 1.130.360.000 menjadi Rp 1.181.617.000 dan penambahan item baru berupa penambahan daya listrik kapal senilai Rp 50.000.000, penambahan daya tersebut di revisi dari nilai docking. Usulan Revisi pergeseran anggaran ini di alokasikan untuk penambahan perawatan pencegahan kapal pengawas;</p> <p>d) Pergeseran anggaran dari kegiatan pengawasan pelaksanaan pemeriksaan Unit usaha yang diperiksa kepatuhannya dalam pencegahan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya pada satwas Bengkulu dari nilai sebelumnya Rp 8.960.000 menjadi nol dan dialokasikan untuk kegiatan Dalam Rangka Menghadiri Undangan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dari nilai sebelumnya nol menjadi Rp 8.960.000;</p> <p>e) Pergeseran anggaran dari kegiatan Perjalanan dinas dalam rangka pengawasan pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya satwas Bengkulu dari nilai sebelumnya Rp 9.360.0000 menjadi nol dan dialokasikan untuk kegiatan Perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan kepatuhan unit usaha Pemanfaatan Ruang laut yang diperiksa kepatuhannya satwas Bengkulu dari nilai sebelumnya Rp23.400.000 menjadi Rp 31.520.000;</p> <p>f) Pergeseran anggaran dari kegiatan Belanja Barang Operasional Lainnya PDH dan PDL PWP3K dari nilai sebelumnya Rp 51.595.000 menjadi Rp45.926.000 dan dialokasikan untuk kegiatan Dalam Rangka Menghadiri Undangan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dari nilai sebelumnya nol menjadi Rp 22.109.000;</p> <p>g) Pergeseran anggaran dari kegiatan Perjalanan dinas dalam rangka pengawasan Pulau Pulau Kecil Terluar Pangkalan PSDKP Lampulo dari nilai sebelumnya Rp 6.080.000 menjadi nol dan dialokasikan untuk kegiatan Dalam Rangka Menghadiri Undangan Direktorat</p>

No.	REVISI KE-	PENJELASAN
		<p>Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dari nilai sebelumnya nol menjadi Rp 22.109.000; dan</p> <p>h) h) Pergeseran anggaran dari kegiatan Perjalanan dinas dalam rangka pengawasan pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya Satwas Simeulue dari nilai sebelumnya Rp 9.120.000 menjadi nol dan dialokasikan untuk kegiatan Dalam Rangka Menghadiri Undangan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dari nilai sebelumnya nol menjadi Rp 22.109.000.</p>
7	<p><u>KE-7</u> Tema Revisi : revisi Kanwil Nomor DIPA : SP DIPA- 032.05.2.065135/2024 Revisi Ke-7 Tanggal 9 Juli 2024 Surat Usulan Revisi: B.780/PSDKPLan.1/RC.110/VII/2024 Tanggal 8 Juli 2024. Tanggal 8 Juli 2024.</p>	<p>Rincian pada revisi kali ini sbb adalah Tema: Revisi Admnsitrasi; Tata cara revisi : Perubahan Halaman III DIPA. Adapun alasan dari revisi kali ini adalah 1.Nilai IKPA pada Hal III DIPA tidak mencapai target sehingga dilakukan penyesuai antara Perencanaan dan Penyerasan sehingga Deviasi menjadi kecil</p>
8	<p><u>KE-8</u> Tema Revisi : Usulan Revisi K/L Nomor DIPA : SP DIPA- 032.05.2.065135/2024 Revisi Ke-8 Tanggal 14 Agustus 2024 Surat Usulan Revisi: B.1002/PSDKPLan.1/RC.110/VIII/2024 Tanggal 14 Agustus 2024.</p>	<p>Adapun alasan dari revisi kali ini adalah 1.terdapat kesalahan akun yaitu: Akun 523121 berupa Tambah Daya Listrik senilai Rp50,000,000, telah dilakukan ralat Akun menjadi 534161.</p>
9	<p><u>KE-9</u> Tema Revisi : Revisi Kanwil Nomor DIPA : SP DIPA- 032.05.2.065135/2024 Revisi Ke-9 Tanggal 3 September 2024 Surat Usulan Revisi: B.1110/PSDKPLan.1/RC.110/IX/2024 Tanggal 3 September 2024.</p>	<p>Adapun alasan dari revisi kali ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Terdapat pagu minus pada belanja pegawai; Revisi RPD Triwulan III 2024 dalam rangka penyesuaian untuk meningkatkan nilai IKPA Satker Pangkalan PSDKP Lampulo; dan, Terdapat pergeseran Anggaran pada KRO yang sama, meliputi perubahan Akun Belanja Barang (52) menjadi Akun Belanja Modal (53).
10	<p><u>KE-10</u> Tema Revisi : Revisi Kanwil Nomor DIPA : SP DIPA- 032.05.2.065135/2024 Revisi Ke-10 Tanggal 17 September 2024 Surat Usulan Revisi: B.1192/PSDKPLan.1/RC.110/IX/2024 Tanggal 17 September 2024.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Optimalisasi sisa Kontraktual untuk meningkatkan capaian realisasi anggaran Satker Pangkalan PSDKP Lampulo meliputi: <ol style="list-style-type: none"> Pekerjaan Fisik dan Konsultan Pengawasn Pembangunan Garasi Kantor Pangkalan PSDKP Lampulo senilai Rp127,257,000, Pekerjaan Fisik, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas Landscape Gudang Pangkalan PSDKP Lampulo, Penataan bangunan Kantor Satwas SDKP Aceh Barat, Perencanaan Teknis Pembangunan Kantor Satwas SDKP Sibolga, Pembangunan, Konsultan Perencana, dan Konsultan Pengawasn Pekerjaan Jalan Komplek Kantor Pangkalan PSDKP Lampulo, dan Menara Penampungan Air Bersih Kantor Pangkalan PSDKP Lampulo senilai Rp458,059,000. Pergeseran anggaran pada akun yang sama yaitu Belanja Barang (52) untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan kegiatan Pengawasan SDKP dan Kegiatan Dukungan Manajemen.
11	<p><u>KE-11</u> Tema Revisi : Revisi Kanwil Nomor DIPA : SP DIPA- 032.05.2.065135/2024 Revisi Ke-11 Tanggal 17 Oktober 2024 Surat Usulan Revisi: B.1411/PSDKPLan.1/RC.420/IX/2024 Tanggal 17 Oktober 2024.</p>	<p>Adapun alasan dari revisi kali ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Terdapat pagu minus pada belanja pegawai; Revisi RPD Triwulan III dan IV 2024 dalam rangka penyesuaian untuk meningkatkan nilai IKPA Satker Pangkalan PSDKP Lampulo.
12	<p><u>KE-12</u> Tema Revisi : Revisi Ditjen PSDKP Nomor DIPA : SP DIPA- 032.05.2.065135/2024 Revisi Ke-12 Tanggal 24 November 2024 Surat Usulan Revisi: B.862/DJPSDKP/RC.420/X/2024 Tanggal 29 Oktober 2024</p>	<p>Dalam rangka pemenuhan hari operasi kapal pengawas sebesar Rp537,850,000 meliputi: Bahan Bakar Minyak KP HIU 12, Pelumas, Biaya Delegasi, dan Konsumsi Rapat Perencanaan Gelar Operasi KP HIU 12.</p>
13	<p><u>KE-13</u> Tema Revisi : Revisi Pemutakhiran POK Nomor DIPA : SP DIPA- 032.05.2.065135/2024 Revisi Ke-13 Tanggal 14 November 2024 Surat Usulan Revisi: B.1592/PSDKPLan.1/RC.420/XI/2024 Tanggal 14 November 2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 2350.QHD.003 Operasi Speedboat Pengawas Pelaksanaan Operasi Speedboat Pengawas (052) sebesar Rp229,386,000 ke Monitoring dan Evaluasi Operasi Speedboat Pengawas (053) sebesar Rp229,386,000. <input type="checkbox"/> 2350.RBQ.001 Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun meliputi: Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP/

No.	REVISI KE-	PENJELASAN
		<p>Pembangunan Kantor Satwas SDKP Padang (052/B) sebesar Rp115,545,000 ke Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP/ Tambahan Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun (052/C) sebesar Rp 115,545,000</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 2350.RCG.001 Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat meliputi: Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas (052) sebesar Rp200,000,000 ke Monitoring dan Evaluasi Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas (053) sebesar Rp200,000,000. □ 2351.BCE.U04 Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana meliputi: Pemberkasian Perkara TPKP (052) sebesar Rp160,700,000 yang bersumber dari Gelar Perkara TPKP (053) sebesar Rp10,500,000; Penjagaan dan Perawatan Barang Bukti TPKP (054) sebesar Rp32,920,000; dan Penjagaan dan Logistik Penanganan Awak Kapal (055) sebesar Rp117,280,000. □ 2355.EBA.994 Layanan Perkantoran meliputi: Gaji dan Tunjangan (001/A) sebesar Rp20,160,000; Pembayaran Gaji PPPK (001/C) sebesar Rp17,180,000; dan Tunjangan Kinerja PPPK (001/D) sebesar Rp151,866,000 yang bersumber dari Tunjangan Kinerja PNS (001/B) sebesar Rp189,206,000. Operasional dan Pemeliharaan Kantor (002/A) sebesar Rp65,539,000; Pemeliharaan Kantor (Gedung,Kendaraan,dll) (002/C) sebesar Rp7,876,000 yang bersumber dari Layanan Daya dan Jasa (002/B) sebesar Rp67,199,000; dan Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor (002/D) sebesar Rp6,216,000.
14	<p>KE-14 Tema Revisi : Revisi Anggaran Kanwil Nomor DIPA : SP DIPA- 032.05.2.065135/2024 Revisi Ke-14 Tanggal 24 November 2024 Surat Usulan Revisi: B.1602/PSDKPLan.1/RC.420/XI/2024 Tanggal 15 November 2024.</p>	<p>Rincian pada revisi kali ini sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tema: Revisi dalam rangka pagu anggaran tetap lainnya (kode 239) dan revisi administrasi; 2. Tata cara revisi : Revisi dalam rangka penghematan anggaran belanja perjalanan dinas,POK, dan Pemutakhiran RPD <p>Adapun alasan dari revisi kali ini adalah: Dalam rangka penghematan/self blocking sisa anggaran perjalanan dinas sesuai surat Menteri keuangan nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024, besaran anggaran perdin yang dihemat adalah Rp200,000,000</p>
15	<p>KE-15 Tema Revisi : Pengesahan Revisi Anggaran Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP TA 2024 Nomor DIPA : SP DIPA- 032.05.2.065135/2024 Revisi Ke-15 Tanggal 29 November 2024 Surat Usulan Revisi: B.985/DJPSDKP/RC.420/XI/2024 Tanggal 29 November 2024</p>	<p>Mempercepat pencapaian kinerja, meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja pada satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP, rincian pergeseran adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pergeseran anggaran Belanja Pegawai (001) antar Satker pada: Kelebihan Belanja Pegawai Ditjen PSDKP, Pangkalan PSDKP Lampulo memiliki kelebihan anggaran belanja pegawai sebesar Rp426.000.000; b. Pergeseran Antar Jenis Belanja, Pangkalan PSDKP Lampulo berupa belanja 53 (Belanja Modal) pada 2352.CAL.001 Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan ke belanja 52 (Belanja Barang) pada 2352.BIC.001 Unit usaha yang diperiksa kepatuhannya dalam pencegahan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya sejumlah Rp400.000, belanja 52 (Belanja Barang) ke belanja 53 (Belanja Modal) pada 2350.RCG.001 Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat sejumlah Rp126.694.000, belanja 52 (Belanja Barang) ke belanja 53 (Belanja Modal) pada 2350.QHD.001 Operasi Kapal Pengawas sejumlah Rp16.980.000, belanja 52 (Belanja Barang) ke belanja 53 (Belanja Modal) pada 2350.QHD.003 Operasi Speedboat Pengawas sejumlah Rp19.055.000, belanja 52 (Belanja Barang) ke belanja 53 (Belanja Modal) pada 2350.QHD.003 Operasi Speedboat Pengawas sejumlah Rp19.055.000, belanja 52 (Belanja Barang) ke belanja 53 (Belanja Modal) pada 2351.BCE.U04 Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana sejumlah Rp32.754.000, dan belanja 52 (Belanja Barang) ke belanja 53 (Belanja Modal) pada 2353.QIC.004 Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya sejumlah Rp12.000.000. c. Perubahan Volume Output pada RO non PN, Pangkalan PSDKP Lampulo pada 2355.EBA.956 Layanan BMN semula 1 menjadi 8 layanan

No.	REVISI KE-	PENJELASAN
		<p>d. Pergeseran Volume Output dan Anggaran Antar Satker pada 2351.BCE.U04 Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana Pengurangan Volume Output sebesar 12 perkara dan Anggaran sebesar Rp672.578.000 pada Satker dengan rincian: Pangkalan PSDKP Lampulo dengan volume sebanyak 3 perkara dan anggaran sebesar Rp204.000.000.</p> <p>e. Pemutakhiran rencana penarikan dana (Hal III DIPA).</p>
16	<p>KE-16 Tema Revisi : Usulan Revisi Pemutahiran POK Nomor DIPA : SP DIPA- 032.05.2.065135/2024 Revisi Ke-16 Tanggal 24 November 2024 Surat Usulan Revisi: B.1806/DJPSDKP/RC.420/XII/2024 Tanggal 11 Desember 2024</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2352.QIC.001 Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya meliputi: Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan unit usaha sumberdaya kelautan yang diperiksa kepatuhannya (052/A) sebesar Rp6,000,000; Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan unit usaha sumberdaya kelautan yang diperiksa kepatuhannya (052/C) sebesar Rp5,240,000; Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan unit usaha sumberdaya kelautan yang diperiksa kepatuhannya (052/D) sebesar Rp11,135,000; Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan unit usaha sumberdaya kelautan yang diperiksa kepatuhannya (052/E) sebesar Rp25,037,000; dan Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan unit usaha sumberdaya kelautan yang diperiksa kepatuhannya (052/I) sebesar Rp3,615,000 ke Monev dan pelaporan pemeriksaan kepatuhan unit usaha sumberdaya kelautan yang diperiksa kepatuhannya (053/A) sebesar Rp51,027,000. 2. 2353.QIC.004 Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya meliputi: Pelaksanaan dan Tindak lanjut pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan (052/I) sebesar Rp5,396,000 ke Monev dan pelaporan pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan (053/A) sebesar Rp5,396,000. 3. 2355.EBA.994 Layanan Perkantoran meliputi: 4. Gaji dan Tunjangan (001/A) sebesar Rp42,754,000; dan Gaji dan Tunjangan (001/C) sebesar Rp8,504,000 ke Gaji dan Tunjangan (001/B) sebesar Rp42,754,000; dan Gaji dan Tunjangan(001/D) sebesar Rp8,504,000; 5. Operasional dan Pemeliharaan Kantor (002/B) sebesar Rp5,640,000 ke Operasional dan Pemeliharaan Kantor (002/A) sebesar Rp5,640,000.
17	<p>KE-17 Tema Revisi : Usulan Revisi POK Nomor DIPA : SP DIPA- 032.05.2.065135/2024 Revisi Ke-17 Tanggal 20 Desember 2024 Surat Usulan Revisi: B.1875/DJPSDKP/RC.420/XII/2024 Tanggal 20 Desember 2024.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 2350.QHD.001 Operasi Kapal Pengawas meliputi: Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas (052/C) sebesar Rp1,244,000; dan Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas (052/D) sebesar Rp900,000 ke Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas (052/A) sebesar Rp1,253,000. <input type="checkbox"/> 2350.QHD.003 Operasi Speedboat Pengawas meliputi: Pelaksanaan Operasi Speedboat Pengawas (052/B) sebesar Rp26,400,000; dan Monitoring dan Evaluasi Operasi Speedboat Pengawas (053/B) sebesar Rp943,000 ke Pelaksanaan Operasi Speedboat Pengawas (052/C) sebesar Rp26,400,000; dan Monitoring dan Evaluasi Operasi Speedboat Pengawas (053/A) sebesar Rp943,000. <input type="checkbox"/> 2350.RBQ.001 Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun meliputi: Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP (052/C) sebesar Rp30,645,000 ke Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP (052/C) sebesar Rp30,645,000. <input type="checkbox"/> 2350.RCG.001 Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat meliputi: Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas (052/B) sebesar Rp8,000; Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas (052/E) sebesar Rp703,000; dan Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas (052/F) sebesar Rp4,000 ke Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas (052/D) sebesar Rp715,000. <input type="checkbox"/> 2351.BCE Penanganan Perkara meliputi: 2351.BCE.U03 Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi administrative sebesar Rp18,592,000 ke 2351.BCE.U04 Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana sebesar Rp 18,592,000. <input type="checkbox"/> 2353.QIC.004 Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya meliputi: Pelaksanaan dan Tindak lanjut pengawasan

No.	REVISI KE-	PENJELASAN
		<p>kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan (052/I) sebesar Rp146,00- ke Pelaksanaan dan Tindak lanjut pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan (052/G) sebesar Rp146,000.</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 2355.EBA.994 Layanan Perkantoran meliputi: Operasional dan Pemeliharaan Kantor (002/A) sebesar Rp7,978,000; Operasional dan Pemeliharaan Kantor (002/B) sebesar Rp14,354,000; dan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (002/D) sebesar Rp2,664,000 ke Operasional dan Pemeliharaan Kantor (002/C) sebesar Rp24,996,000. □ 2355.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan meliputi: Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan (052/A) sebesar Rp450,000 ke Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan (052/A) Rp450,000.
18	<p><u>KE-18</u> Tema Revisi : Usulan Revisi POK Nomor DIPA : SP DIPA- 032.05.2.065135/2024 Revisi Ke-18 Tanggal 27 Desember 2024 Surat Usulan Revisi: B.1915/DJPSDKP/RC.420/XII/2024 Tanggal 27 Desember 2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ 2350.QHD.001 Operasi Kapal Pengawas meliputi: Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas (052/C) sebesar Rp141,000 ke Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas (052/A) sebesar Rp141,000. □ 2350.QHD.003 Operasi Speedboat Pengawas meliputi: Pelaksanaan Operasi Speedboat Pengawas (052/A) sebesar Rp204,000 ke Pelaksanaan Operasi Speedboat Pengawas (052/A) sebesar Rp 204,000. □ 2350.RCG.001 Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat meliputi: Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas (052/E) sebesar Rp30,000 ke Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas (052/E) sebesar Rp30,000. □ 2351.BCE.U03 Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi administratif meliputi: Pelaksanaan Pengenaan Sanksi Administratif (052/B) sebesar Rp340,000 ke Pelaksanaan Pengenaan Sanksi Administratif (052/B) sebesar Rp340,000 □ 2352.QIC.001 Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya meliputi: Monev dan pelaporan pemeriksaan kepatuhan unit usaha sumberdaya kelautan yang diperiksa kepatuhannya (053/A) sebesar Rp150,000 ke Monev dan pelaporan pemeriksaan kepatuhan unit usaha sumberdaya kelautan yang diperiksa kepatuhannya (053/A) sebesar Rp150,000. □ 2353.QIC.004 Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya meliputi: Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya/Pelaksanaan dan Tindak lanjut pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan (052/A) sebesar Rp6,588,000; Pelaksanaan dan Tindak lanjut pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan (052/D) sebesar Rp1,188,000; Pelaksanaan dan Tindak lanjut pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan (052/G) sebesar Rp16,000; ke Pelaksanaan dan Tindak lanjut pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan (052/C) sebesar Rp7,200,000; dan Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya/Monev dan pelaporan pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan (053/A) sebesar Rp576,000. □ 2355.EBA.994 Layanan Perkantoran meliputi: Gaji dan Tunjangan (001/A) sebesar Rp76,000 ke Gaji dan Tunjangan (001/C) sebesar Rp76,000; Operasional dan Pemeliharaan Kantor (002/C) sebesar Rp3,830,000; dan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (002/D) sebesar Rp972,000 ke Operasional dan Pemeliharaan Kantor (002/A) sebesar Rp3,497,000; dan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (002/B) sebesar Rp1,305,000. □ 2355.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal meliputi: 2355.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran sebesar Rp17,000 ke 2355.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan sebesar Rp17,000

C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Pengukuran tingkat capaian IKU dan IKM dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja. Selanjutnya, nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui Penyusunan laporan kinerja yang didukung dengan implementasi Aplikasi *Kinerjaku* yang merupakan aplikasi berbasis teknologi informasi.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang PSDKP Tahun 2024

1. Nilai Capaian IKU+IKM Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2024

Berdasarkan implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja, Pangkalan PSDKP Lampulo telah menyempurnakan dan menetapkan 8 (delapan) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 14 Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Nilai Capaian Kinerja IKU+IKM Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2024, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Nilai Capaian IKU+IKM Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2024



Capaian Kinerja IKU

	TW1	TW2	s/d TW2	TW3	s/d TW3	TW4	s/d TW4
Skor Capaian	👍 107,03 Q	👍 108,35 Q	👍 108,35	👍 107,99 Q	👍 107,99	👍 105,33 Q	👍 105,33
Skor Verifikasi		👍 108,35 Q	👍 108,35	👍 107,99 Q	👍 107,99	👍 105,33 Q	👍 105,33

Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

Sumber: SAPK (kinerjaku.kkp.go.id)

Hasil capaian IKU+IKM Pangkalan PSDKP Lampulo sebesar 105,33 dengan status indikator berwarna hijau. Adapun hasil capaian berada dalam kisaran >100 (Baik). Capaian kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo tahun 2024, tetap dalam tren positif dengan nilainya masih dalam indikator hijau.

2. Capaian IKU+IKM Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2024

Capaian Indikator Kinerja Utama Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2024 ditabulasikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2. Hasil Pengukuran Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV 2024	CAPAIAN	PERSENTASE
KEGIATAN 1. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN					
SK1	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif	1 Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (Indeks)	81	100	120%
SK2	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif	2 Indeks kinerja operasi kapal pengawas (Indeks)	91	99,66	109,52%
		3 Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (Indeks)	91	98,8	108,57%
		4 Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas (%)	100	100	100%
SK3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	5 Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100	100	100%
		6 Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100	100	100%
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN					
SK4	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	7 Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	100	100	100%
KEGIATAN 3. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN					
SK5	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	8 Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	100	100	100%
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					
SK6	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas	9 Indeks penenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	80	80	100%
		10 Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	80	80	100%
SK7	Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang berkualitas	11 Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (Indeks)	93	100	107,53%
KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP					
SK8	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	12 Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pangkalan PSDKP Lampulo (Nilai)	75	83,95	111,93%
		13 Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	100	100	100%
		14 Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (Nilai)	70	83,33	119,04%
		15 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (Indeks)	82	82,86	101,05%
		16 Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Lampulo (Nilai)	84	85,45	101,73%
		17 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80	100	120%
		18 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	70	75,63	108,04%
		19 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Lampulo (Inovasi)	1	1	100%
		20 Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan publik lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (Indeks)	80	86,55	108,19%
		21 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	94	124,17	120%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV 2024	CAPAIAN	PERSENTASE
		22 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	80	100	120%
		23 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	80	94,64	118,3%
		24 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (Nilai)	93,76	94,99	101,31%
		25 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (Nilai)	71	75	105,63%

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Selama tahun 2024, UPT Pangkalan PSDKP Lampulo telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap Sasaran Kegiatan, diuraikan sebagai berikut:

SK 1: Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat yang Partisipatif

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat yang Partisipatif” diidentifikasi ke dalam 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

Indeks Kualitas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk

IK 1: “Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS”

Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kualitas terhadap kegiatan pembinaan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kegiatan pembinaan POKMASWAS untuk terciptanya Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat (SIMSWASMAS) secara baik dan efektif. Dalam hal ini, di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan kegiatan pembinaan Pokmaswas dan dituangkan dalam sebuah laporan (80%).

Pembinaan POKMASWAS adalah kegiatan pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, konsultasi, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, yang dilakukan melalui pembekalan, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada anggota POKMASWAS guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif POKMASWAS dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS dinilai terhadap kualitas kegiatan pembinaan POKMASWAS yang dilaksanakan oleh UPT dan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Komponen penilaian kegiatan pembinaan POKMASWAS antara lain:

- a. Rencana kerja kegiatan pembinaan;
- b. Pendataan keaktifan POKMASWAS;
- c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan.

Capaian IK 1: “Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS” lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada tahun 2024, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3. Hasil Capaian IK 1: “Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2024		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS	81	100	120%

Pada tahun 2024, Pangkalan PSDKP Lampulo menentukan target pada IK 1: “Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS” dengan nilai indeks sebesar 81, telah tercapai nilai indeks 100 sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 120%.

IK 1: “Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS”, merupakan indikator baru yang digunakan mulai tahun 2023, sehingga tidak dapat dibandingkan targetnya dengan target RPJMN. Pada tahun 2022, terdapat indikator kinerja terkait kegiatan pembinaan Pokmaswas dengan nomenklatur “Persentase Pokmaswas yang Aktif Mendukung Pengawasan SDKP”. Namun, dikarenakan adanya perbedaan satuan pengukuran, maka capaian kinerja tidak dapat dibandingkan.

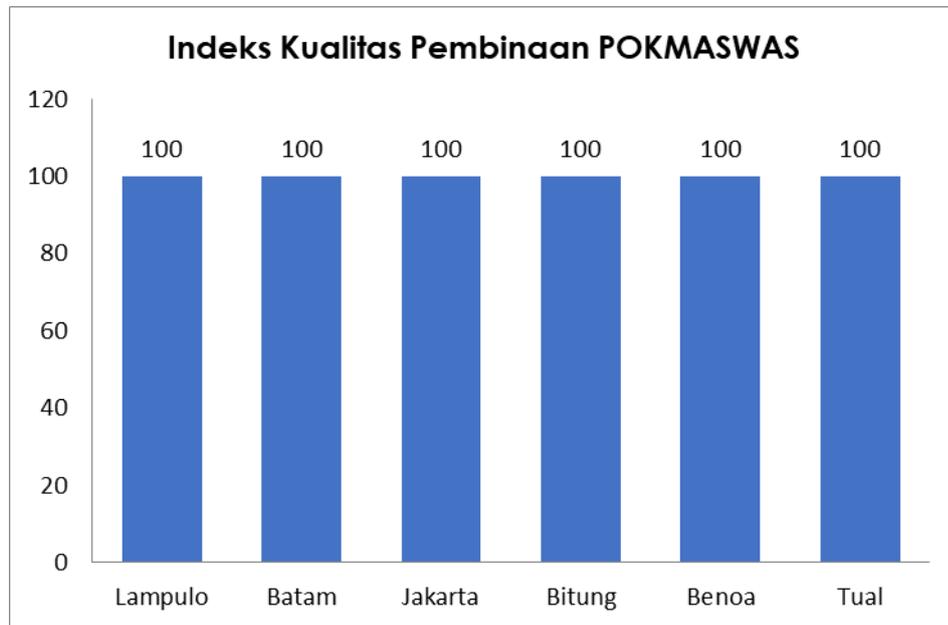
Capaian IK 1: “Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS”, pada tahun 2024, dibandingkan dengan realisasi dari tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya pada IK 1: “Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS”

Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS		
Perbandingan	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	87,6	81
Capaian	100	100
% Realisasi	114,16%	120%

Berdasarkan tabel di atas, target IK 1: “Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS” pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan target pada tahun sebelumnya. Capaian pada tahun 2024 sama dengan capaian pada tahun sebelumnya, namun karena adanya penurunan target dari tahun sebelumnya, persentase realisasi capaian mengalami kenaikan.

Capaian IK 1: “Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS”, pada tahun 2024, dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Grafik 3.1. Perbandingan Capaian IK:1 dengan Instansi Lain

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa capaian dari 6 (enam) UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP adalah sama.

Adapun Rincian Hasil Pembinaan POKMASWAS Pangkalan PSDKP Lampulo disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5. Hasil Pembinaan POKMASWAS lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo

NO	NAMA POKMASWAS	NAMA KETUA	ALAMAT LENGKAP POKMASWAS (Kab/Kota, Kec. Kelurahan/Desa)	JENIS KEGIATAN	DASAR PELAKSANAAN	LOKASI DAN WAKTU PELAKSANAAN	INSTANSI PEMBINA
1	2	3	4	5	6	7	8
ACEH TENGGARA							
1.	Ayu Jaya	Jaelani	Desa Gumpang Jaya, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh	Pembinaan POKMASWAS Tahun 2024	Undangan pembinaan POKMASWAS dari Fraksi Partai Golkar	Gedung Balai Musyafat Jl. Jenderal A.H Yani No. 6, Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh pada tanggal 4 Februari 2024	DKP Provinsi Aceh
2.	Bawan Jahe	Mohd. Daud Pelis	Desa Tualang Lama, Kecamatan Dlong Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh	Pembinaan POKMASWAS Tahun 2024	Undangan pembinaan POKMASWAS dari Fraksi Partai Golkar	Gedung Balai Musyafat Jl. Jenderal A.H Yani No. 6, Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh pada tanggal 4 Februari 2024	DKP Provinsi Aceh
ACEH UTARA							

NO	NAMA POKMASWAS	NAMA KETUA	ALAMAT LENGKAP POKMASWAS (Kab/Kota, Kec. Kelurahan/Desa)	JENIS KEGIATAN	DASAR PELAKSANAAN	LOKASI DAN WAKTU PELAKSANAAN	INSTANSI PEMBINA
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Lhok Meuraxa	M. Nurdin	Desa Jambo Timu, Kec. Blang Mangat	Pembinaan POKMASWAS Tahun 2024	Undangan pembinaan POKMASWAS dari Fraksi Partai Golkar	Lido Graha Hotel Jl. Medan - Banda Aceh, Uteun Kot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh	DKP Provinsi Aceh
4.	Lhok Pusong	Rusli M. Yusuf	Desa Pusong, Kecamatan Banda Sakti	Pembinaan POKMASWAS Tahun 2024	Undangan pembinaan POKMASWAS dari Fraksi Partai Golkar	Lido Graha Hotel Jl. Medan - Banda Aceh, Uteun Kot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh	DKP Provinsi Aceh
5.	Lhok Ujung Blang	Abdullah Jurumudi	Desa Ujung Blang, Kecamatan Banda Sakti	Pembinaan POKMASWAS Tahun 2024	Undangan pembinaan POKMASWAS dari Fraksi Partai Gerindra	Lido Graha Hotel Jl. Medan - Banda Aceh, Uteun Kot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh	DKP Provinsi Aceh
SUMATERA BARAT							
6.	Jambak Sea Turtle	Pati Hariyos	Jl. Pariwisata No.10 Pasir Jambak, Kelurahan Pasia Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat	Pembinaan POKMASWAS Tahun 2024	Undangan Pembinaan POKMASWAS dari Fraksi PKS	Gedung Balai Latihan Koperasi (BALATKOP), Jl. S. Parman No. 234, Kelurahan Ulak Karang, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat tanggal 12 Mei 2024	DKP Provinsi Sumatera Barat
7.	Lubuk Tempurung	Mikrizal	Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat	Pembinaan POKMASWAS Tahun 2024	Undangan Pembinaan POKMASWAS dari Fraksi PKS	Gedung Balai Latihan Koperasi (BALATKOP), Jl. S. Parman No. 234, Kelurahan Ulak Karang, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat tanggal 12 Mei 2024	DKP Provinsi Sumatera Barat

Pangkalan PSDKP Lampulo menentukan target pembinaan POKMASWAS di 3 (tiga) lokasi. Sampai dengan tahun 2024 pembinaan POKMASWAS telah dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi, yaitu di Aceh Tenggara (pada Februari 2024), Aceh Utara (Februari 2024), dan Sumatera Barat (Mei 2024).

Capaian IK 1: “Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS”, mengalami keberhasilan tercapainya target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada IKU tersebut, yaitu dengan menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan instansi terkait dan Pokmaswas, agar kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dapat berjalan dengan baik.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target, yaitu belum semua POKMASWAS yang dibina bersama dengan DKP terkait tidak mengupdate struktur keanggotaan POKMASWAS nya dan bersamaannya waktu pengajuan Narasumber dengan daerah yang berbeda. sehingga harus dikoordinasikan ulang untuk menyesuaikan jadwalnya dan keterlibatan tim PSDKP di dalam kegiatan tersebut.

Faktor penunjang yang dapat memaksimalkan pencapaian target, yaitu dengan melakukan pembinaan terhadap Pokmaswas secara rutin dan menyeluruh di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Lampulo.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 1 sebesar Rp 299.998.000,00. Sampai dengan tahun 2024, anggaran telah terserap sebesar Rp 299.997.422,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 100%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

SK2: Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan yang Efektif”, diidentifikasi ke dalam 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

IK 2: “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas”

Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif.

Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- a. Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan (Bobot 40%), terdiri dari:
 - Pemeriksaan Kapal Perikanan (unit kapal) : Bobot 70%
 - Pemeriksaan Kelautan (kali) : Bobot 30%

Pemeriksaan Kelautan, antara lain: Pemeriksaan Kawasan Konservasi, Pemanfaatan Ruang Laut, Pengawasan PPKT, Pencemaran SDI dan lingkungan, Sedimentasi, dan lain lain.

 - Setiap Kapal Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 2 (dua) unit kapal ikan per hari
- b. Cakupan Wilayah Pengawasan (Bobot 40%)
 - Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan

Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM2 (Sumber: BIG,2015)

- Masing-masing kapal pengawas diberikan target cakupan per tahun. Dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis dan alokasi kapal setiap WPPNRI.
- c. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari *Intercept* Indikasi Pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR (Bobot 15%)
- *Intercept* Indikasi Pelanggaran Kelautan dan Perikanan : Bobot 60%
 - Dukungan Kegiatan SAR : Bobot 40%
- Dukungan Kegiatan SAR bersifat situasional, bagi Kapal Pengawas yang tidak mendapat tugas melakukan SAR dianggap memenuhi bobot / mencapai target
- d. Hasil Dukungan Kegiatan Operasi yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Ilegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi (Bobot 5%)
- Penyitaan Alat Tangkap Terlarang : Bobot 30%
 - Pemutusan Rumpon Ilegal : Bobot 30%
 - Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi : Bobot 40%
- Komponen ini juga bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot / target tercapai

Capaian IK 2: “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas” pada tahun 2024, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5. Hasil Capaian IK 2: “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2024		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas	91	99,66	109,52%

Pada tahun 2024, target IK 2: “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas” ditentukan nilai 91 telah tercapai nilai 99,66, sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 109,52%. Rincian komponen capaian tersebut, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6. Rincian Komponen Capaian IK 2: “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas”

Kapal Pengawas	Variabel Pembentuk	Indikator	Target / Realisasi	Nilai	Nilai Indikator	Nilai Variabel Pembentuk	Nilai Indeks
KP. Hiu 12	Jumlah Pemeriksaan	Pemeriksaan Kapal Perikanan (70%)	Target	120	70	40	99,66
			Realisasi	144			

Kapal Pengawas	Variabel Pembentuk	Indikator	Target / Realisasi	Nilai	Nilai Indikator	Nilai Variabel Pembentuk	Nilai Indeks
	Kelautan dan Perikanan (40%)	Pemeriksaan Kelautan (30%)	Target	5	30		
			Realisasi	5			
	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)	-	Target	0,68	39,66	39,66	
			Realisasi	0,67			
	Tindak Lanjut Target Operasi (15%)	Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)	Target	5	60	15	
			Realisasi	5			
		Dukungan Kegiatan SAR (40%)	Target	0	40		
			Realisasi	0			
	Dukungan Operasi Lainnya (5%)	Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (30%)	Target	0	30	5	
			Realisasi	0			
		Pemutusan Rumpon Illegal (30%)	Target	0	30		
			Realisasi	0			
Dukungan Operasi Bersama (40%)		Target	0	40			
		Realisasi	0				

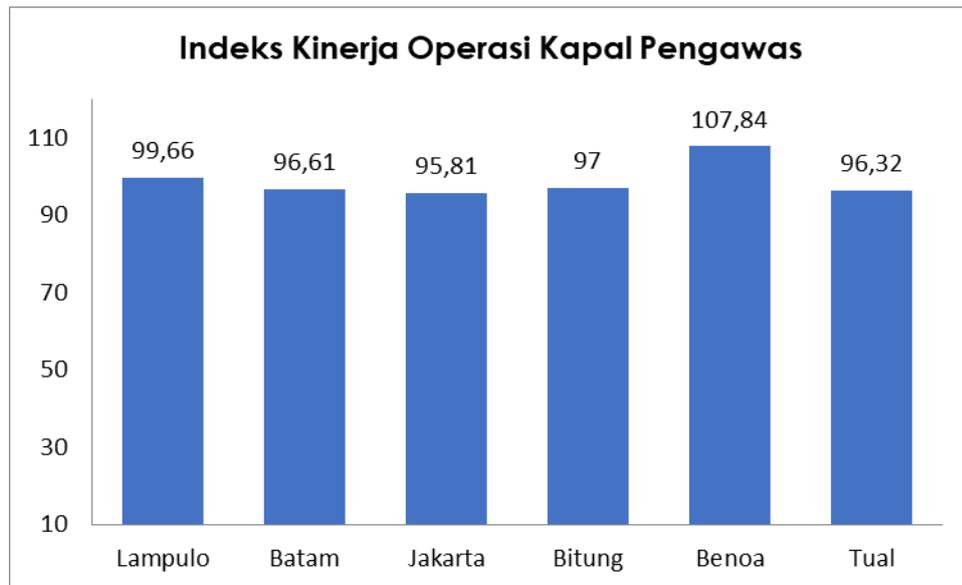
IK 2: “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas”, merupakan indikator baru yang digunakan mulai tahun 2022, nomenklatur indikator tersebut berbeda dengan indikator pada RPJMN sehingga tidak dapat dibandingkan targetnya.

IK 2: “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas” pada tahun 2024, dibandingkan dengan realisasi dari tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas			
Perbandingan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	85	87,6	91
Capaian	88,31	100	99,66
% Realisasi	103,89%	114,16%	109,52%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa target IK 2: “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas” mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun tetap memenuhi target tahun 2024.

Capaian IK 2: “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas”, pada tahun 2024, dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa capaian dari 6 (enam) UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP, nilai capaian yang tertinggi diperoleh Pangkalan PSDKP Bena, dan nilai capaian terendah diperoleh Pangkalan PSDKP Tual. Namun capaian dari ke-enam UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP semuanya telah memenuhi target nilai indeks 91.

Capaian IK 2: “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas” lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada tahun 2024 mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada IKU tersebut, yaitu dengan memastikan kesiapan Armada Kapal pengawas dalam hal ini body kapal dan mesin penggerak serta mesin bantu dan selanjutnya dengan merencanakan operasi kapal pengawas dengan memperhatikan faktor Cuaca dan kerawanan pada 2 (dua) Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Selat Malaka (571) dan Samudera Hindia (572) yang merupakan wilayah kerja Pangkalan PSDKP Lampulo.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target, yaitu cuaca buruk dan kondisi body kapal dan bagian mesin utama dan mesin bantu masih diperbaiki sehingga jadwal operasi kapal pengawas harus direncanakan ulang.

Faktor penunjang yang dapat memaksimalkan pencapaian target, yaitu dengan melakukan perawatan rutin terhadap mesin utama dan mesin bantu kapal pengawas serta mengupdate secara berkala mingguan terkait cuaca yang diterbitkan oleh BMKG serta menjalin koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dalam hal informasi Target operasi di masing masing WPP di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Lampulo.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 2 sebesar Rp 4.900.877.000,00. Sampai dengan tahun 2024, anggaran telah terserap sebesar Rp 4.900.872.841,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 100%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

IK 3: “Indeks Kinerja Operasi *Speed Boat* Pengawas”

Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasional *Speed Boat* Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional speedboat pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif.

Indeks Kinerja Operasional *Speed Boat* Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni;

- a. Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan (Bobot 40%), terdiri dari:
 - Pemeriksaan Kapal Perikanan (unit kapal) : Bobot 50%
 - Pemeriksaan Kelautan (kali) : Bobot 50%
 - Setiap *Speed Boat* Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 1 (satu) unit kapal ikan per hari
- b. Cakupan Wilayah Pengawasan (Bobot 40%)
 - Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM2 (Sumber: BIG, 2015)
 - Masing-masing *speed boat* pengawas diberikan target cakupan per tahun. Dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis *speed boat* pengawas
- c. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari *Intercept* Indikasi Pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR (Bobot 15%);
 - *Intercept* Indikasi Pelanggaran Kelautan dan Perikanan : Bobot 60%
 - Dukungan Kegiatan SAR : Bobot 40%
 - Dukungan Kegiatan SAR bersifat situasional, bagi *Speed Boat* Pengawas yang tidak mendapat tugas melakukan SAR dianggap memenuhi bobot / mencapai target
- d. Hasil Dukungan Kegiatan Operasi yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Ilegal, dan Dukungan Operasi Bersama,

Terkoordinasi, Interdiksi.

- Penyitaan Alat Tangkap Terlarang : Bobot 40%
- Pemutusan Rumpon Ilegal : Bobot 40%
- Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi : Bobot 20%

Komponen ini juga bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot / target tercapai

Capaian IK 3: “Indeks Kinerja Operasi *Speed Boat* Pengawas” pada tahun 2024, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7. Hasil Capaian IK 3: “Indeks Kinerja Operasi *Speed Boat* Pengawas”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2024		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Indeks Kinerja Operasi Speed Boat Pengawas	91	98,80	108,57%

Pada tahun 2024, target IK 3: “Indeks Kinerja Operasi *Speed Boat* Pengawas” ditentukan nilai 91 telah tercapai nilai 98,80, sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 108,57%. Rincian komponen capaian tersebut, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.8. Rincian Komponen Capaian IK 3: “Indeks Kinerja Operasi *Speed Boat* Pengawas”

Kapal Pengawas	Variabel Pembentuk	Indikator	Target / Realisasi	Nilai	Nilai Indikator	Nilai Variabel Pembentuk	Nilai Indeks
Dolphin ST. BL 01	Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)	Pemeriksaan Kapal Perikanan (50%)	Target	0	0	40	100
			Realisasi	0			
		Pemeriksaan Kelautan (50%)	Target	0	0		
	Realisasi		0				
	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)	-	Target	0	40	40	
			Realisasi	0			
	Tindak Lanjut Target Operasi (15%)	Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)	Target	0	60	15	
			Realisasi	0			
		Dukungan Kegiatan SAR (40%)	Target	0	40		
			Realisasi	0			
Dukungan Operasi Lainnya (5%)	Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (40%)	Target	0	40	5		
		Realisasi	0				
	Pemutusan Rumpon Ilegal (40%)	Target	0	40			
Realisasi		0					
Dukungan Operasi Bersama (20%)	-	Target	0	20			
		Realisasi	0				
Kakap (Anemon & Chelonia Mydas - DKP Sumbar)	Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)	Pemeriksaan Kapal Perikanan (50%)	Target	80	50	40	99,50
			Realisasi	84			
		Pemeriksaan Kelautan (50%)	Target	9	50		
			Realisasi	12			
	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)	-	Target	0,00033	39,50	39,50	
			Realisasi	0,00032			
	Tindak Lanjut Target Operasi (15%)	Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)	Target	9	60	15	
			Realisasi	9			

Kapal Pengawas	Variabel Pembentuk	Indikator	Target / Realisasi	Nilai	Nilai Indikator	Nilai Variabel Pembentuk	Nilai Indeks
	Dukungan Kegiatan SAR (40%)	Dukungan Kegiatan SAR (40%)	Target	0	40	5	
			Realisasi	0			
	Dukungan Operasi Lainnya (5%)	Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (40%)	Target	2	40		
			Realisasi	2			
		Pemutusan Rumpon Illegal (40%)	Target	0	40		
			Realisasi	0			
Dukungan Operasi Bersama (20%)	Target	0	20				
	Realisasi	0					
Napoleon-036	Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)	Pemeriksaan Kapal Perikanan (50%)	Target	30	50	40	94,90
			Realisasi	34			
		Pemeriksaan Kelautan (50%)	Target	3	50		
			Realisasi	3			
	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)	-	Target	0,000078	34,90	34,90	
			Realisasi	0,000068			
	Tindak Lanjut Target Operasi (15%)	Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)	Target	3	60	15	
			Realisasi	4			
		Dukungan Kegiatan SAR (40%)	Target	0	40		
			Realisasi	0			
	Dukungan Operasi Lainnya (5%)	Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (40%)	Target	0	40		
			Realisasi	0			
		Pemutusan Rumpon Illegal (40%)	Target	0	40		
			Realisasi	0			
Dukungan Operasi Bersama (20%)	Target	0	20				
	Realisasi	0					
Napoleon-045	Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)	Pemeriksaan Kapal Perikanan (50%)	Target	98	50	40	
			Realisasi	103			
		Pemeriksaan Kelautan (50%)	Target	13	50		
			Realisasi	13			
	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)	-	Target	0,00041	40	40	
			Realisasi	0,00041			
	Tindak Lanjut Target Operasi (15%)	Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)	Target	2	60	15	
			Realisasi	2			
		Dukungan Kegiatan SAR (40%)	Target	0	40		
			Realisasi	0			
	Dukungan Operasi Lainnya (5%)	Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (40%)	Target	2	40		
			Realisasi	2			
		Pemutusan Rumpon Illegal (40%)	Target	0	40		
			Realisasi	0			
Dukungan Operasi Bersama (20%)	Target	0	20				
	Realisasi	0					
RIB / Sea Rider	Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)	Pemeriksaan Kapal Perikanan (50%)	Target	100	50	40	
			Realisasi	102			
		Pemeriksaan Kelautan (50%)	Target	12	50		
			Realisasi	12			
	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)	-	Target	0,00025	38,40	38,40	
			Realisasi	0,00024			
	Tindak Lanjut Target Operasi (15%)	Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)	Target	3	60	15	
			Realisasi	3			
		Dukungan Kegiatan SAR (40%)	Target	0	40		
			Realisasi	0			
	Dukungan Operasi Lainnya (5%)	Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (40%)	Target	1	40		
			Realisasi	1			
		Pemutusan Rumpon Illegal (40%)	Target	0	40		
			Realisasi	0			
Dukungan Operasi Bersama (20%)	Target	2	20				
	Realisasi	2					
Baramundi 01 (Speed Boat PRL 8 m)	Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)	Pemeriksaan Kapal Perikanan (50%)	Target	60	50	40	
			Realisasi	62			
		Pemeriksaan Kelautan (50%)	Target	7	50		
			Realisasi	7			
	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)	-	Target	0,000033	40	40	
			Realisasi	0,000033			

Kapal Pengawas	Variabel Pembentuk	Indikator	Target / Realisasi	Nilai	Nilai Indikator	Nilai Variabel Pembentuk	Nilai Indeks
	Tindak Lanjut Target Operasi (15%)	Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)	Target	2	60	15	
			Realisasi	2			
		Dukungan Kegiatan SAR (40%)	Target	0	40		
			Realisasi	0			
	Dukungan Operasi Lainnya (5%)	Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (40%)	Target	2	40	5	
			Realisasi	2			
		Pemutusan Rumpon Illegal (40%)	Target	0	40		
			Realisasi	0			
Dukungan Operasi Bersama (20%)		Target	2	20			
		Realisasi	1				
Nilai Indeks Kinerja Speed Boat Pengawas							98,80

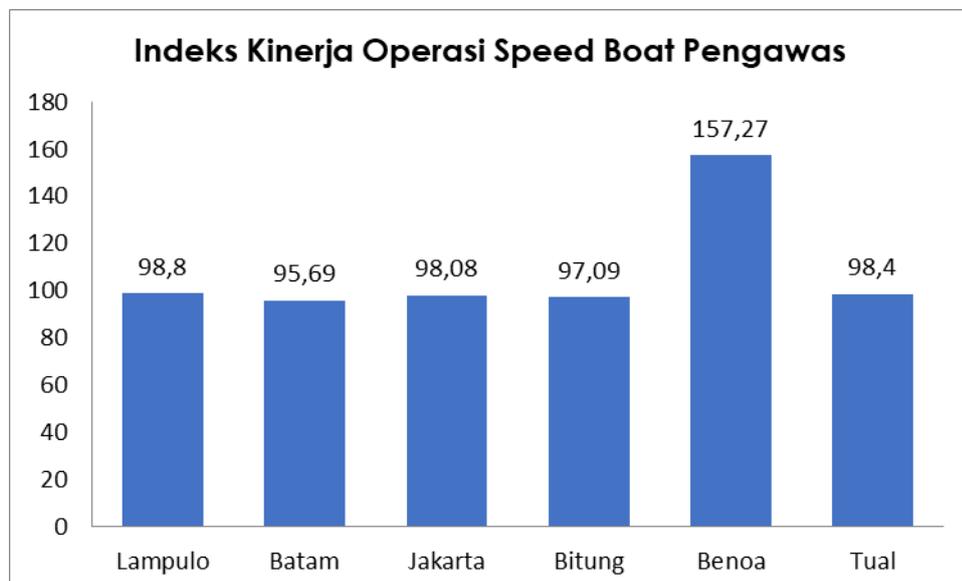
IK 3: “Indeks Kinerja Operasi Speed Boat Pengawas”, merupakan indikator baru yang digunakan mulai tahun 2022, nomenklatur indikator tersebut berbeda dengan indikator pada RPJMN sehingga tidak dapat dibandingkan targetnya.

IK 3: “Indeks Kinerja Operasi Speed Boat Pengawas” pada tahun 2024, dibandingkan dengan realisasi dari tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Indeks Kinerja Operasional Speed Boat Pengawas			
Perbandingan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	85	87,6	91
Capaian	99,58	94,88	98,80
% Realisasi	117,15%	108,31%	108,57%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa target IK 3: “Indeks Kinerja Operasi Speed Boat Pengawas” mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dan tetap memenuhi target tahun 2024.

IK 3: “Indeks Kinerja Operasi Speed Boat Pengawas”, pada tahun 2024, dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa capaian dari 6 (enam) UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP, nilai capaian yang tertinggi diperoleh Pangkalan PSDKP Bena, dan nilai capaian terendah diperoleh Pangkalan PSDKP Tual. Namun capaian dari ke-enam UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP semuanya telah memenuhi target nilai indeks 91.

Capaian IK 3 “Indeks Kinerja Operasi *Speed Boat* Pengawas” pada tahun 2024 mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada IKU tersebut, yaitu dengan memastikan kesiapan Armada *Speed Boat* Pengawas dalam hal ini body kapal dan mesin penggerak dan selanjutnya dengan merencanakan operasi kapal pengawas dengan memperhatikan faktor Cuaca dan kerawanan di bawah 4 (empat) mil pada 2 (dua) Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Selat Malaka (571) dan Samudera Hindia (572) yang merupakan wilayah kerja Pangkalan PSDKP Lampulo.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target, yaitu cuaca buruk dan kondisi body *Speed Boat* dan bagian mesin utama masih diperbaiki sehingga jadwal operasi *Speed Boat* pengawas harus direncanakan ulang.

Faktor penunjang yang dapat memaksimalkan pencapaian target, yaitu dengan melakukan perawatan rutin terhadap mesin utama *Speed Boat* pengawas serta mengupdate secara berkala mingguan terkait cuaca yang diterbitkan oleh BMKG serta menjalin koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dalam hal informasi Target operasi di masing masing WPP mulai dari 0 - 4 mil di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Lampulo.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 3 sebesar Rp 1.170.790.000,00. Sampai dengan tahun 2024, anggaran telah terserap sebesar Rp 1.170.788.200,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 100%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

IK 4: “Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas”

Persentase pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas untuk mendukung operasi pengawasan SDKP. Logistik yang dimaksud meliputi pemenuhan Logistik Kapal dan pemenuhan Logistik Personel

Logistik kapal terdiri dari:

- a. Bahan Bakar Minyak (BBM) , dan
- b. Pelumas

Logistik Personel terdiri dari :

- a. Bahan Makanan
- b. Air Tawar, dan
- c. Alat-alat Pelayanan (ATK, Bahan Komputer, Komaliwan, Peta dan atau Buku Jurnal Deck & Mesin)

Dalam hal terjadi kerusakan kapal yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan operasi pengawasan maka, target dianggap tercapai (100%). Daftar Faktor Penghitung Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP

1. Bahan Bakar Minyak (BBM) (30%);
2. Pelumas (20%);
3. Bahan Makanan (30%);
4. Air Tawar (15%);
5. Alat-alat Pelayanan (5%)

Kriteria penilaian Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP, sebagai berikut:

1. Bahan Bakar Minyak (BBM) (30%);

Pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak untuk kebutuhan Operasi Pengawasan SDKP (triwulan). Perhitungan: $(4/4) \times 30\%$.

2. Pelumas (20%);

Pemenuhan kebutuhan Pelumas untuk kebutuhan permesin Kapal Pengawas dalam menunjang pengawasan SDKP (semester). Perhitungan: $(2/2) \times 20\%$.

3. Bahan Makanan (30%);

Pemenuhan kebutuhan bahan makanan bagi awak kapal Pengawas (bulanan). Perhitungan: $(12/12) \times 30\%$;

4. Air Tawar (15%);

Pemenuhan kebutuhan air tawar untuk keperluan sehari - hari AKP di atas kapal (bulanan). Perhitungan : $(12/12) \times 15\%$.

5. Alat – Alat Pelayanan (5%)

Pemenuhan kebutuhan alat – alat pelayanan guna menunjang kegiatan operasional kapal (semester). Perhitungan: $(2/2) \times 5\%$.

Hasil pengukuran IK 4: “Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP” disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.9. Hasil Capaian IK 4: “Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2024		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP	100	100	100%

Pada tahun 2024, Pangkalan PSDKP Lampulo menentukan target IK 4: “Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP” sebesar 100, telah tercapai nilai indeks sebesar 100, sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 100%. Adapun rincian indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, disajikan pada tabel berikut:

No	Faktor Perhitungan	Capaian Per Triwulan			
		I	II	III	IV
1.	Pemenuhan Kebutuhan BBM (30%)	100	100	100	100
2.	Pemenuhan Kebutuhan Bahan Makanan AKP (20%)	100	100	100	100
3.	Pemenuhan Kebutuhan Pelumas KP (25%)	100	100	100	100
4.	Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih KP (10%)	100	100	100	100
5.	Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan KP (5%)	100	100	100	100
6.	Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api (5%)	100	100	100	100
Total Nilai Indeks		100	100	100	100
Nilai Rata-rata		100			

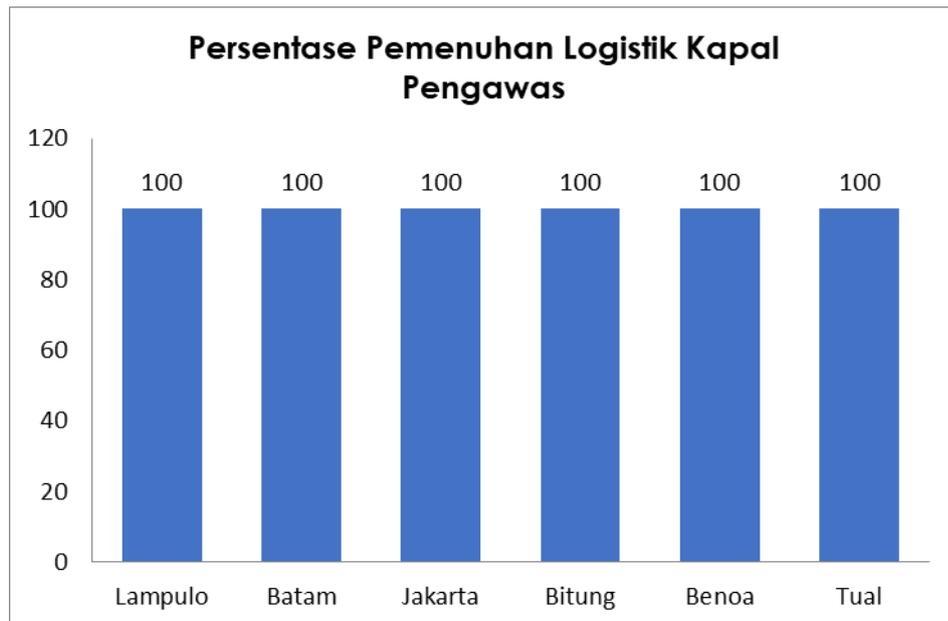
IK 4: “Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP”, merupakan indikator baru yang digunakan mulai tahun 2022, nomenklatur indikator tersebut berbeda dengan indikator pada RPJMN sehingga tidak dapat dibandingkan targetnya.

IK 4: “Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP”, pada tahun 2024, dibandingkan dengan realisasi dari tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP			
Perbandingan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	90	100	100
Capaian	90	100	100
% Realisasi	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa target IK 4: “Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP” dibandingkan dengan target dan realisasi pada tahun sebelumnya sama. Capaian pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sama dan tetap memenuhi target tahun 2024.

IK 4: “Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP”, pada tahun 2024, dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa capaian dari 6 (enam) UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP adalah sama.

Capaian IK 4: “Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP” mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada IKU tersebut, yaitu dengan memastikan ketersediaan anggaran untuk memenuhi belanja logistik di kapal pengawas dan meminta rencana pengajuan pemenuhan logistik kepada Nakhoda dan/atau awak kapal yang ditunjuk untuk mengurus bagian pemenuhan logistik di atas kapal Pengawas yang beroperasi di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Lampulo.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target, yaitu : terlambatnya ketersediaan anggaran dikarenakan Revolving tidak dapat dilaksanakan akibat belum diserahkannya SPJ periode bulan sebelumnya dari Kapal Pengawas dan Speed Boat Pengawas.

Faktor penunjang yang dapat memaksimalkan pencapaian target, yaitu dengan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan bagian keuangan dan awak kapal yang ditunjuk mengelola logistik kapal untuk memastikan ketersediaan anggaran untuk memenuhi belanja logistik di kapal pengawas yang beroperasi di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Lampulo.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 4 sebesar Rp 4.900.877.000,00. Sampai dengan tahun 2024, anggaran telah terserap sebesar RP 4.900.872.841,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 100%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

SK 3: Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan”, diidentifikasi ke dalam 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

IK 5: “Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Diselesaikan”

Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Diselesaikan adalah penilaian kemajuan fisik/konstruksi pengadaan terhadap prasarana pengawasan SDKP pendukung yang dibangun oleh Pangkalan PSDKP Lampulo sebanyak 2 (dua) unit. Capaian Indikator atau persentase penyelesaian dikeluarkan oleh Konsultan Pengawas berdasarkan prestasi kerja penyedia jasa. Prestasi kerja penyedia jasa sangat dipengaruhi oleh pihak luar, seperti pabrikan mesin, generator set, alat berat konstruksi (*backhoe, excavator, pile drive, concrete mixer truck*), material konstruksi, dan peralatan lainnya yang bersifat impor (tidak ada hasil produk Indonesia). Sarana pengawasan yang diadakan harus memenuhi peraturan konvensi dan nasional.

Hasil pengukuran capaian IK 5: “Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Diselesaikan” pada tahun 2024, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7. Hasil Capaian IK 5: “Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Diselesaikan”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2024		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Diselesaikan	100%	100%	100%

Pada tahun 2024, Pangkalan PSDKP Lampulo menentukan target terhadap IK 5: “Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Diselesaikan” sebesar 100%, telah tercapai 100%, maka diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 100%. Adapun rincian sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada tahun 2024, disajikan pada tabel berikut:

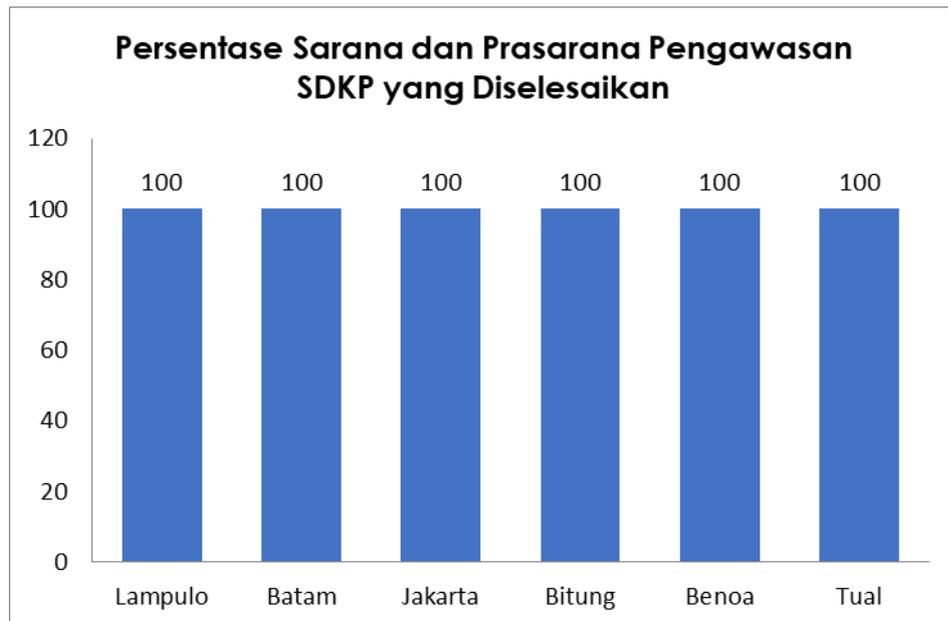
No.	Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Diselesaikan	Dokumen Data Dukung	Bentuk Fisik	Persentase Penyelesaian
-----	--	---------------------	--------------	-------------------------

1.	Pembangunan Gudang Pangkalan PSDKP Lampulo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Perencanaan Teknis; 2. Dokumen Pemeriksaan Hasil Pekerjaan; 3. Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan; 4. Laporan Konsultan Pengawas; dan 5. Dokumen Pembayaran 		100%
2.	Pembangunan Konstruksi Kantor Satwas SDKP Padang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Perencanaan Teknis; 2. Dokumen Pemeriksaan Hasil Pekerjaan; 3. Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan; 4. Laporan Konsultan Pengawas; dan 5. Dokumen Pembayaran 		100%

Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada tahun 2024 dilakukan terhadap 2 (dua) bangunan, yaitu Pembangunan Gudang Pangkalan PSDKP Lampulo dan Pembangunan Konstruksi Kantor Satwas SDKP Padang. Kedua bangunan tersebut telah dapat diselesaikan target pembangunannya, sehingga diperoleh persentase realisasi sebesar 100%.

IK 5: “Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Diselesaikan”, merupakan indikator baru yang digunakan Pangkalan PSDKP Lampulo pada tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan targetnya dengan RPJMN dan capaian dengan tahun-tahun sebelumnya.

Capaian IK 5: “Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Diselesaikan”, pada tahun 2024, dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa capaian dari 6 (enam) UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP adalah sama.

Capaian IK 5: “Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Diselesaikan” mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada IKU tersebut, yaitu dengan memastikan ketersediaan anggaran untuk memenuhi perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana SDKP dan meminta review ke UKPBJ KKP agar segera diproses melalui LPSE serta menjamin Calon penyedia dan/atau penyedia pelaksana benar benar melaksanakan pekerjaan pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan Time Schedule yang telah disepakati sehingga mendapatkan mutu yang baik.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target, yaitu : terlambatnya proses persetujuan penghapusan bangunan Lama dari KPKNL setempat sehingga mulai pekerjaan pembangunan fisik menjadi bergeser beberapa minggu dari shedule yang telah disusun.

Faktor penunjang yang dapat memaksimalkan pencapaian target yaitu dengan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan instansi terkait dalam hal ini PUPR untuk mendukung tercapainya perencanaan dan berkoordinasi dengan KPKNL setempat untuk mempercepat proses penghapusan bangunan Lama sebelum dilakukan pembangunan sarana dan prasarana SDKP yang baru dan sering melakukan rapat dan diskusi dengan calon penyedia dan/atau penyedia pelaksana agar dalam melaksanakan pekerjaan

pembangunan sarana dan prasarana dapat sesuai dengan Time Schedule yang telah disepakati sehingga mendapatkan mutu yang baik.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 5 sebesar Rp 630.966.000,00 Sampai dengan tahun 2024, anggaran telah terserap sebesar Rp. 630.908.300,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 100%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

IK 6: “Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP”

Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah jumlah persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Sarana Pengawasan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, meliputi: 1 (satu) unit Kapal Pengawas Perikanan dan 6 (lima) unit (*Speedboat dan Rigid Inflatable Boat*). Perawatan Sarana Pengawasan SDKP terdiri dari : perawatan pencegahan (*preventive maintenance 50%*), perawatan prediktif (*predictive maintenance 40%*), dan perawatan darurat (*breakdown maintenance 10%*).

Hasil pengukuran capaian IK 6: “Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP” pada tahun 2024, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7. Hasil Capaian IK 6: “Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2024		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP	100%	100%	100%

Pada tahun 2024, Pangkalan PSDKP Lampulo menentukan target terhadap IK 6: “Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP” sebesar 100%, telah tercapai 100%, maka persentase realisasi capaian diperoleh sebesar 100%.

Capaian IK 6: “Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP” tahun 2024, dibandingkan dengan target RPJMN, disajikan pada tabel berikut:

Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP							
Perbandingan	TARGET RPJMN					TARGET 2024	REALISASI 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Target	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa IKU Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP mulai digunakan pada tahun 2021. Target yang

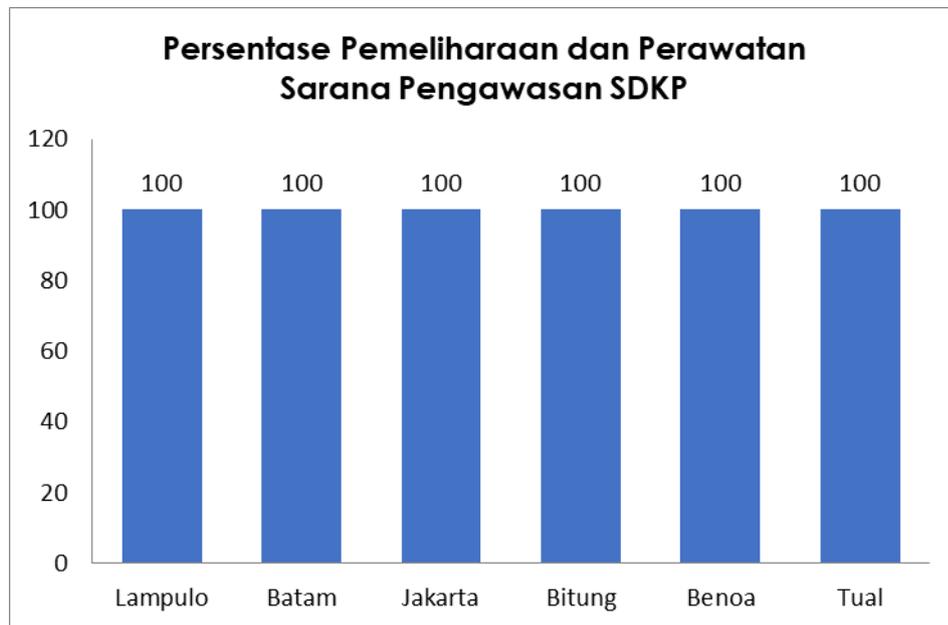
ditentukan dari tahun ke tahun sama, yaitu 100%. Realisasi capaian dari tahun ke tahun telah tercapai sesuai dengan target yang ditentukan, yaitu 100%.

Capaian IK 6: “Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP” tahun 2024, dibandingkan dengan target dan realisasi dari tahun-tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP					
Perbandingan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	-	100%	100%	100%	100%
Capaian	-	100%	100%	100%	100%
% Realisasi	-	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan table di atas, dapat diketahui bahwa target IKU “Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP” dari tahun ke tahun adalah sama, yaitu 100%. Capaian Pangkalan PSDKP Lampulo telah memenuhi target, yaitu 100%.

Capaian IK 6: “Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP” pada tahun 2024, dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa capaian dari 6 (enam) UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP adalah sama.

Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, berjumlah 6 (enam) unit, yang terdiri dari: 1 (satu) unit Kapal Pengawas, 4 (empat) unit *Speed Boat* Pengawas, dan 1 (satu) unit *Rigid Inflatable Boat* Pengawas.

Adapun bukti pendukung peawatan sarana dan prasarana pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada tahun 2024 dibuktikan dengan adanya Laporan Perawatan Preventif, Laporan Perawatan Prediktif, dan Laporan Perawatan Darurat, serta dibuktikan dengan Laporan Kondisi Teknis Kapal Pengawas dan *Speed Boat* Pengawas pada bulan Januari sampai dengan Desember 2023. Kapal Pengawas di bawah Pangkalan PSDKP Lampulo adalah Kapal Pengawas Hiu-12 yang berukuran 32 m. Bentuk fisik Kapal Pengawas Hiu-12 disajikan pada gambar berikut:



Gambar 3.1. Kapal Pengawas Hiu-12

Jumlah *speed boat* pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo sebanyak 6 (enam) unit, yaitu Kapal Pengawas Napoleon-045, Baramundi 01, dan Sea Rider yang dioperasikan oleh Pangkalan PSDKP Lampulo, Kapal Pengawas Napoleon-036 yang dioperasikan oleh Satwas SDKP Sibolga, Kapal Pengawas Kakap yang dioperasikan oleh Satwas SDKP Padang, dan Kapal Pengawas Dolphin ST. BL. 01 yang dioperasikan oleh Satwas SDKP Bengkulu. Adapun bentuk fisik dari *speed boat* pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, disajikan pada tabel bergambar berikut:

Tabel 3.10. *Speed Boat* Pengawas yang Siap Operasi Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo

No.	Nama <i>Speed Boat</i> Pengawas	Gambar	Lokasi
1.	Napoleon-045		Pangkalan PSDKP Lampulo

No.	Nama <i>Speed Boat</i> Pengawas	Gambar	Lokasi
2.	Napoleon-036		Satwas SDKP SDKP Sibolga
3.	Kakap		Satwas SDKP Padang
4.	Dolphin ST. BL. 01		Satwas SDKP Bengkulu
5.	Sea Rider		Pangkalan PSDKP Lampulo
6.	Baramundi 01		Pangkalan PSDKP Lampulo

Capaian IK 6: “Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP” pada tahun 2024 mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada IKU tersebut, yaitu dengan melakukan identifikasi dan memverifikasi pengajuan Awak kapal//speed boat pengawasan terkait pemenuhan suku cadang dan perlengkapan dalam rangka pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang efektif dan efisien.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target, yaitu : ketersediaan suku cadang yang didominasi oleh produk Impor sehingga mesti menunggu pengiriman yang waktunya lebih lama daripada suku cadang yang terdapat di wilayah kerja Lampulo khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Faktor penunjang yang dapat memaksimalkan pencapaian target yaitu dengan berkoordinasi dengan Awak Kapal pengawasan untuk menyinkronkan pengajuan dan pendataan ulang persediaan Suku cadang dan perlengkapan yang sudah habis terpakai dan/atau yang masih tersedia di atas kapal/speed boat pengawasan sehingga Pemeliharaan dan Perawatan sarana pengawasan SDKP.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 6 sebesar Rp 2.898.291.000,00. Sampai dengan tahun 2024, anggaran telah terserap sebesar Rp. 2.898.253.018,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 100%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

SK4: Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha Kelautan dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan”, diidentifikasi ke dalam 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

IK 7: “Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan”

Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha bidang kelautan adalah upaya pengawasan usaha kelautan oleh Polsus PWP3K dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha kelautan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan

Pemeriksaan pelaku usaha kelautan meliputi pelaku usaha pemanfaatan ruang laut (yang memiliki KKPR), pelaku usaha yang tidak menimbulkan pencemaran, pelaku

usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi, pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi, pelaku usaha jasa kelautan (antara lain: ekstrasi garam, wisata tirta, alse), pelaku usaha pemanfaatan pesisir (reklamasi) dan pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil, pelaku usaha yang memiliki kapal di bawah 10 GT yang tidak terindikasi melakukan DF (tidak membawa bom, bius, setrum, serta ikan hasil DF).

Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan merupakan penjumlahan dari nilai penyelesaian tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan.

Penentuan nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan mengacu pada tabel berikut ini:

Tabel 3.10. Rincian Penentuan Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan/atau Pemanfaat Sumber Daya Kelautan

No.	Kegiatan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha, Daftar Pertanyaan
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDK	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

Capaian IK 7: “Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.11. Hasil Capaian IK 7: “Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2024		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan	100	100	100%

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa target nilai kualitas penyelesaian pemeriksian pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan pada tahun 2024 sebesar 100, telah tercapai sebesar 100, maka persentase realisasi capaian pada IK 7 sebesar 100%.

IK 7: “Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan”, merupakan indikator baru di tahun 2023, sehingga tidak dapat dibandingkan targetnya dengan target RPJMN. Pada tahun 2021-2022 IKU pemeriksaan pelaku usaha kelautan menggunakan nomenklatur “Persentase penyelesaian” dengan

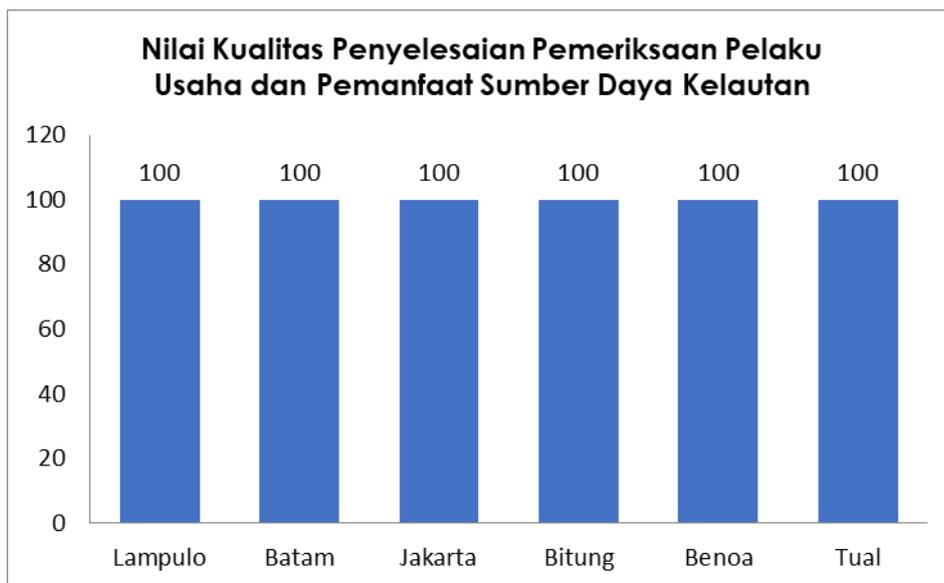
satuan persentase (%), sedangkan pada tahun 2023-2024 pengukuran IKU pemeriksaan pelaku usaha kelautan menggunakan nomenklatur “Nilai kualitas penyelesaian” dengan satuan nilai indeks (nilai).

IK 7: “Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan”, dibandingkan target dan realisasi dari tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan		
Perbandingan	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	100	100
Capaian	100	100
% Realisasi	100%	100%

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa target IK 7: “Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan” pada tahun 2023 dan tahun 2024 adalah sama, yaitu 100. Realisasi pada tahun 2023 dan 2024 diperoleh nilai indeks sebesar 100, sehingga persentase realisasi capaian IKU selama 2 (dua) tahun berturut-turut tercapai 100%.

Capaian IK 7: “Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan” dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa capaian dari 6 (enam) UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP adalah sama.

Adapun rincian kegiatan penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.10. Rincian Kegiatan Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo

No.	Bulan	OBJEK PENGAWASAN						Pencemaran
		Kawasan Konservasi Perairan	Ruang Laut	Jenis Ikan Dilindungi	Jasa Kelautan	Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	<i>Destructive Fishing</i>	
1	Januari	1 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha				2 Pelaku Usaha	
2	Februari	1 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha		15 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha
3	Maret	1 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha
4	April	1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha					1 Pelaku Usaha
5	Mei	1 Pelaku Usaha	21 Pelaku Usaha			1 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha
6	Juni	2 Pelaku Usaha	7 Pelaku Usaha		1 Pelaku Usaha			6 Pelaku Usaha
7	Juli		1 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha		12 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha
8	Agustus	1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha					
9	September		4 Pelaku Usaha				5 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha
10	Oktober	1 Pelaku Usaha						11 Pelaku Usaha
11	November							
12	Desember	1 Pelaku Usaha						1 Pelaku Usaha
TOTAL		10 Pelaku Usaha	45 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	14 Pelaku Usaha	34 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui rincian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan lingkup Pangkalan PSDKP, yang terdiri dari: 10 Pelaku Usaha Kawasan Konservasi Perairan, 45 Pelaku Usaha Ruang Laut, 4 Pelaku Usaha Jenis Ikan Dilindungi, 4 Pelaku Usaha Jasa Kelautan, 14 Pelaku Usaha Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, 34 Pelaku Usaha yang terhindar dari kegiatan *Destructive Fishing*, dan 30 Pelaku Usaha yang Diperiksa dari kegiatan Pencemaran.

Capaian IK 7: “Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan” mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada IKU tersebut, antara lain:

1. Pembagian target pengawasan pelaku usaha kepada UPT seluruh Satuan Pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo;
2. Dilakukan kontrol capaian secara rutin sehingga dapat mengejar target yang belum dipenuhi; dan
3. Komunikasi yang baik dengan seluruh pengawas perikanan dan petugas lainnya.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target, antara lain:

1. Masih ada Satwas yang belum memiliki personil Polsus PWP3K (Satwas SDKP Simeulue); dan
2. Beberapa Satwas juga masih belum memiliki sarana pengawasan SDK seperti *speed boat*, *drone*, Laptop dengan spesifikasi standar untuk pemetaan.

Faktor penunjang yang dapat memaksimalkan pencapaian target, antara lain:

1. Dukungan personel dari UPT terhadap Satwas yang masih perlu penambahan personel dalam giat pengawasannya; dan
2. Dilakukan supervisi dan pendampingan terhadap kegiatan pengawasan yang dijalankan.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 7 sebesar Rp 989.500.000,00. Sampai dengan tahun 2024, anggaran telah terserap sebesar Rp 989.479.674,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 100%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

SK 5.: Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan”, diidentifikasi ke dalam 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

IK 8: “Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan”

Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan merupakan indikator untuk mengukur kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo dalam tugas pengawasan sumber daya perikanan. Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan merupakan penjumlahan dari nilai penyelesaian tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan.

Penentuan nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan mengacu pada tabel berikut ini:

Tabel 3.12. Rincian Penentuan Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan/atau Pemanfaat Sumber Daya Perikanan

No.	Kegiatan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha, Daftar Pertanyaan
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDP	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

Capaian IK 8: “Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan”, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.13. Hasil Capaian IK 8: “Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2024		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan	100	100	100%

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa target nilai kualitas penyelesaian pemeriksian pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan pada tahun 2024 sebesar 100, telah tercapai sebesar 100, maka persentase realisasi capaian pada IK 8 sebesar 100%.

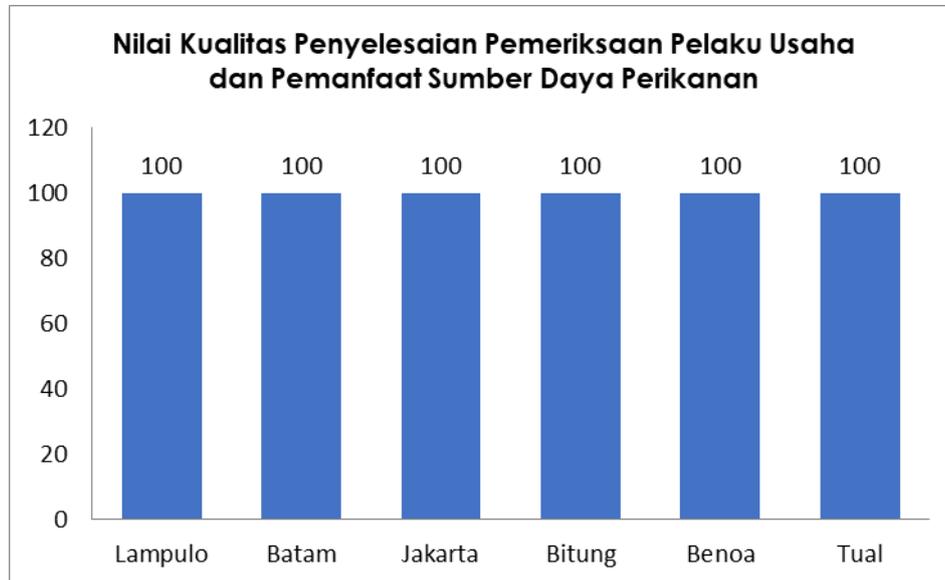
IK 8: “Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan” merupakan indikator baru di tahun 2023, sehingga tidak dapat dibandingkan targetnya dengan target RPJMN. Pada tahun 2021-2022 IKU pemeriksaan pelaku usaha perikanan menggunakan nomenklatur “Persentase penyelesaian” dengan satuan persentase (%), sedangkan pada tahun 2023-2024 pengukuran IKU pemeriksaan pelaku usaha perikanan menggunakan nomenklatur “Nilai kualitas penyelesaian” dengan satuan nilai indeks (nilai).

IK 8: “Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan”, dibandingkan target dan realisasi dari tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan		
Perbandingan	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	100	100
Capaian	100	100
% Realisasi	100%	100%

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa target IK 8: “Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan” pada tahun 2023 dan tahun 2024 adalah sama, yaitu 100. Realisasi pada tahun 2023 dan 2024 diperoleh nilai indeks sebesar 100, sehingga persentase realisasi capaian IKU selama 2 (dua) tahun berturut-turut tercapai 100%.

Capaian IK 8: “Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan” dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa capaian dari 6 (enam) UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP adalah sama.

Adapun rincian kegiatan penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.14. Rincian Kegiatan Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo

No	Objek Pengawasan	Jumlah Pelaku Usaha Diawasi
1.	Subsektor Penangkapan Ikan	42
2.	Subsektor Pengolahan Hasil Perikanan	16
3.	Subsektor Distribusi dan Pemasaran Hasil Perikanan	6
4.	Subsektor Pembudidayaan Ikan	67
Total		131

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa rincian capaian objek pengawasan sumber daya perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada tahun 2024 terdiri dari 131 pelaku usaha yang diawasi, dengan rincian 42 pelaku usaha subsektor penangkapan ikan, 16 pelaku usaha subsektor pengolahan hasil perikanan, 6 pelaku usaha subsektor distribusi dan pemasaran hasil perikanan, dan 67 pelaku usaha subsektor pembudidayaan ikan.

Capaian IK 8: “Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan” mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada IKU tersebut, antara lain:

1. Pembagian target pengawasan pelaku usaha kepada UPT seluruh Satuan Pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo.
2. Dilakukan kontrol capaian secara rutin sehingga dapat mengejar target yang belum dipenuhi.
3. Komunikasi yang baik dengan seluruh pengawas perikanan dan petugas lainnya.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target, yaitu :

1. Menumpuknya jumlah objek pengawasan pelaku usaha berbasis resiko pada salah satu satwas sehingga pergerakan pencapaian target agak terlambat dengan jumlah personel Satwas yang terbatas .
2. Pembatasan jenis objek pengawasan yang akan dilaksanakan pada awal tahun 2024 sehingga memperlambat realisasi pengawasan dari rencana yang telah disusun.

Faktor penunjang yang dapat memaksimalkan pencapaian target, yaitu :

1. Dukungan personel dari UPT terhadap Satwas yang masih perlu penambahan personel dalam giat pengawasannya.
2. Dilakukan supervisi dan pendampingan terhadap kegiatan pengawasan yang dijalankan.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 8 sebesar Rp 1.498.222.000,00. Sampai dengan tahun 2024, anggaran telah terserap sebesar Rp 1.497.977.000,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 100%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

SK 6: Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas”, diidentifikasi ke dalam 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

IK 9: “Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan”

Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (KP) merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang, pada:

- a) Dit. PP (Pusat) untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-2 (SP2) /surat penetapan denda administratif/rekomendasi pencabutan/pembekuan izin;
- b) Dit. PP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut untuk pelanggaran skala besar/mendapat perhatian publik, berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.
- c) Dit.PP (Pusat) untuk penetapan denda administratif, atau rekomendasi pembekuan/pencabutan izin/ pemulihan fungsi ruang dari Dirjen PSDKP.
- d) UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah;
- e) UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.

Capaian IK 9: “Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan”, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.15. Hasil Capaian IK 9: “Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2024		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan	80	80	100%

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa target indeks pengenaan sanksi administratif pada tahun 2024 sebesar 80, telah tercapai nilai indeks sebesar 80, maka persentase realisasi capaian pada IK 9 sebesar 100%.

IK 9: “Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan”, merupakan indikator baru di tahun 2023, sehingga tidak dapat dibandingkan targetnya dengan target RPJMN.

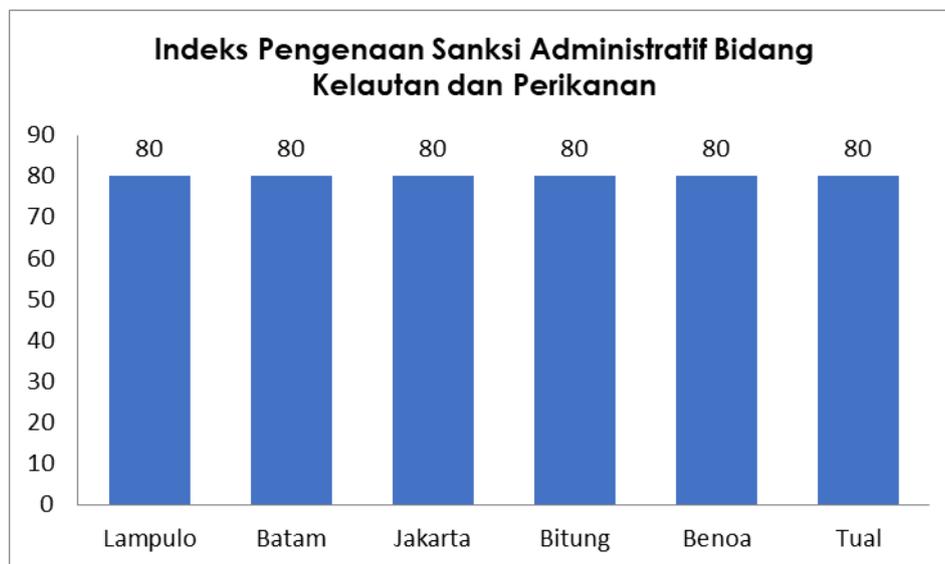
Target dan capaian IK 9: “Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan” dibandingkan dengan tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan
--

Perbandingan	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	80	80
Capaian	100	80
% Realisasi	120%	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa target nilai indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan pada tahun 2023 dan tahun 2024 sama, yaitu 80. Namun, terdapat perbedaan capaian tahun 2023 sebesar 100 dan tahun 2024 sebesar 80. Terjadi penurunan capaian, dikarenakan adanya penyesuaian perhitungan nilai indeks. Capaian pada tahun 2023-2024 telah memenuhi target yang ditentukan.

Capaian IK 9: “Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan” dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa capaian dari 6 (enam) UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP adalah sama.

Rincian hasil pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo selama tahun 2024, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.16. Pemantauan atas Pelaksanaan Sanksi Administratif Sumber Daya Kelautan

No	Nama Perusahaan	Kode KBLI	Jenis Pelanggaran	Jenis Sanksi	Tanggal Pengenaan Sanksi	Tanggal Berakhir Sanksi	Kewajiban Pemenuhan Sanksi	Rekomendasi
1.	PT FIVE STAR MENTAWAI / ALBERSON FIDEL XASTRO	91039	TIDAK MEMILIKI PKKPR	SP 1	19 Agustus 2024	19 September 2024	POSES PENGURUSAN PKKPR	PENGURUSAN PKKPR
2.	PT WANDA HADI MAKMUR /	91039	TIDAK MEMILIKI PKKPR	SP 1	19 Agustus 2024	19 September 2024	POSES PENGURUSAN PKKPR	PENGURUSAN PKKPR

No	Nama Perusahaan	Kode KBLI	Jenis Pelanggaran	Jenis Sanksi	Tanggal Pengenaan Sanksi	Tanggal Berakhir Sanksi	Kewajiban Pemenuhan Sanksi	Rekomendasi
	HADI SULFAHMI							
3.	PT USAHA ANAK NAGARI / ALBERSON FIDEL XASTRO	91039	TIDAK MEMILIKI PKKPR	SP 1	19 Agustus 2024	19 September 2024	POSES PENGURUSAN PKKPR	PENGURUSAN PKKPR
4.	PT HIDDEN BAY RESSORT MENTAWAI / TIKA APRILIASYA	91039	TIDAK MEMILIKI PKKPR	SP 1	19 Agustus 2024	19 September 2024	POSES PENGURUSAN PKKPR	PENGURUSAN PKKPR
5.	PT PLN NUSANTARA POWER UP NAGAN RAYA / TRI WAHYUDI	91039	TIDAK MEMILIKI PKKPR	SP 1	22 Agustus 2024	22 September 2024	POSES PENGURUSAN PKKPR	PENGURUSAN PKKPR
6.	PT LABUAN SUNDAI MANDEH / PANGERAN ALIF EL GIBRAN	91039	TIDAK MEMILIKI PKKPR	1. SP 1	1. 29 Agustus 2024	1. 29 September 2024	POSES PENGURUSAN PKKPR	PENGURUSAN PKKPR
				2. PAKSAAN PEMERINTAH	2. 29 Agustus 2024	2. Proses Pengurusan PKKPR		
7.	PT TITAN WIJAYA	91039	TIDAK MEMILIKI PKKPR	1. PENYEGELAN	1. 17 Oktober 2024	1. Proses Pengurusan PKKPR	POSES PENGURUSAN PKKPR	PENGURUSAN PKKPR
				2. DENDA ADMINISTRATIF	2. 5 November 2024	2. Denda Administratif RP 227.668.664,00		
8.	PT BENGKULU SAMUDERA TEHNIK / FLORIANUS JEHEMAN	91039	TIDAK MEMILIKI PKKPR	SP 1	6 November 2024	6 Desember 2024	POSES PENGURUSAN PKKPR	PENGURUSAN PKKPR
9.	PT MEULABOH POWER GENERATION	91039	TIDAK MEMILIKI PKKPR	SP 1	6 November 2024	6 Desember 2024	POSES PENGURUSAN PKKPR	PENGURUSAN PKKPR

Tabel 3.17. Pemantauan atas Pelaksanaan Sanksi Administratif Sumber Daya Perikanan

No	Nama Perusahaan	Kode KBLI	Jenis Pelanggaran	Jenis Sanksi	Tanggal Pengenaan Sanksi	Tanggal Berakhir Sanksi	Kewajiban Pemenuhan Sanksi	Rekomendasi
1.	KM. SWARNA SEJATI	03111	Tidak Memenuhi Perizinan Berusaha Penangkapan Ikan	1. SP 1	1. 25 Januari 2024	1. 25 Januari 2024	1. Sudah	SEGERA MELAKUKAN PENGURUSAN PERIZINAN BERUSAHA DAN SELALU MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU
				2. Paksaan Pemerintah	2. 25 Januari 2024	2. Pengurusan Perizinan	2. Pegurusan Perizinan Berusaha Penangkapan Ikan	
				3. Denda Administratif	3. 29 Januari 2024	3. Proses Pembayaran	3. Denda Administratif Kode Billing Nomor: 82024121866803 7 tanggal 18 Desember 2024 Rp 1.067.996.160,-	
2.	KM. SUBUR	03111	Jalur Penangkapan Ikan	SP 1	25 Maret 2024	25 Maret 2024	Sudah	MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU
3.	KM. SATU DUA TIGA	03111	Jalur Penangkapan Ikan	SP 1	25 Maret 2024	25 Maret 2024	Sudah	MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN SESUAI PERATURAN

No	Nama Perusahaan	Kode KBLI	Jenis Pelanggaran	Jenis Sanksi	Tanggal Pengenaan Sanksi	Tanggal Berakhir Sanksi	Kewajiban Pemenuhan Sanksi	Rekomendasi
								YANG BERLAKU
4.	KM. SULTAN POERKASA	03111	Tidak Memenuhi Perizinan Berusaha Penangkapan Ikan	1. Paksaan Pemerintah	1. 5 April 2024	1. Pengurusan Perizinan	1. Pengurusan Perizinan	SEGERA MELAKUKAN PENGURUSAN PERIZINAN BERUSAHA DAN SELALU MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU
				2. Denda Administratif	2. 5 April 2024	2. 7 April 2024	2. Denda Administratif Rp 97.500.000,00	
5.	KM. BUNGONG PADEE	03111	Tidak Memenuhi Perizinan Berusaha Penangkapan Ikan	1. SP 1	1. 29 April 2024	1. 29 April 2024	1. Sudah	SEGERA MELAKUKAN PENGURUSAN PERIZINAN BERUSAHA DAN SELALU MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU
				2. Paksaan Pemerintah	2. 29 April 2024	2. Pengurusan Perizinan	2. Pengurusan Perizinan	
6.	KM. REZEKI FAJAR	03111	Tidak Memenuhi Perizinan Berusaha Penangkapan Ikan	1. SP 1	1. 29 April 2024	1. 29 April 2024	1. Sudah	SEGERA MELAKUKAN PENGURUSAN PERIZINAN BERUSAHA DAN SELALU MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU
				2. Paksaan Pemerintah	2. 29 April 2024	2. Pengurusan Perizinan	2. Pengurusan Perizinan	
7.	KM. PUTRA INDAH BAROE	03111	Jalur Penangkapan Ikan	SP 1	30 April 2024	30 April 2024	Sudah	MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU
8.	KM. HADIAH	03111	Jalur Penangkapan Ikan	SP 1	30 April 2024	30 April 2024	Sudah	MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU
9.	GILANG ASMO	47215	Pengeluaran Lobster	SP 1	28 Juni 2024	28 Juni 2024	Sudah	MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU
10.	ROSA FITRIA	47215	Pengeluaran Lobster	SP 1	28 Juni 2024	28 Juni 2024	Sudah	SEGERA MELAKUKAN PENGURUSAN PERIZINAN DAN MELAKUKAN PENGELUARAN LOBSTER SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU
11.	KM. JIMMY	03111	Tidak Memiliki Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	1. Denda Administratif	1. 8 Oktober 2024	1. 8 Oktober 2024	1. Denda Administratif Rp. 4.000.000	MELAKUKAN PENGURUSAN PERSETUJUAN PENGADAAN KAPAL PERIKANAN (PPKP)
12.	HIKMAH FAJAR	03111	Jalur Penangkapan Ikan	1. SP 1	1. 20 Desember 2024	1. 20 Desember 2024	1. sudah	MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU
13.	BAGHDAD 08	03111	Jalur Penangkapan Ikan	1. SP 1	1. 20 Desember 2024	1. 20 Desember 2024	1. sudah	MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU
14.	AL BARAKAH	03111	Jalur Penangkapan Ikan	1. SP 1	1. 20 Desember 2024	1. 20 Desember 2024	1. sudah	MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU
15.	NAURA JAYA	03111	Tidak	1. SP 1	1. 31 Desember 2024	1. 31 Desember 2024	1. sudah	MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN SESUAI PERATURAN

No	Nama Perusahaan	Kode KBLI	Jenis Pelanggaran	Jenis Sanksi	Tanggal Pengenaan Sanksi	Tanggal Berakhir Sanksi	Kewajiban Pemenuhan Sanksi	Rekomendasi
			Memenuhi Perizinan Berusaha Penangkapan Ikan	2. paksaan pemerintah	2. 31 Desember 2024	2. 31 Desember 2024		YANG BERLAKU

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil tindak lanjut pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo selama tahun 2024 yang terdiri dari 9 (sembilan) pelaku usaha di bidang sumber daya kelautan dan 15 (lima belas) pelaku usaha di bidang sumber daya perikanan.

Capaian IK 9: “Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan” mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada IKU tersebut yaitu perlunya koordinasi yang baik dengan pusat dan instansi terkait. Selain itu, perlunya peningkatan kualitas SDM dalam memahami aturan perundang-undangan yang berlaku dalam penerapan sanksi administratif dan pengumpulan alat bukti pelanggaran yang dilakukan.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target, antara lain:

1. Banyaknya indikasi pelanggaran yang ada di di Satwas namun tidak sebanding dengan jumlah personel yang ada;
2. Sulitnya menerapkan sanksi kepada pelaku usaha yang menimbulkan efek jera sehingga tidak melakukan pelanggaran yang sama; dan
3. Kurang kooperatifnya pelaku usaha dalam penyelesaian pengenaan sanksi administratif kelautan dan perikanan.

Faktor penunjang yang dapat memaksimalkan pencapaian target tersebut yaitu, dengan memberikan dukungan personel dari UPT terhadap Satwas yang masih perlu penambahan personel pada saat proses penerapan sanksi administratif. Dilakukan supervisi dan pendampingan dari UPT dan Pusat terhadap penerapan sanksi administratif yang akan diberikan.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 9 sebesar Rp 630.700.000,00. Sampai dengan tahun 2024, anggaran telah terserap sebesar Rp 630.587.910,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 100%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

IK 10: “Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”

Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan kapal terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pemeriksaan dilaksanakan oleh: a). Kepala UPT PSDKP dimana pelaku usaha berdomisili; b). Kepala UPT PSDKP dimana kegiatan berusaha dilaksanakan atau dimana Kapal perikanan berpangkalan; atau; c). Ditjen PSDKP Pusat (Dit PP) dalam hal pemeriksaan tidak memungkinkan dilaksanakan oleh Kepala UPT PSDKP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, atau apabila pelanggaran melibatkan pelaku usaha skala besar/ menjadi perhatian publik.

Capaian IK 10: “Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.17. Hasil Capaian IK 10: “Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2024		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	80	80	100%

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa target indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan pada 2024 sebesar 80, telah tercapai nilai indeks sebesar 80, maka persentase realisasi capaian pada IK 10 sebesar 100%

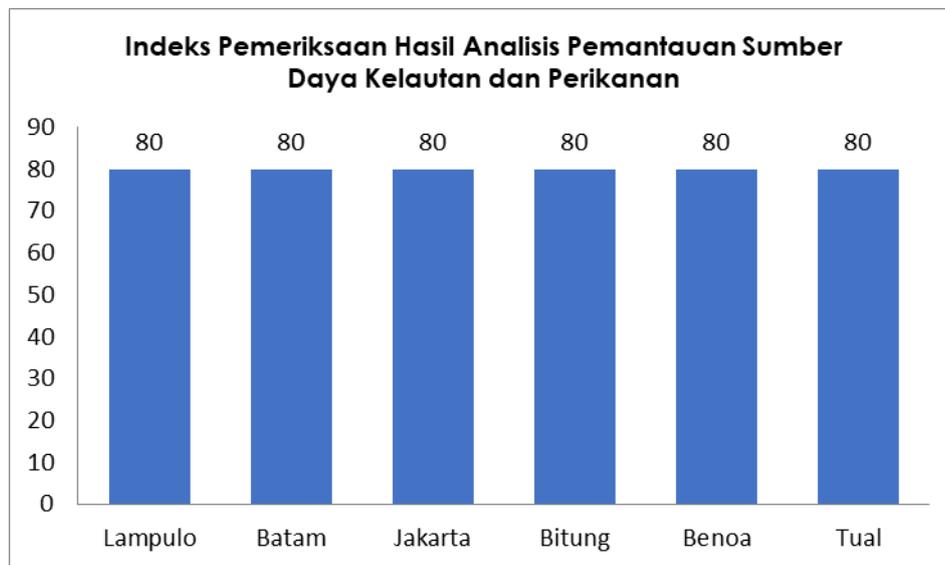
IK 10: “Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” merupakan indikator baru di tahun 2023, sehingga tidak dapat dibandingkan targetnya dengan target RPJMN.

Target dan capaian IK 10: “Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” dibandingkan dengan tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		
Perbandingan	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	80	80
Capaian	66,67	80
% Realisasi	83,34%	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa target nilai indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan pada tahun 2023 dan tahun 2024 sama, yaitu 80. Capaian pada tahun 2023 sebesar 66,67 dan capaian pada tahun 2024 sebesar 80. Pada tahun 2024, terjadi peningkatan capaian dari tahun sebelumnya dan telah memenuhi target tahun 2024.

Capaian IK 10: “Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa capaian dari 6 (enam) UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP adalah sama.

Rincian pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo selama tahun 2024, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.18. Pemantauan atas Pelaksanaan Sanksi Administratif Sistem Pemantauan Kapal Perikanan

No	Nama Kapal	Pemilik	Kode KBLI	Jenis Pelanggaran	Jenis Sanksi	Tanggal Pengenaan Sanksi	Tanggal Berakhir Sanksi	Kewajiban Pemenuhan Sanksi	Rekomendasi
1	SINAR LAUT	PT. ANUGERAH SAMUDERA HINDIA	03111	DPI	SP 1	23 Januari 2024	23 Januari 2024	Sudah	DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA
2	CAHAYA MUJUR - I	HERMAN	03111	Jalur Penangkapan	1. SP 2	25 Januari 2024	25 Januari 2024	Sudah	DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA TERHADAP KAPAL TERSEBUT
3	SUMBER MUTIARA	H. RIZWAN EFFENDI	03111	Jalur Penangkapan	SP 2	25 Januari 2024	25 Januari 2024	Sudah	DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA
4	KAKAP MERAH BARU	MAWARDI	03111	;DPI	SP 2	25 Januari 2024	25 Januari 2024	Sudah	DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA
5	SERASI PUTRA	SEYANTO	03111	Jalur Penangkapan	1. SP 2	25 Januari 2024	25 Januari 2024	Sudah	DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA
6	INDRA MAJU	BONG KA	03111	DPI	1. SP 2	25 Januari 2024	25 Januari 2024	Sudah	DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA
7	SUMBER REZEKI - I	SUKALI	03111	Jalur Penangkapan	1. SP 2	1. 25 Januari 2024	1. 25 Januari 2024	1. Sudah	DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA
8	KARYA LESTARI	ADIDAS KURNIAWAN	03111	Jalur Penangkapan	1. SP 2	25 Januari 2024	25 Januari 2024	Sudah	DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA
9	TERATAI - III	JUNEIDI	03111	Jalur Penangkapan	1. SP 2	25 Januari 2024	25 Januari 2024	Sudah	DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA
10	SINAR BAHARI UTAMA	HERMANTO	03111	DPI	SP 1	21 Februari 2024	21 Februari 2024	Sudah	DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA
11	CUCO DUO SABENA	JASMIN SIDABUTAR	03111	DPI	SP 1	5 Maret 2024	5 Maret 2024	Sudah	DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA
12	SENTOSA LESTARI - III	PANTAS MARUBA LUMBANTO BING	03111	Jalur Penangkapan	1. SP 1	1. 15 Maret 2024	1. 15 Maret 2024	Sudah	DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA
13	REZEKI SARI	PT. HARAPAN SARI LAUT	03111	Jalur Penangkapan	1. SP 2	1. 25 Maret 2024	1. 25 Maret 2024	1. Sudah	DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA
14	KARYA HARAPAN	PT. NELAYAN KAWAN KITA	03111	Jalur Penangkapan	1. SP 2	1. 25 Maret 2024	1. 25 Maret 2024	1. Sudah	DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA
15	HASIL NELAYAN	SUSANTO FRANS	03111	1. Jalur Penangkapan 2. Jalur Penangkapan	1. SP 1 2. SP 2	1. 23 Januari 2024 2. 25 Maret 2024	1. 23 Januari 2024 2. 25 Maret 2024	1. Sudah 2. Sudah	DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA
16	KARYA AGUNG SUKSES	HUSIN	03111	1. Jalur Penangkapan	1. SP 2	1. 16 April 2024	1. 16 April 2024	1. Sudah	DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA
17	KARYA YOUNGSUN	OEI SIU HONG	03111	1. Jalur Penangkapan 2. Jalur Penangkapan	1. SP 1 2. SP 2	1. 23 Januari 2024 2. 16 April 2024	1. 23 Januari 2024 2. 16 April 2024	1. Sudah 2. Sudah	DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA
18	BINTANG REZEKI	GHO OEI ENG	03111	1. Jalur Penangkapan	1. SP 2	1. 16 April 2024	1. 16 April 2024	1. Sudah	DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA
19	LUCKY STEP	HASAN	03111	1. DPI	1. SP 2	1. 16 April 2024	1. 16 April 2024	1. Sudah	DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA

No	Nama Kapal	Pemilik	Kode KBLI	Jenis Pelanggaran	Jenis Sanksi	Tanggal Pengenaan Sanksi	Tanggal Berakhir Sanksi	Kewajiban Pemenuhan Sanksi	Rekomendasi
20	PULAU BINTAN	MULIADI	03111	1. Jalur Penangkapan	1. SP 1	1. 2 Mei 2024	1. 2 Mei 2024	1. Sudah	DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA
21	INDRAGIRI	EFRAIM TJIA, SE	03111	Jalur Penangkapan	1. SP 1 2. SP 2	1. 5 Maret 2024 2. 17 Mei 2024	1. 5 Maret 2024 2. 17 Mei 2024	1. Sudah 2. Sudah	DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA
22	NDH - II	YAN LAM	03111	Jalur Penangkapan	1. SP 1	1. 29 Mei 2024	1. 29 Mei 2024	1. Sudah	DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA
23	SERASI BERSAMA	PT. HARAPAN SARI LAUT	03111	Pelabuhan Pangkalan	1. SP 1	1. 29 Mei 2024	1. 29 Mei 2024	1. Sudah	DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA
24	ONASSIS	DJAJA	03111	Jalur Penangkapan	1. Denda Administratif	1. 10 Juni 2024	1. 12 Juni 2024	1. Denda Administratif Rp.. 20.540.000	MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU
25	KELUARGA BAHARI - LLB	H. RIZWAN EFFENDI	03111	Jalur Penangkapan	1. SP 2	1. 14 Juni 2024	1. 14 Juni 2024	1. Sudah	DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA
26	MUARA AGUNG	TJA LIE	03111	1. Jalur Penangkapan 2. Jalur Penangkapan	1. SP 1 2. SP 2	1. 13 Februari 2024 2. 2 Juli 2024	1. 13 Februari 2024 2. 2 Juli 2024	1. Sudah 2. Sudah	DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA
27	ALAM JAYA	BOY STEVEN	03111	Jalur Penangkapan	SP 2	2 Juli 2024	2 Juli 2024	Sudah	DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA
28	REZEKI HASIL KARYA	EDDY THIANDA	03111	Jalur Penangkapan	SP 2	2 Juli 2024	2 Juli 2024	Sudah	DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA
29	YAKIN V	ELLEN	03111	1. Jalur Penangkapan 2. Jalur Penangkapan	1. SP 1 2. SP 2	1. 2 Mei 2024 2. 2 Juli 2024	1. 2 Mei 2024 2. 2 Juli 2024	1. Sudah 2. Sudah	DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA
30	CITRA ABADI	TUTI MEGAWATI WIJAYA	03111	1. Jalur Penangkapan	1. SP 2	1. 2 Juli 2024	1. 2 Juli 2024	1. Sudah	DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA
31	MAS BANDAR - II	LIM BUN HE	03111	1. Jalur Penangkapan 2. Jalur Penangkapan	1. SP 1 2. SP 2	1. 13 Februari 2024 2. 8 Juli 2024	1. 13 Februari 2024 2. 8 Juli 2024	1. Sudah 2. Sudah	DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA
32	REZEKI INTI KARYA	GHO OEI ENG	03111	1. Jalur Penangkapan	1. SP 2	1. 8 Juli 2024	1. 8 Juli 2024	1. Sudah	DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA
33	ERA SAMUDERA	LIM ASIONG	03111	1. Jalur Penangkapan 2. Jalur Penangkapan	1. SP 1 2. SP 2	1. 5 Maret 2024 2. 9 Agustus 2024	1. 5 Maret 2024 2. 9 Agustus 2024	1. Sudah 2. Sudah	DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA
34	SUMBER JAYA	PT. HARAPAN SARI LAUT	03111	1. Jalur Penangkapan 2. Jalur Penangkapan	1. SP 1 2. SP 2	1. 2 Mei 2024 2. 9 Agustus 2024	1. 2 Mei 2024 2. 9 Agustus 2024	1. Sudah 2. Sudah	DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA
35	SURYA JAYA	JUNEIDI	03111	1. Jalur Penangkapan	1. SP 1	1. 15 Agustus 2024	1. 15 Agustus 2024	1. Sudah	DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA
36	SUBUR	RUDIANSYA H HUTAGALUNG	03111	1. Jalur Penangkapan	1. SP 2	1. 29 Agustus 2024	1. 29 Agustus 2024	1. Sudah	DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA
37	REZEKI BARU	SYARIFUDDI	03111	1. Jalur	1. SP 1	1. 29 Mei 2024	1. 29 Mei 2024	1. Sudah	DILAKUKAN

No	Nama Kapal	Pemilik	Kode KBLI	Jenis Pelanggaran	Jenis Sanksi	Tanggal Pengenaan Sanksi	Tanggal Berakhir Sanksi	Kewajiban Pemenuhan Sanksi	Rekomendasi
	-I	N LUBIS, SE		Penangkapan 2. Jalur Penangkapan	2. SP 2	2. 29 Agustus 2024	2. 29 Agustus 2024	2. Sudah	PEMANTAUAN SECARA BERKALA
38	SUKA MAJU	ERIC GORNES	03111	1. Jalur Penangkapan	1. SP 1	1. 24 September 2024	1. 24 September 2024	1. Sudah	DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA
39	EHHEM	RUDIANSYAH HUTAGALUNG	03111	1. Jalur Penangkapan	1. SP 1	1. 24 September 2024	1. 24 September 2024	1. Sudah	DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA
40	ABADI MAKMUR	HONG TJAI	03111	1. Jalur Penangkapan	1. SP 1	1. 29 Oktober 2024	1. 29 Oktober 2024	1. Sudah	DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA
41	JALA JAYA - II	ANUGERAH SAMUDERA HINDIA, PT	03111	1. Dpi	1. SP 1	1. 14 November 2024	1. 14 November 2024	1. Sudah	DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA
42	KARYA YOUNGSUN 99	OEI SIU HONG	03111	1. Jalur Penangkapan 2. Jalur Penangkapan	1. SP 1 2. SP 2	1. 29 Mei 2024 2. 18 November 2024	1. 29 Mei 2024 2. 18 November 2024	1. Sudah 2. Sudah	DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA
43	MALINDO JAYA	ROY HERMANTO	03111	1. Jalur Penangkapan 2. Jalur Penangkapan	1. SP 1 2. SP 2	1. 29 Mei 2024 2. 18 November 2024	1. 29 Mei 2024 2. 18 November 2024	1. Sudah 2. Sudah	DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA
44	REZEKI LAUT	EDDY THIANDA	03111	1. Jalur Penangkapan	1. SP 1	1. 18 November 2024	1. 18 November 2024	1. Sudah	DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA
45	CITRA BARU	GONAWAN	03111	1. Jalur Penangkapan	1. SP 1	1. 22 November 2024	1. 22 November 2024	1. Sudah	DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA
46	SATU DUA TIGA	RUDIANSYAH HUTAGALUNG	03111	1. Jalur Penangkapan	1. SP 1	1. 22 November 2024	1. 22 November 2024	1. Sudah	DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA
47	REZEKI BERSAMA	SAFRIWAN SINAGA	03111	1. Jalur Penangkapan	1. SP 1	1. 22 November 2024	1. 22 November 2024	1. Sudah	DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA
48	SUKSES III	HAFFISUDDIN BATUBARA	03111	1. Jalur Penangkapan	1. SP 1	1. 22 November 2024	1. 22 November 2024	1. Sudah	DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA
49	SAMUDERA ERA MAS ABADI VII	MUFTI SIREGAR	03111	1. Jalur Penangkapan	1. SP 1	1. 22 November 2024	1. 22 November 2024	1. Sudah	DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA
50	HASIL LAUT V	PANDAPOTAN TAMPUBOLON	03111	1. Jalur Penangkapan	1. SP 1	1. 22 November 2024	1. 22 November 2024	1. Sudah	DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA
51	TRI BUKIT	CHRISTINA HAKIM	03111	1. Jalur Penangkapan	1. SP 1	1. 22 November 2024	1. 22 November 2024	1. Sudah	DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA
52	SUBUR SETIA	BUDIMAN	03111	1. Jalur Penangkapan	1. SP 1	1. 22 November 2024	1. 22 November 2024	1. Sudah	DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA
53	KARYA YAKIN	YUSDI EDY	03111	1. Jalur Penangkapan	1. SP 2	1. 18 Desember 2024	1. 18 Desember 2024	1. Sudah	DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA
54	MAJU MAKMUR	EDY HARTANTO	03111	1. Jalur Penangkapan 2. Jalur Penangkapan	1. SP 1 2. SP 2	1. 29 Oktober 2024 2. 18 Desember 2024	1. 29 Oktober 2024 2. 18 Desember 2024	1. Sudah 2. Sudah	DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA

No	Nama Kapal	Pemilik	Kode KBLI	Jenis Pelanggaran	Jenis Sanksi	Tanggal Pengenaan Sanksi	Tanggal Berakhir Sanksi	Kewajiban Pemenuhan Sanksi	Rekomendasi
55	SINAR HARAPAN BARU XII	HOTLAN MANURUNG	03111	1. Jalur Penangkapan	1. SP 1	1. 19 Desember 2024	1. 19 Desember 2024	1. Sudah	DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA
56	SINAR HARAPAN BARU XIV	SOKI HENDRI TARIHORAN	03111	1. Jalur Penangkapan	1. SP 1	1. 19 Desember 2024	1. 19 Desember 2024	1. Sudah	DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA
57	ANDY JAYA	JAMALUDDIN NAPITUPULUDRS	03111	1. Jalur Penangkapan	1. SP 1	1. 19 Desember 2024	1. 19 Desember 2024	1. Sudah	DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA
58	REZEKI MUTIARA	WAGIMAN	03111	1. Jalur Penangkapan	1. SP 1	1. 19 Desember 2024	1. 19 Desember 2024	1. Sudah	DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA
59	YAKIN MAJU	OEI GEK CHUANG	03111	1. Jalur Penangkapan	1. SP 1	1. 19 Desember 2024	1. 19 Desember 2024	1. Sudah	DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA
60	CAKALANG INDAH	CENDRA TAUFIK	03111	1. Penangkapan Ikan Di Negara Lain (Poaching)	1. SP 1	1. 19 Desember 2024	1. 19 Desember 2024	1. Sudah	DILAKUKAN PEMANTAUAN SECARA BERKALA

Pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dilakukan terhadap 60 (enam puluh) pelaku usaha. Capaian IK 10 selama tahun 2024 mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada IKU tersebut yaitu perlunya koordinasi yang baik dengan pusat dan instansi terkait. Selain itu, perlunya peningkatan kualitas SDM dalam memahami aturan perundang-undangan yang berlaku dalam penerapan sanksi administratif hasil analisis pemantauan dan pengumpulan alat bukti pelanggaran yang dilakukan.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target, antara lain:

1. Banyaknya indikasi pelanggaran yang ada di di Satwas namun tidak sebanding dengan jumlah personel yang ada;
2. Sulitnya menerapkan sanksi kepada pelaku usaha yang menimbulkan efek jera sehingga tidak melakukan pelanggaran yang sama;
3. Terdapat perbedaan topografi laut di WPPNRI 572 khususnya perairan pantai Barat Sumatera dimana terdapat banyak lomtom sehingga kondisi laut sangat dalam menyebabkan nelayan tidak dapat beroperasi di Jalur III; dan
4. Kurang kooperatifnya pelaku usaha dalam penyelesaian pengenaan sanksi administratif kelautan dan perikanan.

Faktor penunjang yang dapat memaksimalkan pencapaian target tersebut yaitu, dengan memberikan dukungan personel dari UPT terhadap Satwas yang masih perlu

penambahan personel pada saat proses penerapan sanksi administratif. Dilakukan supervisi dan pendampingan dari UPT dan Pusat terhadap penerapan sanksi administratif yang akan diberikan.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 10 sebesar Rp 294.408.000,00. Sampai dengan Triwulan III realisasi anggaran sebesar 100%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

SK 7: Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas”, diidentifikasi ke dalam 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

IK 11: “Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan”

Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (Penyerahan Tahap II). Hasil capaian IK 11: “Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan” lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.19. Hasil Capaian IK 11: “Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2024		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	93	100	107,53%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa target IK 11: “Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan” ditentukan dengan nilai indeks sebesar 93. Selama tahun 2024, perkembangan penyelesaian kasus TPKP di Pangkalan PSDKP Lampulo memperoleh nilai indeks sebesar 100, sehingga persentase realisasi capaian diperoleh sebesar 107,53%.

IK 11: “Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan” merupakan indikator baru di tahun 2023, sehingga tidak dapat dibandingkan targetnya dengan target RPJMN. Pada tahun 2020-2022, pengukuran IKU Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan menggunakan nomenklatur “Persentase efektivitas penyelesaian” dengan satuan persentase (%), sedangkan pada tahun 2023-2023 pengukuran IKU tersebut menggunakan nomenklatur “Indeks Penyelesaian” dengan satuan Indeks. Terdapat

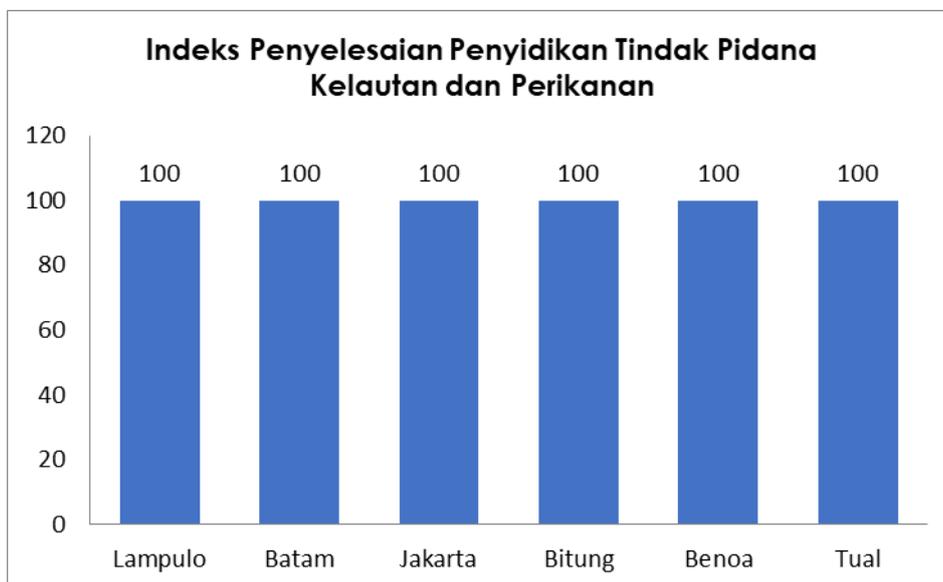
perbedaan nomenklatur, satuan, dan cara perhitungan sehingga target dan capaian tidak dapat dibandingkan.

Target dan capaian IK 11: “Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan” dibandingkan dengan tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan		
Perbandingan	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	93	93
Capaian	100	100
% Realisasi	107,53%	107,53%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa target nilai indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan pada tahun 2023 dan tahun 2024 sama, yaitu 93. Capaian pada tahun 2023 dan tahun 2024 sama, yaitu 100. Realisasi selama 2 (dua) tahun berturut-turut telah dapat memenuhi target tahunan.

Capaian IK 11: “Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan” dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa capaian dari 6 (enam) UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP adalah sama.

Rincian capaian penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo selama tahun 2024, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.20. Rincian Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Pangkalan PSKDP Lampulo

NAMA KAPAL	KEBANGSAAN KAPAL	ALAT TANGKAP	TANGGAL KEJADIAN	TAHAPAN PROSES HUKUM	TANGGAL MULAI PENYIDIKAN	SANGKAAN PASAL
KM. Tanpa Nama (Lambung Hijau Tua)	Indonesia	Peledak/ Bom	24 Mei 2023	Putusan	28 November 2023	Pasal 85 Jo Pasal 9 Jo Pasal 100B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana.
KM. Tanpa Nama (Lambung Hijau Tua)	Indonesia	Peledak/ Bom	24 Mei 2023	Putusan	28 November 2023	Pasal 85 Jo Pasal 9 Jo Pasal 100B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana.

Capaian IK 11: “Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan”, pada tahun 2024 mengalami keberhasilan tercapainya target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada IKU tersebut yaitu perlunya koordinasi yang baik dengan pusat dan instansi terkait. selain itu perlunya peningkatan kualitas SDM dalam memahami aturan perundang-undangan yang berlaku dalam melakukan penyidikan TPKP dan pengumpulan alat bukti pelanggaran yang dilakukan.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yaitu:

1. Proses penyidikan memerlukan waktu yang lama. Selain itu proses tahap II yang diminta oleh pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus disesuaikan dengan locus delicti sehingga membutuhkan anggaran yang lebih besar dalam penyelesaian penanganan pelanggaran; dan
2. Terbatas nya SDM pada satwas dan terdapat satwas yang belum memiliki personel PPNS.

Faktor penunjang yang dapat memaksimalkan pencapaian target tersebut yaitu dengan meningkatkan soliditas penyidik untuk keberhasilan penyidikan, serta menjalin dan koordinasi yang baik dengan pusat dan instansi terkait. Membuat kegiatan forum koordinasi tindak pidana kelautan dan perikanan dengan instansi terkait untuk mendapatkan informasi dan meningkatkan soliditas antar aparat penegak hukum.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 11 sebesar Rp 294.408.000,00. Sampai dengan tahun 2024, anggaran telah terserap sebesar Rp

294.368.410,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 100%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

SK 8: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen. PSDKP

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen. PSDKP”, diidentifikasi ke dalam 14 (empat belas) Indikator Kinerja Manajerial (IKM), yaitu:

IK 12: “Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pangkalan PSDKP Lampulo”

Komponen penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan PERMEN PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMEN PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan jika dinilai melalui penilaian mandiri berdasarkan Permen KP Nomor: 62/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kriteria pemenuhan capaian pada IK 12: “Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pangkalan PSDKP Lampulo”, antara lain:

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
3. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0.
4. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.

Hasil pengukuran IK 12: “Nilai WBK Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada tahun 2024, disajikan pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA MANAJERIAL	2024		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi	75	83,95	111,93%

(WBK) Pangkalan PSDKP Lampulo			
-------------------------------	--	--	--

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa target IK 12. “Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pangkalan PSDKP Lampulo” ditentukan nilai sebesar 75. Hasil dari penilaian mandiri diperoleh nilai sebesar 83,95 sehingga persentase realisasi capaian diperoleh sebesar 111,93%.

Capaian IK 12. “Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pangkalan PSDKP Lampulo” dibandingkan dengan target RPJMN, disajikan pada tabel berikut:

Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pangkalan PSDKP Lampulo							
Perbandingan	TARGET RPJMN					TARGET 2024	REALISASI 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Target	-	75	76	77	78	75	83,95

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa target IK 12: “Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pangkalan PSDKP Lampulo” pada tahun 2024 sebesar 75, dibandingkan dengan target RPJMN pada tahun 2024 sebesar 78. Target tahun 2024 lebih rendah dibandingkan dengan target RPJMN. Namun, capaian pada tahun 2024 telah memenuhi target, baik target tahunan maupun target RPJMN.

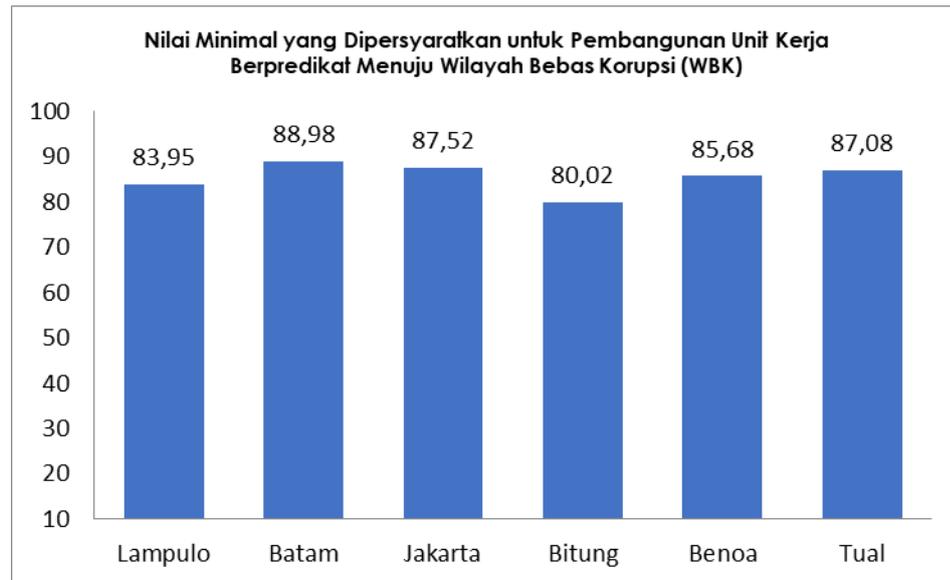
Capaian IK 12: “Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pangkalan PSDKP Lampulo” pada tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi dai tahun-tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pangkalan PSDKP Lampulo					
Perbandingan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	-	75	75	75	75
Capaian	-	80,88	84,91	88,83	83,95
% Realisasi	-	111,43%	107,84%	118,44%	111,93%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa IKU nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) Pangkalan PSDKP Lampulo mulai digunakan pada tahun 2021. Nilai

target pada tahun 2021-2024 sama, yaitu 75. Terjadi peningkatan capaian dari tahun 2021-2023, sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan capaian. Namun, capaian pada tahun 2021-2024 telah melebihi target tahunan yang ditentukan.

Capaian IK 12: “Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pangkalan PSDKP Lampulo” dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa nilai tertinggi pencapaian IKU diperoleh Pangkalan PSDKP Batam dan nilai terendah diperoleh Pangkalan PSDKP Bitung. Namun capaian dari ke-enam UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP semuanya telah memenuhi target nilai minimal 75.

Rincian hasil penilaian mandiri IK 12: “Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pangkalan PSDKP Lampulo”, disajikan pada tabel berikut:

Area Perubahan		Bobot	Pemenuhan	Reform	Nilai	
A.	PENGUNGKIT	60,00				
	1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	8,00	3,17	3,08	6,25
	2.	PENATAAN TATALAKSANA	7,00	2,43	2,42	4,85
	3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	10,00	3,63	4,25	7,88
	4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	10,00	4,00	5,00	9,00
	5.	PENGUATAN PENGAWASAN	15,00	4,60	6,24	10,83
	6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10,00	4,50	3,14	7,64
TOTAL PENGUNGKIT					46,44	
B.	HASIL	40,00				
I.	BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	22,50			18,82	
	a	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal :	17,50			16,32

	Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)			
b	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,00		2,50
II.	PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	17,50		18,69
-	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	17,50		18,69
TOTAL HASIL				37,51
NILAI PEMANTAUAN REFORMASI BIROKRASI				83,95

Capaian IK 12: “Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pangkalan PSDKP Lampulo” pada tahun 2024 mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada IKU tersebut, antara lain:

1. Pembagian target pemenuhan data dukung dilakukan sejak awal tahun dimulai dari pembentukan Tim sampai dengan monitoring dan evaluasi secara berkala;
2. Dilakukan kontrol capaian secara berkala setiap triwulan; dan
3. Komunikasi yang baik dengan seluruh Tim Kerja pembangunan Zona Integritas Pangkalan PSDKP Lampulo.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target, yaitu belum dimilikinya standar pelayanan yang tersertifikasi nasional ataupun Internasional.

Faktor penunjang yang dapat memaksimalkan pencapaian target, antara lain:

1. Dukungan Pimpinan dalam memberikan contoh dan pelaksanaan keseharian di lingkungan kantor
2. Dilakukan supervisi dan pendampingan terhadap kegiatan ZI yang dijalankan.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 12 sebesar Rp 13.713.751.000,00. Sampai dengan tahun 2024, anggaran telah terserap sebesar Rp 13.287.508.790,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 96,89%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

IK 13: “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan

manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.

Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

Capaian IK 13: “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada tahun 2024, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.21. Hasil Capaian IK 13: “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2024		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, target IK 13: “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada tahun 2024 ditentukan sebesar 100%, telah tercapai 100%, maka diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 100%.

IK 13: “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”, merupakan indikator baru di tahun 2023, sehingga tidak dapat dibandingkan targetnya dengan target RPJMN.

Target dan capaian IK 13: “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” dibandingkan dengan tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo		
Perbandingan	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	100%	100%
Capaian	100%	100%
% Realisasi	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa target IK persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada tahun 2023 dan 2024 sama, yaitu 100%. Capaian pada tahun 2023 dan 2024 sama, yaitu 100% dan telah memenuhi target tahunan.

Capaian IK 13: “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” dibandingkan dengan UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa capaian dari 6 (enam) UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP adalah sama.

Capaian IK 13 “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”, pada tahun 2024 mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada IKU tersebut, antara lain:

1. Penyusunan rencana manajemen Risiko telah dilakukan mitigasi sejak mulai proses penganggaran;

2. Dilakukan kontrol capaian secara berkala setiap triwulan; dan
3. Komunikasi yang baik dengan seluruh Katimja.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target, yaitu terdapat tantangan cuaca dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran pembangunan (fisik) yang dilaksanakan pada Semester 2 2024, sehingga membutuhkan proses adendum dalam penutupan kegiatan.

Faktor penunjang yang dapat memaksimalkan pencapaian target, antara lain:

1. Dukungan Pimpinan dalam pengendalian risiko; dan
2. Dilakukan supervisi dan pendampingan APIP dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang berpotensi risiko.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 13 sebesar Rp 13.713.751.000,00. Sampai dengan tahun 2024, anggaran telah terserap sebesar Rp 13.287.508.790,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 96,89%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

IK 14: “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Pengukuran terhadap IK 14: “Nilai Pengawasan Internal lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi:

- b. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
- c. Sumber daya kearsipan

Nilai pengawasan kearsipan lingkup Ditjen PSDKP akan diukur oleh Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya hasilnya akan disampaikan melalui surat resmi oleh Kepala Biro Umum dan PBJ. Nilai Pengawasan Kearsipan lingkup Ditjen PSDKP = Hasil Audit Sistem Kearsipan Internal Unit Kearsipan. Nilai dan kategori hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh Objek Pengawasan :

KATEGORI		INTERVAL SKOR
AA	Sangat Memuaskan	> 90 - 100
A	Memuaskan	>80 – 90
BB	Sangat Baik	>70 – 80
B	Baik	>60 – 70
CC	Cukup	>50 – 60
C	Kurang	>30 – 50
D	Sangat Kurang	>0 - 30

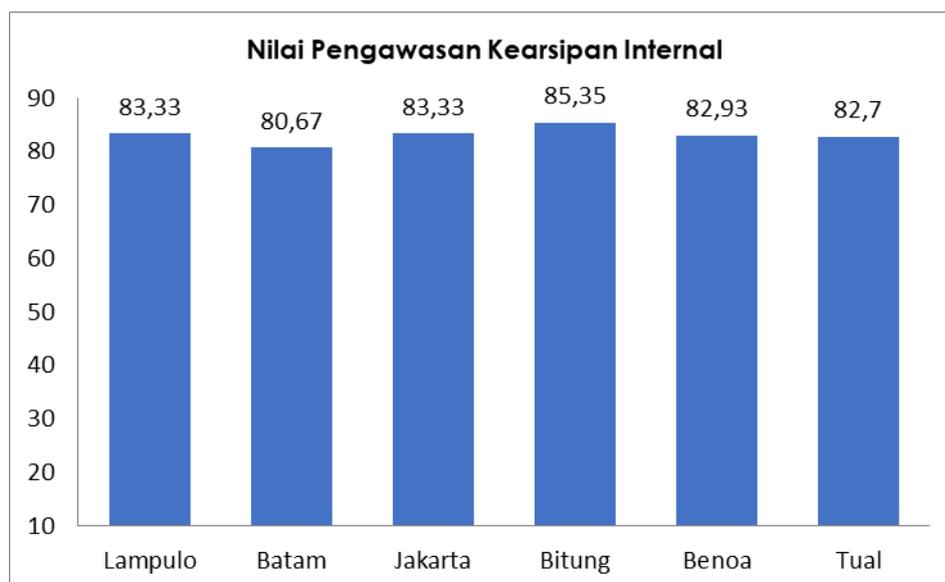
Hasil pengukuran IK 14: “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada tahun 2024, disajikan pada table berikut:

INDIKATOR KINERJA MANAJERIAL	2024		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	70	83,33	119,04%

Berdasarkan tabel di atas, target IK 14: “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada tahun 2024 ditentukan nilai sebesar 70, telah tercapai nilai sebesar 83,33 maka diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 119,04%. Capaian nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada tahun 2024 termasuk dalam kategori A (Memuaskan).

IK 14: “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” merupakan indikator baru di tahun 2024 sehingga tidak dapat dibandingkan targetnya dengan target RPJMN, juga tidak dapat dibandingkan target dan capaiannya dengan tahun sebelumnya.

Capaian IK 14: “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” dibandingkan dengan UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa capaian tertinggi diperoleh Pangkalan PSDKP Bitung dan capaian terendah diperoleh Pangkalan PSDKP Batam. Capaian dari ke-enam UPT lingkup Ditjen PSDKP telah melebihi target nilai 70.

Capaian IK 14: “Nilai Pengawasan Internal lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada tahun 2024 mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada IKU tersebut, antara lain:

1. Pemusnahan arsip yang telah dilakukan pada tahun 2024
2. Telah terdapat dukungan JF Arsiparis pada tahun 2024

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target, yaitu dibutuhkan internalisasi secara terus menerus untuk familiarisasi metode persuratan digital yang telah di implementasikan.

Faktor penunjang yang dapat memaksimalkan pencapaian target, antara lain:

1. Dukungan Pimpinan dalam pemenuhan sarana dan prasarana kearsipan; dan
2. Terdapat gudang arsip yang dimaksimalkan untuk pengarsipan Pangkalan PSDKP Lampulo.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 14 sebesar Rp 13.713.751.000,00. Sampai dengan tahun 2024, anggaran telah terserap sebesar Rp 13.287.508.790,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 96,89%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

IK 15: “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi,

Kinerja, dan Disiplin per masing-masing Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya.

Kualifikasi [Bobot 25%] yaitu yang berkenaan dengan tingkat pendidikan ASN sesuai SK Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan penilaian sebagai berikut:

- Pendidikan:
 - S3 (Nilai 25)
 - S2 (Nilai 20)
 - S1 (Nilai 15)
 - D3 (Nilai 10)
 - DII/DI/SMA (Nilai 5)
 - SMP/SD (Nilai 1)

Kompetensi [Bobot 40%] yaitu yang berkenaan dengan keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Eselon) serta Diklat Fungsional, Diklat 20 JP, atau Seminar (Bagi ASN Non Eselon), dengan penilaian sebagai berikut:

- Pejabat Struktural dihitung dgn komponen:
 - DIKLATPIM: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)
 - DIKLAT 20JP: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)
 - SEMINAR: Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0)
- Pejabat Fungsional Tertentu dihitung dgn komponen:
 - DIKLAT Teknis/Fungsional: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)
 - DIKLAT 20JP; Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)
 - SEMINAR. Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0)
- Pejabat Fungsional Umum/Staf dihitung dgn komponen:
 - DIKLAT 20 JP; Pernah ikut (Nilai 22,5), tidak pernah (nilai 0)
 - SEMINAR. Pernah ikut (Nilai 17,5), tidak pernah (nilai 0)

Kinerja (Bobot 30%) yaitu berkenaan dengan hasil penilaian prestasi kerja ASN melalui aplikasi Penilaian Perstasi Kerja Online KKP yang dikolaborasikan dengan database kepegawaian (SIMPEG Online KKP), dengan penilaian sebagai berikut:

- a. Nilai SKP 91 – Ke atas Nilai : 30 (Sangat Baik)
- b. Nilai SKP 76 – 90 Nilai : 25 (Baik)
- c. Nilai SKP 61 – 75 Nilai : 15 (Cukup)
- d. Nilai SKP 51 – 60 Nilai : 5 (Kurang)
- e. Nilai SKP 50 ke bawah Nilai : 1 *Buruk)

Disiplin (Bobot 5%) yaitu berkenaan dengan pernah atau tidaknya ASN dijatuhi hukuman disiplin, dengan penilaian sebagai berikut:

- a. Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Nilai 5;
- b. Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Ringan Nilai 3
- c. Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Sedang Nilai 2
- d. Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Berat Nilai 1

Capaian IK 15: “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada tahun 2024, disajikan pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA MANAJERIAL	2024		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	82	82,6	101,05%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa target IK 15: “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada tahun 2024 ditentukan nilai sebesar 82, telah tercapai nilai indeks sebesar 82,6 sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 101,05%.

Capaian IK 15: “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2024, dibandingkan dengan target RPJMN, disajikan pada tabel berikut:

Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo							
Perbandingan	TARGET RPJMN					TARGET 2024	REALISASI 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Target	72	73	74	75	76	82	82,6

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui target nilai indeks profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada tahun 2024 sebesar 84 sedangkan target pada RPJMN tahun 2024 sebesar 76. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai target pada tahun 2024 lebih tinggi dari nilai target RPJMN. Capaian pada tahun 2024 telah memenuhi target, baik target tahunan maupun target RPJMN.

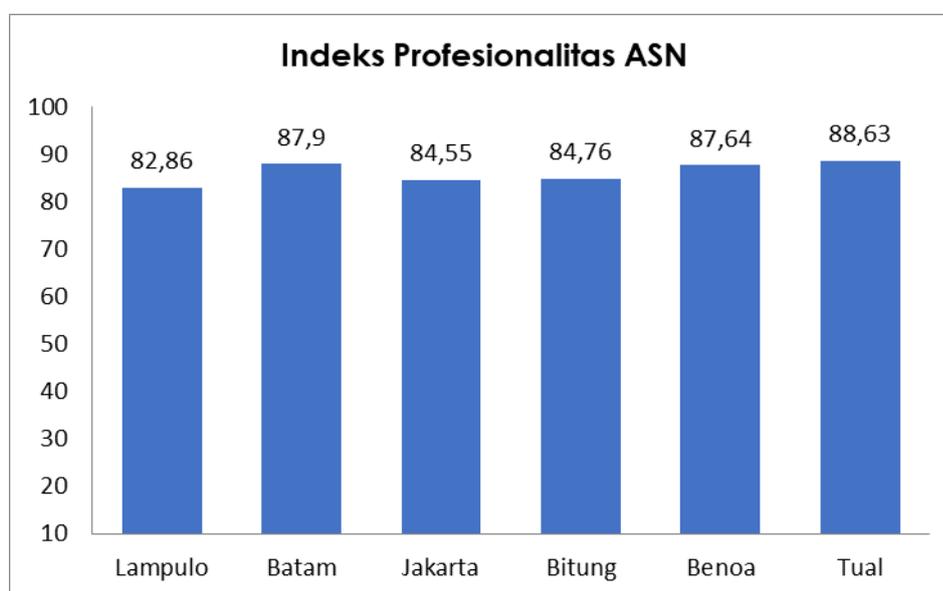
Capaian IK 15: “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2024, dibandingkan dengan realisasi dari tahun-tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo					
Perbandingan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	72	73	77	78	82

Capaian	75,17	78,69	79,02	84,39	82,6
% Realisasi	104,4%	107,79%	109,62%	108,19%	101,05%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa target pada tahun 2024 merupakan target dengan nilai tertinggi dibandingkan dengan target pada tahun-tahun sebelumnya. Capaian pada tahun 2024 dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023, terjadi penurunan nilai indeks, namun capaian tersebut telah dapat memenuhi target tahunan.

Capaian IK 15: “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” tahun 2024, dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa capaian nilai indeks profesional ASN tertinggi diperoleh Pangkalan PSDKP Tual, sedangkan capaian terendah diperoleh Pangkalan PSDKP Lampulo. Namun, capaian dari ke-enam UPT lingkup Ditjen PSDKP telah memenuhi target tahunan dengan nilai sebesar 82.

Rincian komponen perolehan nilai Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo disajikan pada tabel berikut:

No	Nama	Tipe Jabatan	Tingkat Pendidikan	Kualifikasi	Kompetensi	Struktural	Fungsional	Diklat 20 JP	Seminar	Kinerja	Predikat Kinerja	Disiplin	Hukdis	Nilai	Keterangan
1	SAHONO BUDIANTO	Struktural	S-3	25	25			15	10	25	BAIK	5	0	80	SEDANG
2	MUKLIS	JFT	S-2	23	31.75		15	6.75	10	25	BAIK	5	0	84.75	TINGGI
3	YUSTOM	JFT	S-2	23	40		15	15	10	25	BAIK	5	0	93	SANGAT TINGGI
4	HERNO ADIANTO	JFT	S-1	20	40		15	15	10	25	BAIK	5	0	90	TINGGI
5	YURDIAN SOYO	JFT	S-1	20	21.75		15	6.75		25	BAIK	5	0	71.75	SEDANG

No	Nama	Tipe Jabatan	Tingkat Pendidikan	Kualifikasi	Kompetensi	Struktural	Fungsional	Diklat 20 JP	Seminar	Kinerja	Predikat Kinerja	Disiplin	Hukdis	Nilai	Keterangan
6	YULDI HERMAN	JFT	S-1	20	40		15	15	10	25	BAIK	5	0	90	TINGGI
7	AHMAD SOPHAN MARBUN	JFT	S-1	20	30		15	15		25	BAIK	5	0	80	SEDANG
8	EKO PRASETYO RITANTO	JFT	S-2	23	40		15	15	10	25	BAIK	5	0	93	SANGAT TINGGI
9	VIRGADIOS ARFATOS	JFT	S-2	23	40		15	15	10	25	BAIK	5	0	93	SANGAT TINGGI
10	AZWAN NASUTION	JFT	S-1	20	30		15	15		25	BAIK	5	0	80	SEDANG
11	FEBRI ADIANSYAH	JFT	S-1	20	40		15	15	10	25	BAIK	5	0	90	TINGGI
12	YUSNI HAFRIALDI	JFT	S-1	20	30		15	15		25	BAIK	5	0	80	SEDANG
13	DIAN PATRIA KELIAT	JFT	S-2	23	21.75		15	6.75		25	BAIK	5	0	74.75	SEDANG
14	YUNIKA MARIANI SIREGAR	JFT	S-1	20	40		15	15	10	25	BAIK	5	0	90	TINGGI
15	MUHAMMAD ACHYAR	JFT	S-1	20	40		15	15	10	25	BAIK	5	0	90	TINGGI
16	BORIS FRANS EDBERG SIMANJUNTAK	JFT	S-1	20	40		15	15	10	25	BAIK	5	0	90	TINGGI
17	ERWIN HASANUDDIN	JFT	D-II/D-I/SMA	20	30		15	15		25	BAIK	5	0	80	SEDANG
18	MUHAMMAD IDRUS	JFT	D-II/D-I/SMA	20	36.25		15	11.25	10	25	BAIK	5	0	86.25	TINGGI
19	WIWIT ASWANDI	JFT	S-1	20	40		15	15	10	25	BAIK	5	0	90	TINGGI
20	IKHWAN HADI SUSENO	JFT	D-III	21	36.25		15	11.25	10	25	BAIK	5	0	87.25	TINGGI
21	BAGUS RIDHO YULIANTO	JFT	D-III	21	40		15	15	10	25	BAIK	5	0	91	SANGAT TINGGI
22	RIZA KURNIA	JFT	D-II/D-I/SMA	20	40		15	15	10	25	BAIK	5	0	90	TINGGI
23	PARLUHUTAN SIREGAR	JFU	S-1	22	22.5			22.5		25	BAIK	5	0	74.5	SEDANG
24	DARMIDAR	JFU	S-1	22	40			22.5	17.5	25	BAIK	5	0	92	SANGAT TINGGI
25	DWI ROSITA FITRIANINGRUM	JFU	S-1	22	40			22.5	17.5	25	BAIK	5	0	92	SANGAT TINGGI
26	ZULFIKAR	JFU	S-1	22	40			22.5	17.5	25	BAIK	5	0	92	SANGAT TINGGI
27	DESI HANDAYANI	JFU	S-1	22	22.5			22.5		25	BAIK	5	0	74.5	SEDANG
28	YOHANES LAN TIELUNG	JFU	S-1	22	21.375			21.375		25	BAIK	5	0	73.375	SEDANG
29	VENDY REYGANT REI	JFU	S-1	22	22.5			22.5		25	BAIK	5	0	74.5	SEDANG
30	MUHAMMAD FAISAL	JFU	S-1	22	40			22.5	17.5	25	BAIK	5	0	92	SANGAT TINGGI
31	ANMA TETOVO DAUD	JFU	S-1	22	38.875			21.375	17.5	25	BAIK	5	0	90.875	TINGGI
32	MARDIANA	JFU	D-III	21	22.5			22.5		25	BAIK	5	0	73.5	SEDANG
33	ANDRIYANTO	JFU	D-II/D-I/SMA	20	40			22.5	17.5	25	BAIK	5	0	90	TINGGI
34	HANUDIN	JFU	D-II/D-I/SMA	20	40			22.5	17.5	25	BAIK	5	0	90	TINGGI
35	YEYEN NOFRIWAN PUTRA	JFU	D-II/D-I/SMA	20	22.5			22.5		25	BAIK	5	0	72.5	SEDANG
36	RAHMAT FAJAR	JFU	D-III	21	22.5			22.5		25	BAIK	5	0	73.5	SEDANG
37	AMDANI	JFU	D-II/D-I/SMA	20	40			22.5	17.5	25	BAIK	5	0	90	TINGGI
38	FIKRIYANSYAH	JFU	D-II/D-I/SMA	20						25	BAIK	5	0	50	SANGAT RENDAH
39	THOMAS ROMANO PUTRA	Struktural	S-2	23	40	15		15	10	25	BAIK	5	0	93	SANGAT TINGGI
40	ABDULLAH ARFAN	JFU	S-1	22	40			22.5	17.5	25	BAIK	5	0	92	SANGAT TINGGI
41	VENOL FERDIANSYAH	JFU	SMP/SD	15							-	5	0	20	SANGAT RENDAH
42	AKHMAD RONNY KRISNANTO	JFU	D-III	21	22.5			22.5		25	BAIK	5	0	73.5	SEDANG
43	ASEP Satria YUDHA BHERMANA	JFU	S-1	22	17.5				17.5	25	BAIK	5	0	69.5	RENDAH
44	RYAN SHIDDEQI	JFU	D-II/D-I/SMA	20	20.875			3.375	17.5	25	BAIK	5	0	70.875	RENDAH
45	BUSTAMI	JFT	S-1	20	40		15	15	10	25	BAIK	5	0	90	TINGGI
46	REGAN HANIFELIAN YUSA	JFT	S-1	20	40		15	15	10	25	BAIK	5	0	90	TINGGI
47	IMANIA ETIKASARI	JFT	D-III	21	40		15	15	10	25	BAIK	5	0	91	SANGAT TINGGI
48	CHAIRUNNISA	JFT	D-III	21	30		15	15		25	BAIK	5	0	81	TINGGI
49	WIWIN HERWINA	JFT	D-III	21	25			15	10	25	BAIK	5	0	76	SEDANG
50	TANISA FITRI	JFT	D-II/D-I/SMA	20	40		15	15	10	25	BAIK	5	0	90	TINGGI
51	LUFFI HIDAYAT HASIBUAN	JFU	S-1	22	40			22.5	17.5	25	BAIK	5	0	92	SANGAT TINGGI
52	MUHAMMAD SAMSUL MA ARIF	JFU	D-II/D-I/SMA	20	40			22.5	17.5	25	BAIK	5	0	90	TINGGI

Capaian IK 15: “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada tahun 2024 mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada IKU tersebut, antara lain:

1. Terdapat pelatihan secara daring pada kanal digital KKP (E-Milea) dan K/L lainnya (KLC Kemenkeu Learning Center) yang di ikuti pegawai; dan
2. Telah terdapat kegiatan Internalisasi BIMTEK secara berkala melalui Seminar Internal berupa kegiatan Lampulo Sharing Session (LOSSION).

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target, yaitu dibutuhkan lebih sering praktik/familiarisasi dalam penerapan hasil pelatihan yang didapatkan dalam kegiatan pengawasan SDKP.

Faktor penunjang yang dapat memaksimalkan pencapaian target, yaitu :

1. Dukungan Pimpinan dalam mendukung pengembangan potensi pegawai
2. Internalisasi berkala LOSSION tidak hanya dilakukan 1 kali 1 bulan namun dilakukan setiap pegawai selesai mendapatkan pelatihan

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 15 sebesar Rp 472.029.000,00. Sampai dengan tahun 2024, anggaran telah terserap sebesar Rp 472.025.427,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 100%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

IK 16: “Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Lampulo”

SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Hasil penilaian oleh Inspektorat Mitra berdasarkan lembar kerja evaluasi yang disusun Ijen dengan mengacu pada lembar kerja evaluasi AKIP oleh Kemenpan RB.

Hasil pengukuran IK 16: “Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Lampulo” pada tahun 2024, disajikan pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA MANAJERIAL	2024		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Lampulo	84	85,45	101,73%

Dari tabel di atas, dapat diketahui Pangkalan PSDKP Lampulo pada tahun 2024, menentukan target IK 16: “Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Lampulo” dengan

nilai sebesar 84, diperoleh capaian sebesar 85,45 maka diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 101,73%.

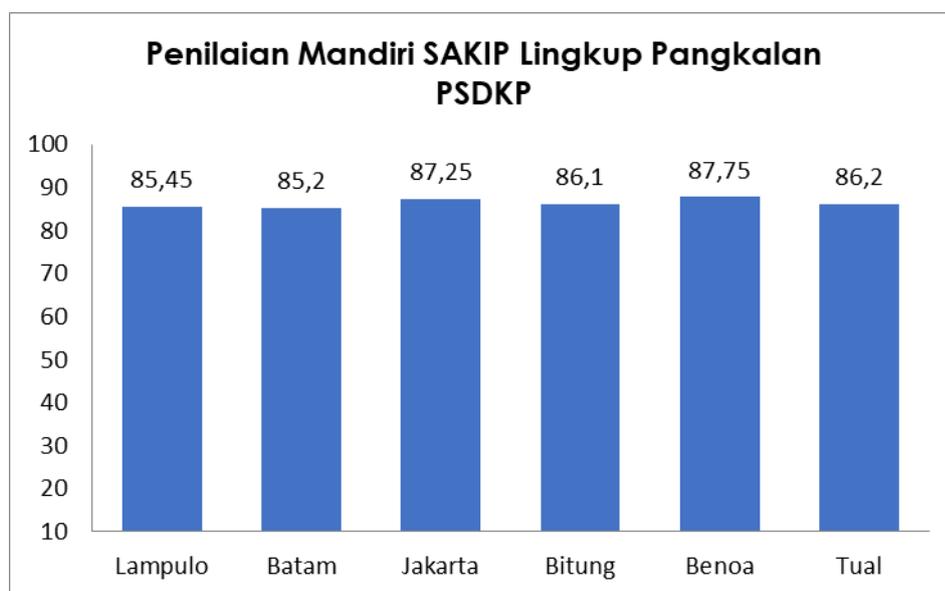
IK 16: “Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Lampulo” merupakan indikator baru di tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan targetnya dengan target RPJMN.

Capaian IK 16: “Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Lampulo” pada tahun 2024 dibandingkan dengan target dan realisasi tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Lampulo		
Perbandingan	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	80,05	84
Capaian	79,50	85,45
% Realisasi	99,31%	101,73%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 terjadi peningkatan nilai target hasil penilaian mandiri SAKIP dibandingkan dengan target pada tahun 2023. Terjadi peningkatan capaian yang diperoleh pada tahun 2024, capaian tersebut telah memenuhi target tahunan dengan nilai sebesar 84.

Capaian IK 16: “Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Lampulo” dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa Hasil Penilaian Mandiri SAKIP tertinggi diperoleh Pangkalan PSDKP Bena dan hasil terendah diperoleh Pangkalan PSDKP Batam. Namun, hasil capaian yang diperoleh ke-enam UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP telah memenuhi target tahunan.

Hasil penilaian mandiri SAKIP lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, disajikan pada tabel berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Predikat
1.	Perencanaan Kinerja	30%	25,80	A
2.	Pengukuran Kinerja	30%	26,10	
3.	Pelaporan Kinerja	15%	13,80	
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	19,75	
Total		100%	84,45	

Capaian IK 16: “Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Lampulo” pada tahun 2024 mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada IKU tersebut, yaitu

1. Terdapat uji petik yang dilakukan BIRO Perencanaan KKP dan Sesditjen PSDKP ke Pangkalan PSDKP Lampulo; dan
2. Telah terdapat digitalisasi dalam pengadministrasian dokumen kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target, yaitu dibutuhkan pemahaman setiap pegawai dalam pemenuhan data dukung dalam pencapaian IK sesuai dengan manual IK yang telah ditetapkan.

Faktor penunjang yang dapat memaksimalkan pencapaian target, yaitu :

1. Dukungan Pimpinan dalam mendukung digitalisasi kinerja berupa internalisasi penurunan target kinerja; dan
2. Evaluasi berkala dalam penilaian capaian kinerja organisasi mulai dari tingkat perorangan sampai organisasi.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 16 sebesar Rp 96.202.000,00. Sampai dengan tahun 2024, anggaran telah terserap sebesar Rp 96.192.800,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 100%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

IK 17: “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan”

Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada 1 Oktober 2023 (TW III tahun sebelumnya) s.d 30 September 2024 (TW III periode berjalan) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP.

Capaian IK 17: “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan” pada tahun 2024, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.23. Hasil Capaian IK 17: “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan”

INDIKATOR KINERJA MANAJERIAL	2024		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	80%	100%	120%

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa target IK 17: “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan” pada tahun 2024 sebesar 80%, telah tercapai sebesar 100%, sehingga persentase realisasi capaian diperoleh sebesar 120%. Rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada tahun 2024 telah ditindaklanjuti, sehingga capaian dapat diperoleh sebesar 100%.

IK 17: “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan” merupakan indikator baru yang mulai digunakan pada tahun 2022, sehingga targetnya tidak dapat dibandingkan dengan target RPJMN.

Capaian IK 17: “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan” pada tahun 2024, dibandingkan dengan realisasi tahun – tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan			
Perbandingan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	70%	75%	80%
Capaian	100%	100%	100%

% Realisasi	120%	120%	120%
--------------------	------	------	------

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa target persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebesar 5%. Realisasi dari tahun ke tahun telah dapat memenuhi target tahunan yang ditentukan, rekomendasi hasil pengawasan pada tahun berjalan seluruhnya dapat ditindaklanjuti sehingga capaian diperoleh sebesar 100%.

Capaian IK 17: “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan” pada tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa capaian dari 6 (enam) UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP adalah sama.

Pada tahun 2024, capaian pada IK 17: “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan” adalah 100%. Hal ini diraih sesuai dengan Surat dari Sesditjen PSDKP Nomor: B.141/PSDKP.1/TU.140/I/2025 tanggal 8 Januari 2025 tentang Penyampaian Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja” lingkup Ditjen PSDKP Triwulan IV Tahun 2024, dengan rincian sebanyak 6 (enam) rekomendasi, telah tuntas ditindaklanjuti 100%.

Tindak lanjut yang dipenuhi Pangkalan PSDKP Lampulo dalam pemenuhan capaian Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja diantaranya:

1. 159/ITJ.2/HP.470/VI/2024, Hasil Evaluasi Pelaksanaan Penerbitan SLO TA 2023 dan 2024 pada Pangkalan PSDKP Lampulo di Provinsi Aceh telah ditindak lanjuti tuntas melalui berita acara pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan inspektorat jenderal nomor - 3259.27.09/ITJ/pl.420/IX/2024.
2. 160/ITJ.2/HP.470/VI/2024, Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Polisi Khusus (Polsus) PWP3K TA 2023-2024 pada Pangkalan PSDKP Lampulo telah ditindak lanjuti melalui berita acara pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan inspektorat jenderal nomor - 3260.27.09/ITJ/pl.420/IX/2024.
3. R.164/ITJ.2/HP.380/VI/2024, Hasil Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Kantor Satwas SDKP Padang, Prov. Sumatera Barat telah ditindak lanjuti melalui berita acara pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan inspektorat jenderal nomor - 3266.27.09/ITJ/pl.420/IX/2024.
4. 179/ITJ.2/HP.380/VI/2024, Hasil Reviu Usulan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Melalui Penjualan Berupa Bangunan Gedung Pada Pangkalan PSDKP Lampulo Provinsi Aceh, telah ditindak lanjuti berita acara pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan inspektorat jenderal nomor - 3211.27.09/ITJ/pl.420/IX/2024.
5. R.281/ITJ.2/HP.470/IX/2024, Hasil Evaluasi Pelayanan Publik pada Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2024, telah ditindak lanjuti berita acara pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan inspektorat jenderal nomor - 3444.19.12/ITJ/pl.420/XII/2024.
6. R.282/ITJ.2/HP.550/IX/2024, Hasil Pemantauan Pembangunan Gudang Pangkalan PSDKP Lampulo, telah ditindak lanjuti berita acara pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan inspektorat jenderal nomor - 3443.19.12/ITJ/pl.420/XII/2024.

Capaian 17: “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan

Disampaikan” mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada IKU tersebut, antara lain:

1. Tindak lanjut hasil temuan langsung dilakukan tidak lebih dari waktu yang ditetapkan auditor; dan
2. Berkoordinasi dengan APIP dan Seditjen PSDKP terkait update aplikasi SIDAK KKP dalam memantau temuan yang belum tuntas.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target, yaitu dibutuhkan komunikasi yang intens dan kontinui dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan anantara pelaksana teknis dilapangan dengan tim TL rekomendasi hasil pengawasan.

Faktor penunjang yang dapat memaksimalkan pencapaian target, antara lain:

1. Dukungan Pimpinan dalam mendukung penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan; dan
2. Komunikasi efektif setiap pegawai dalam pemenuhan data dukung temuan.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 17 sebesar Rp 63.550.000,00. Sampai dengan tahun 2024, anggaran telah terserap sebesar Rp 63.550.000,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 100%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

IK 18: “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja”

Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker. Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja. Unsur Budaya Kerja yang dinilai implementasinya terdiri dari:

1. Tim Satker (6)
2. Hasilkan Inovasi Unit Kerja (12)
3. Lima Menit Sebelum Jadwal (2)
4. Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin (2)
5. Upayakan Data Terkini (2)
6. Organisasikan, Catat, Aksi, dan Arsipkan (3)
7. Tegakan Aturan dengan Akuntabel dan Transparan (1)
8. Belanjakan Anggaran secara Realistis, Akuntabel dan Amanah (1)
9. ASN PSDKP Produktif Kerja (1)

- 10. Menyelesaikan Tugas dengan Tepat (3)
- 11. Hargai, Motivasi, dan Inisiatif (2)
- 12. Gelorakan Gerakan hemat Energi (3)

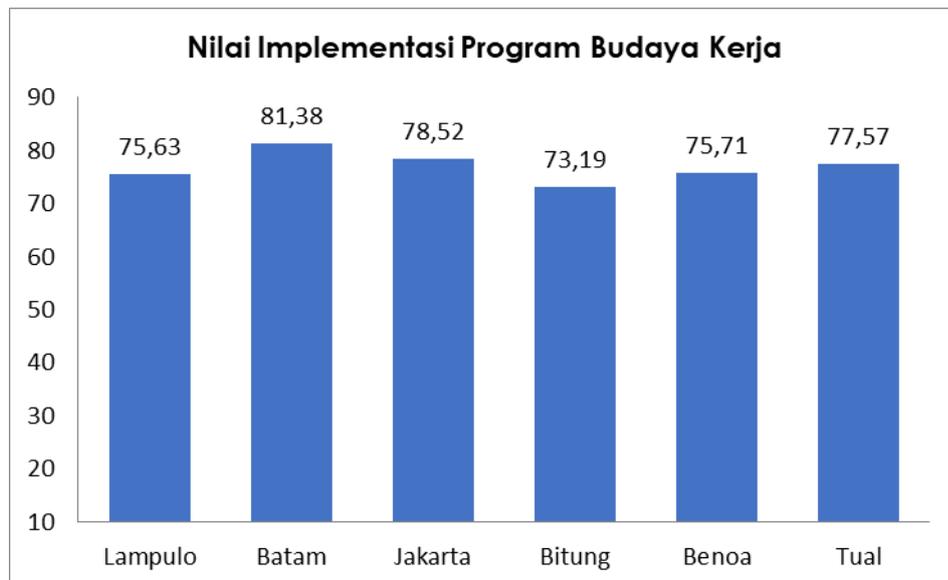
Hasil pengukuran terhadap IK 18: “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja” lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA MANAJERIAL	2024		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	70	75,63	108,40%

Pada tahun 2024, Pangkalan PSDKP Lampulo menentukan target pada IK 18: “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja” dengan nilai sebesar 70, telah terapai nilai 75,63 sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 108,40%.

IK 18: “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja” merupakan indikator baru yang digunakan mulai tahun 2021-2022. Namun karena adanya penyesuaian kriteria penilaian, pada tahun 2024 penyesuaian nilai target menjadi 70, sehingga IK tersebut tidak dapat dibandingkan dengan target RPJMN dan target tahun-tahun sebelumnya.

Capaian IK 18: “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja”, dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada graafik berikut:



Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa hasil pengukuran implementasi program budaya kerja dengan nilai tertinggi diperoleh Pangkalan PSDKP Batam, sedangkan nilai terendah diperoleh Pangkalan PSDKP Bitung. Namun, capaian dari ke-

enam UPT Pangkalan lingku Ditjen PSDKP telah memenuhi target tahunan dengan nilai 70.

Capaian IK 18: “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja”, pada tahun 2024 mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada IKU tersebut, antara lain:

1. Pembagian target pemenuhan data dukung dilakukan secara berkala oleh Sekretariat, Fasilitator dan Tim Gugus Kerja Transformasi Budaya Kerja Pangkalan PSDKP Lampulo;
2. Dilakukan kontrol capaian secara berkala; dan
3. Komunikasi yang baik dengan seluruh Tim Kerja Budaya Kerja.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target, yaitu belum dimilikinya kontinuitas inovasi dalam budaya kerja yang dihasilkan pada tahun 2023 dan di implementasikan pada tahun 2024.

Faktor penunjang yang dapat memaksimalkan pencapaian target, antara lain:

1. Dukungan Pimpinan dalam memberikan contoh dan pelaksanaan keseharian di lingkungan kantor; dan
2. Dilakukan supervisi dan pendampingan terhadap kegiatan Budaya Kerja secara berkala,

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 18 sebesar Rp 8.500.000,00. Sampai dengan tahun 2024, anggaran telah terserap sebesar RP 8.500.000,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 100%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

IK 19: “Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Pangkalan PSDKP Lampulo”

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada. Penetapan inovasi, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya

Kelautan dan Perikanan Nomor 18/KEP-DJPSDKP/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lomba Inovasi di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP. Jumlah proposal inovasi yang ditetapkan dalam BA penilaian oleh Tim Penilai Ditjen PSDKP.

Adapun Kriteria Inovasi, antara lain: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan. Kelompok inovasi dia ktegorikan: umum, khusus. Aspek dan Kriteria Inovasi, meliputi:

3. Masalah, Tema, dan Sasaran
4. Proses Analisa
5. Solusi
6. Mutu Proses Pelaksanaan
7. Tingkat Kesulitan
8. Ketepatan dan Kelengkapan Evaluasi
9. Dampak Perbaikan Hasil
10. Standarisasi dan Pengembangan Berkelanjutan

Hasil pengukuran IK 19: “Inovasi Pelayanan Publik yng Diterapkan Pangkalan PSDKP Lampulo” pada tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA MANAJERIAL	2024		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Inovasi Pelayanan Publik yng Diterapkan Pangkalan PSDKP Lampulo	1	1	100%

Pada tahun 2024, Pangkalan PSDKP Lampulo menentukan target terhadap IK 19: “Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Pangkalan PSDKP Lampulo” sebanyak 1 inovasi, telah tercapai 1 inovasi, sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 100%.

Capaian IK 19: “Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Pangkalan PSDKP Lampulo” merupakan indikator baru yang diterapkan mulai tahun 2022, sehingga tidak dapat dibandingkan targetnya dengan RPJMN. Pada tahun 2022, nomenklatur terkait IK tersebut yaitu “Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik”, sedangkan pada tahun 2023, nomenklaturnya “Inovasi yang Dihasilkan”.

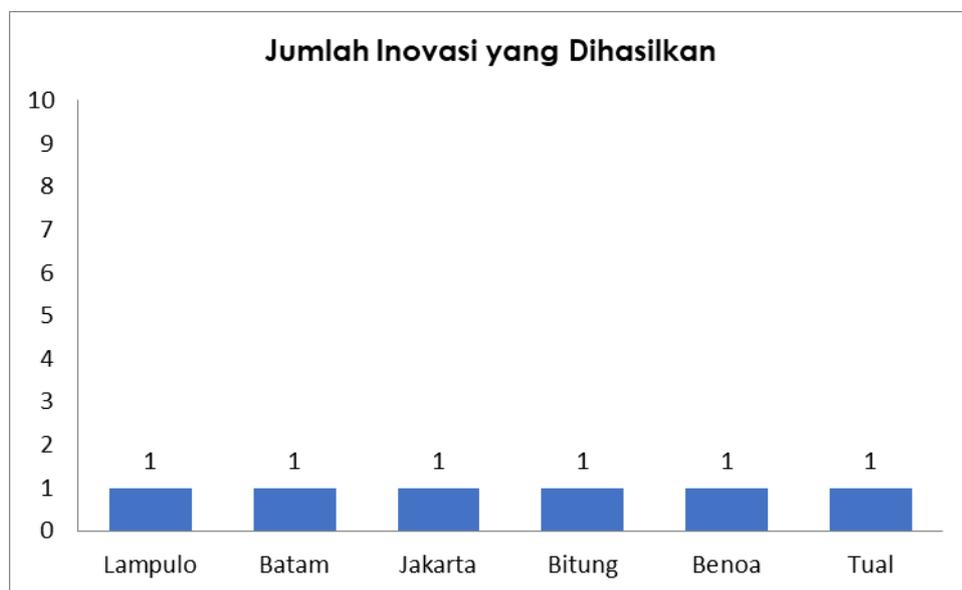
Target dan capaian IK 19: “Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Pangkalan PSDKP Lampulo”, dibandingkan dengan realisasi tahun – tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Pangkalan PSDKP Lampulo

Perbandingan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	1	1	1
Capaian	1	1	1
% Realisasi	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, target inovasi yang dihasilnya sebanyak 1 (satu) inovasi, telah tercapai 1 (satu) inovasi, sehingga capaian diperoleh sebesar 100%.

Capaian IK 19: “Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Pangkalan PSDKP Lampulo”, dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa capaian dari 6 (enam) UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP adalah sama.

Capaian Capaian IK 19: “Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Pangkalan PSDKP Lampulo” pada tahun 2024 mengalami keberhasilan pencapaian target. Pangkalan PSDKP Lampulo berhasil meraih Juara I Lomba Inovasi Kategori Unit Pelayanan Teknis, dengan dokumentasi sebagai berikut:



Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada IKU tersebut, antara lain:

1. Inovasi Pelayanan Publik Pangkalan PSDKP Lampulo meraih penghargaan dalam lomba Inovasi PSDKP Tahun 2024; dan
2. Komunikasi yang baik antara Tim GKT.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target, yaitu inovasi tahun 2023 tidak dilanjutkan pada tahun 2024 karena telah tidak relevan diterapkan seiring perubahan peraturan perundangan dibidang penerbitan SLO secara elektronik.

Faktor penunjang yang dapat memaksimalkan pencapaian target, antara lain:

1. Dukungan ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan inovasi; dan
2. Dilakukan supervisi dan pendampingan terhadap kegiatan inovasi secara berkala.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 19 sebesar Rp 17.000.000,00. Sampai dengan tahun 2024, anggaran telah terserap sebesar Rp 17.000.000,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 100%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

IK 20: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui survei secara kuantitatif dan komprehensif terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pengambilan Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017. Survei digunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada Masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Pelaksanaan Survei dilakukan setiap triwulan oleh seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Ditjen PSDKP menggunakan aplikasi SI SUSAN (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat KP). Penentuan nilai ditetapkan setelah dilakukan verifikasi dan validasi level eselon I yang dilaksanakan 8 s.d 10 hari di triwulan berikutnya. Nilai mutu pelayanan diukur melalui system informasi survey kepuasan masyarakat (tool SKM atau SI-SUSAN) atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KKP sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2021. Penilaian dilakukan atas seluruh responden KKP mencakup 9 unsur pelayanan:

- U1-Persyaratan Layanan
- U2-Kemudahan Prosedur
- U3- Waktu Penyelesaian
- U4-Kesesuaian Biaya
- U5-Kesesuaian Produk
- U6-Kecepatan Respon/Kompetensi Petugas
- U7-Kemudahan Fitur/Perilaku Petugas
- U8-Layanan Konsultasi
- U9-Kualitas Isi/Sarana

Capaian IK 20: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada tahun 2024, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.24. Hasil Capaian IK 20: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

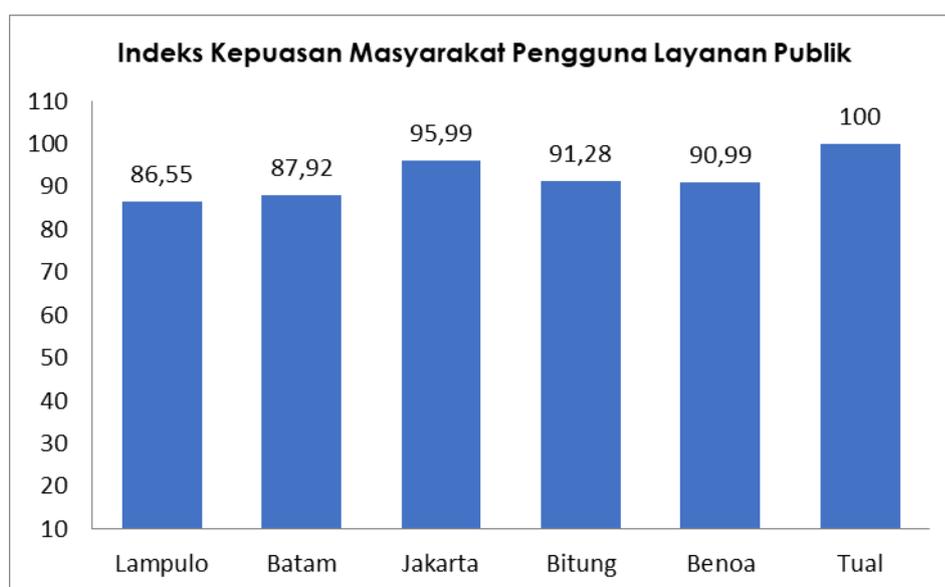
INDIKATOR KINERJA MANAJERIAL	TW	2024			
		TARGET	CAPAIAN	Rata-rata	PERSEN
Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	TW I	80	82,11	86,55	108,19%
	TW II	80	87,38		

	TW III	80	86,44		
	TW IV	80	90,28		

Pada tahun 2024, target IK 20: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” ditentukan nilai 80 telah tercapai nilai 86,55, sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 108,19%. Nilai capaian pada tahun 2024 diperoleh dari rata-rata capaian Triwulan I s/d Triwulan IV. Adapun nilai IKM pada Triwulan I 2024 diperoleh sebesar 82,11, nilai IKM pada Triwulan II 2024 diperoleh sebesar 87,38, nilai IKM pada Triwulan III 2024 diperoleh sebesar 86,44, dan nilai IKM pada Trowulan IV 2024 diperoleh sebesar 90,28 sehingga rata-rata nilai IKM diperoleh sebesar 86,55. Data pengukuran nilai indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan publik diukur menggunakan Aplikasi SI-SUSAN.

IK 20: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” merupakan indikator baru yang digunakan pada tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan targetnya dengan RPJMN dan realisasi dari tahun – tahun sebelumnya. Pada tahun 2020-2023, nomenklatur Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan terdiri atas Layanan Penerbitan SLO dan LVHPI.

Capaian IK 20: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa pengukuran indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan publik dengan nilai tertinggi diperoleh Pangkalan PSDKP

Tual dan nilai terendah diperoleh Pangkalan PSDKP Lampulo. Capaian dari ke-enam UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP telah memenuhi target tahunan dengan nilai 80.

Capaian IK 20: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada tahun 2024 mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada IKU tersebut, antara lain:

1. Perbaikan sara prasarana pelayanan yang dilakukan; dan
2. Komunikasi yang baik antara pemebri layanan dan penerima layanan sehingga dipahami dengan baik.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target, yaitu penggunaan aplikasi survey digital / elektornik yang belum dipahami oleh responden.

Faktor penunjang yang dapat memaksimalkan pencapaian target, antara lain:

1. Dukungan ketersediaan anggaran dalam perbaikan fasilitas pelayanan; dan
2. Dilakukan supervisi dan pendampingan terhadap kegiatanpelayanan secara berkala dari pemberi layanan ke penerima layanan.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 20 sebesar Rp 13.713.751.000,00. Sampai dengan tahun 2024, anggaran telah terserap sebesar Rp 13.287.508.790,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 96,89%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

IK 21: “Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah maupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Terdapat 3 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu:

- o Dokumen: Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Informasi Indikator Kinerja, Laporan Kinerja & Interim, Rencana Kerja RB, Renaksi Kinerja;
- o Keikutsertaan: Pimpinan Unit Eselon I-IV, Staf (minimal 2 orang per Unit Eselon IV);
- o Keaktifan: Pimpinan Unit Eselon I-Staf

Capaian IK 21: “Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada tahun 2024, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.25. Hasil Capaian IK 21: “Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2024
-------------------------	------

	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	94%	124,17%	120%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa target I IK 21: “Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada tahun 2024 ditentukan sebesar 94%, telah tercapai sebesar 124,17%, sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 120%.

Capaian IK 21: “Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”, dibandingkan dengan target RPJMN disajikan pada tabel berikut:

Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar							
Perbandingan	TARGET RPJMN					TARGET 2024	REALISASI 2023
	2020	2021	2022	2023	2024		
Target	-	84%	86%	88%	90%	94%	124,17%

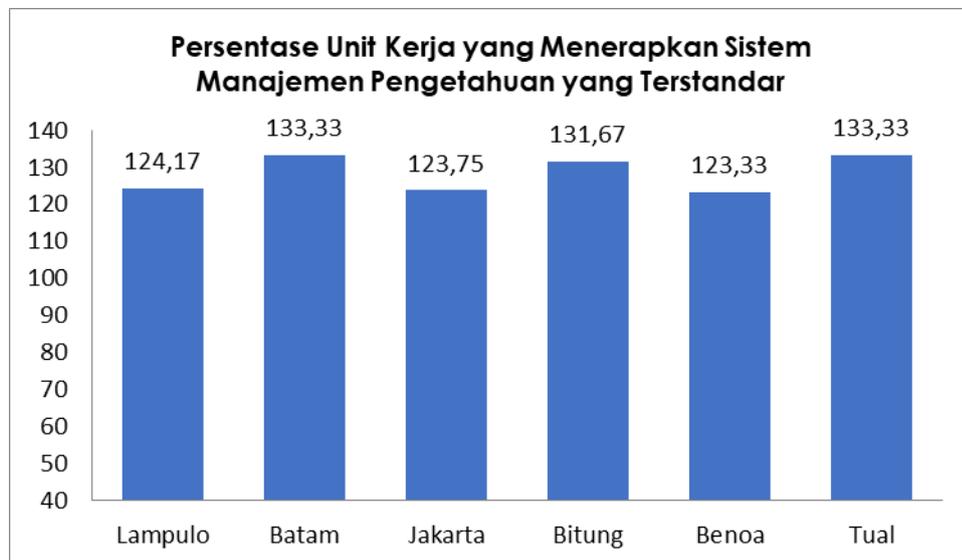
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa target tahunan IK 21: “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar” pada tahun 2024 sebesar 94%, dibandingkan dengan target RPJMN pada tahun 2024 sebesar 90%, target tahunan lebih tinggi dibandingkan dengan target RPJMN. Realisasi nilai MP pada tahun 2024 telah memenuhi target, baik target tahunan maupun target RPJMN.

Capaian IK 21: “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar” tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi dari tahun – tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo					
Perbandingan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	82%	84%	84%	92%	94%
Capaian	77,70%	100%	96,60%	102,68%	124,17%
% Realisasi	76,63%	110,05%	112,33%	111,61%	120%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa target IK MP dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, dengan target tertinggi pada tahun 2024 sebesar 94%. Capaian tertinggi diperoleh pada tahun 2024 dengan persentase sebesar 124,17%.

Capaian IK 21: “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar” tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa hasil pengukuran persentase MP tertinggi diperoleh Pangkalan PSDKP Batam dan Pangkalan PSDKP Tual, sedangkan persentase MP terendah diperoleh Pangkalan PSDKP Benoa. Capaian IK MP dari ke-enam UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP telah memenuhi target tahunan 94%.

Rincian capaian IK 21: “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar” tahun 2024 lingkup UPT PSDKP, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.26. Capaian Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Ditjen PSDKP

No	UPT PSDKP	Target Tw IV	Capaian Tw 1	Capaian Tw 2	Capaian Tw 3	Capaian Tw 4	Rata-Rata
1	Jakarta	94%	110,00%	133,33%	131,67%	120,00%	123,75%
2	Bitung	94%	126,67%	133,33%	133,33%	133,33%	131,67%
3	Lampulo	94%	133,33%	116,67%	131,67%	115,00%	124,17%
4	Batam	94%	133,33%	133,33%	133,33%	133,33%	133,33%
5	Benoa	94%	126,67%	131,67%	120,00%	123,33%	125,42%
7	Tual	94%	133,33%	133,33%	133,33%	133,33%	133,33%
6	Belawan	94%	120,00%	133,33%	133,33%	133,33%	130,00%
8	Pontianak	94%	126,67%	131,67%	133,33%	133,33%	131,25%
9	Tarakan	94%	121,67%	133,33%	133,33%	133,33%	130,42%
10	Cilacap	94%	133,33%	133,33%	133,33%	133,33%	133,33%
11	Kupang	94%	133,33%	133,33%	133,33%	133,33%	133,33%
12	Ambon	94%	120,00%	125,00%	123,33%	121,67%	122,50%
13	Tahuna	94%	133,33%	133,33%	133,33%	133,33%	133,33%
14	Biak	94%	130,00%	133,33%	133,33%	133,33%	132,50%

Capaian IK 21: “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada tahun 2024 mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada IKU tersebut, antara lain:

1. Monitoring secara berkala dalam penyampaian informasi pada Aplikasi Portal Colaboration Office melalui laman <http://portal.kkp.go.id>; dan
2. Pimpinan memberikan himbauan secara terus menerus agar pegawai aktif dalam penyampaian berita pada Aplikasi Portal Colaboration Office.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target, yaitu penggunaan Aplikasi Portal Colaboration Office perlu dilakukan internalisasi agar seluruh pegawai dapat terbiasa dan mudah dalam mengakses setiap waktu.

Faktor penunjang yang dapat memaksimalkan pencapaian target, antara lain:

1. Disiplin dan budaya tuntas dalam pelaksanaan kegiatan mulai perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan disetiap media pelaporan setelah dilaksanakan kegiatan; dan
2. Dilakukan supervisi dan pendampingan terhadap penyampaian berita agar memenuhi kriteria 5W+1H.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 21 sebesar Rp109.250.000,00. Sampai dengan tahun 2024, anggaran telah terserap sebesar Rp 109.250.000,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 100%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

IK 22: “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Pelaksana Teknis yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- 1). Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023;
- 2). Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan IV tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
- 3). Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2021 – 2023;
- 4). Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2023 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian;
- 5). Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.

Hasil pengukuran IK 22: “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN” pada tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2024		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN	80	100	120%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui target pada IK 22: “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” dengan nilai sebesar 80, telah tercapai nilai sebesar 100, maka diperoleh persentase realisasi capaian diperoleh sebesar 120%.

Capaian IK 22: “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada tahun 2024, dibandingkan dengan target RPJMN, disajikan pada tabel berikut:

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo							
Perbandingan	TARGET RPJMN					TARGET 2024	REALISASI 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Target	-	72,5	72,15	72,25	75,35	80	100

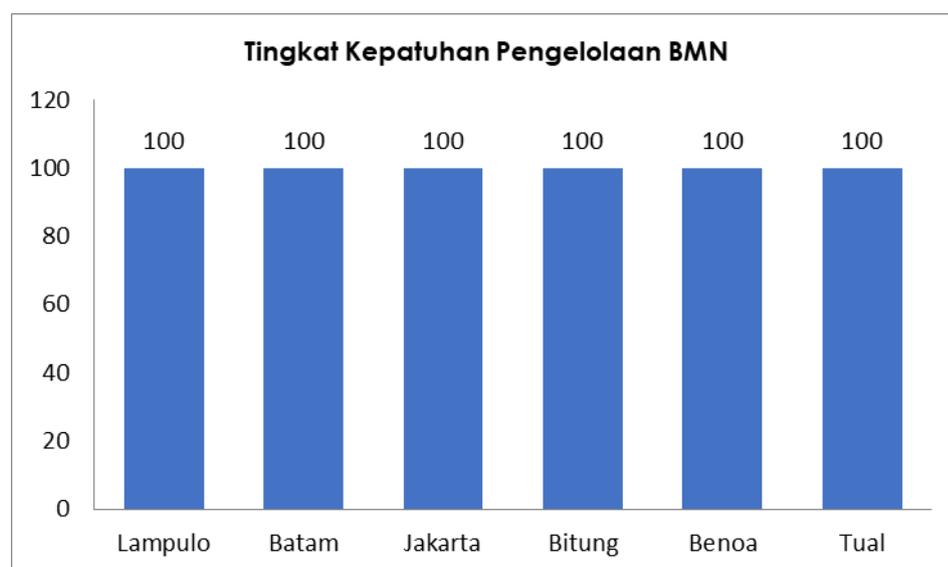
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa target IK tingkat kepatuhan pengelolaan BMN pada tahun 2024 sebesar 80, dibandingkan dengan target RPJMN pada tahun 2024 sebesar 75,35. Nilai target tahunan lebih tinggi dibandingkan dengan target pada RPJMN. Capaian pada tahun 2024 telah memenuhi target, baik target tahunan, maupun target pada RPJMN.

Capaian IK 22: “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada tahun 2024, dibandingkan dengan target dan realisasi tahun – tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo					
Perbandingan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	-	72,50	75	77,5	80
Capaian	-	95	100	100	100
% Realisasi	-	120%	120%	120%	120%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai target IK 22: “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” yang tertinggi yaitu pada tahun 2024 dengan nilai sebesar 80. Capaian pada tahun 2024 sama dengan capaian pada tahun sebelumnya, dan telah dapat memenuhi target tahunan.

Capaian IK 22: “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada tahun 2024, dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa capaian dari 6 (enam) UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP adalah sama.

Capaian IK 22: “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada tahun 2024 mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada IKU tersebut, antara lain:

1. Terdapat monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala
2. Telah terdapat digitalisasi dalam pengadministrasian dokumen BMN Pangkalan PSDKP Lampulo

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target, yaitu dibutuhkan pemahaman dalam pelaksanaan belanja yang dilakukan untuk terus memperhatikan aturan pengelolaan dan pencatatan BMN.

Faktor penunjang yang dapat memaksimalkan pencapaian target, yaitu :

1. Dukungan dalam pelaksanaan perencanaan RK BMN setiap tahunnya; dan
2. Evaluasi berkala dalam pencapaian dan pencatatan yang dilakukan operator BMN.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 22 sebesar Rp 61.500.000,00. Sampai dengan tahun 2024, anggaran telah terserap sebesar Rp 61.500.000,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 100%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

IK 23: “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa merupakan Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV. Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- 1). Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%);
- 2). Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%);
- 3). Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%);
- 4). Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Hasil pengukuran

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2024		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
IK 23: “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	80	94,64	118,3%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui target pada IK 23: “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” sebesar 80, telah tercapai nilai 94,64 sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 118,3%.

Capaian IK 23:“Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada tahun 2024 dibandingkan dengan target RPJMN disajikan pada tabel berikut:

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo							
Perbandingan	TARGET RPJMN					TARGET 2024	REALISASI 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Target	-	72,5	72,15	72,25	75,35	80	94,64

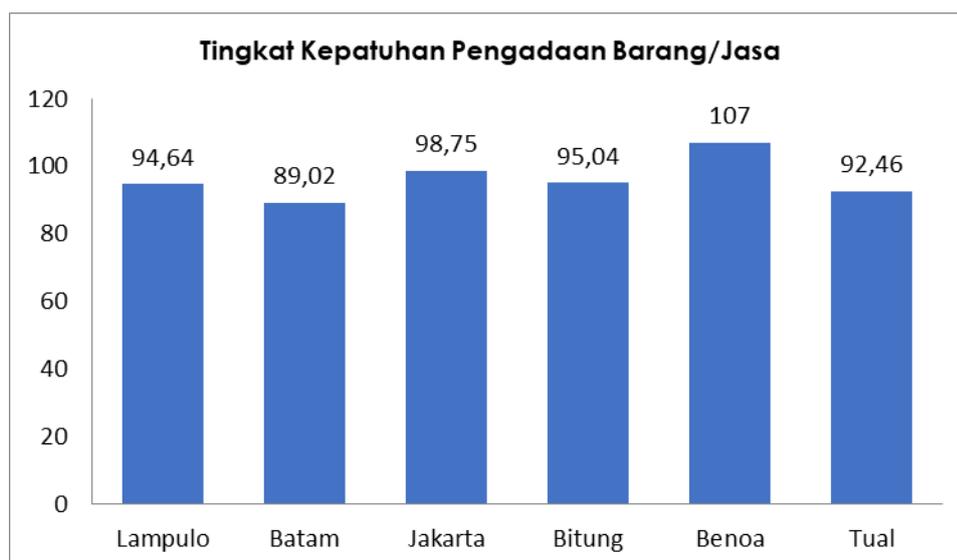
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa target IK Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo sebesar 80, sedangkan target RPJMN pada tahun 2024 sebesar 75,35. Nilai target tahunan lebih tinggi dibandingkan dengan target pada RPJMN. Capaian pada tahun 2024 telah memenuhi target, baik target tahunan, maupun target pada RPJMN.

Realisasi IK 23:“Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi pada tahun – tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo					
Perbandingan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	-	72,50	75	77,5	80
Capaian	-	100	83,75	98,75	94,64
% Realisasi	-	120%	111,67%	120%	118,3%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui target IK tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang tertinggi yaitu pada tahun 2024 dengan nilai sebesar 80. Capaian pada tahun 2024 lebih rendah dari tahun sebelumnya, namun telah dapat memenuhi target tahunan.

Capaian Realisasi IK 23:“Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada tahun 2024, dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa capaian tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa dengan nilai tertinggi diperoleh Pangkalan PSDKP Benoa, sedangkan nilai terendah diperoleh Pangkalan PSDKP Batam. Capaian dari ke-enam UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP telah memenuhi target tahunan dengan nilai 80.

Capaian Realisasi IK 23: “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada tahun 2024 mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada IKU tersebut, antara lain:

1. Terdapat monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala; dan
2. Telah terdapat digitalisasi dalam pengadministrasian dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Pangkalan PSDKP Lampulo.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target, yaitu dibutuhkan fungsional PBJ di Pangkalan PSDKP Lampulo untuk mendukung percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Faktor penunjang yang dapat memaksimalkan pencapaian target, yaitu :

1. Dukungan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan aturan
2. Evaluasi berkala dalam pencapaian yang dilakukan pembina teknis Eselon I PSDKP

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 23 sebesar Rp 150.000.000,00. Sampai dengan tahun 2024, anggaran telah terserap sebesar Rp 150.000.000,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 100%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

IK 24: “Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Target IKPA Tahun 2024 ditentukan nilai sebesar 93,76 (nilai). Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

- a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- b. Baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA < 95 ;
- c. Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 ; atau
- d. Kurang, apabila nilai IKPA > 70

Pemenuhan Konversi Bobot Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), dapat dikategorikan:

- ✓ Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- ✓ Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Hasil pengukuran IK 24: “Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2024		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	93,76	94,99	101,31%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui target pada IK 24: “Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” dengan nilai sebesar 93,76 telah tercapai nilai sebesar 94,99 maka diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 101,31%.

Capaian IK 24: “Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada tahun 2024, dibandingkan dengan target RPJMN disajikan pada tabel berikut:

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo							
Perbandingan	TARGET RPJMN					TARGET 2024	REALISASI 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
Target	-	89	89	90	90	93,75	94,99

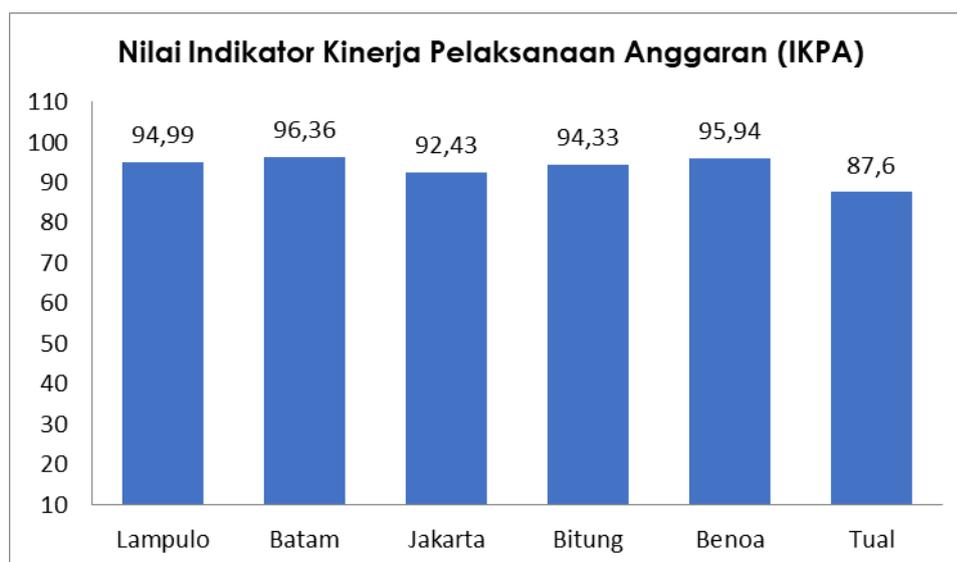
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa target nilai IKPA pada tahun 2024 sebesar 93,75 sedangkan target RPJMN pada tahun 2024 sebesar 90. Target nilai IKPA tahunan lebih tinggi dibandingkan dengan target pada RPJMN. Capaian nilai IKPA tahun 2024 sebesar 94,99 telah memenuhi target, baik target tahunan maupun target pada RPJMN.

Capaian IK 24: “Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun – tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo					
Perbandingan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	88	89	89	93,75	93,75
Capaian	82,6	90,78	95,27	93,52	94,99
% Realisasi	93,25%	102%	107,04%	99,75%	101,31%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa target nilai IKPA pada tahun 2023 dan 2024 sama, yaitu 93,75. Capaian pada tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan telah memenuhi target tahunan.

Capaian IK 24: “Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain, disajikan pada grafik berikut:



Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa nilai IKPA tertinggi diperoleh Pangkalan PSDKP Batam, sedangkan nilai IKPA terendah diperoleh Pangkalan PSDKP Tual. Dari ke-enam UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP, Pangkalan PSDKP Tual masih belum memenuhi target tahunan.

Rincian hasil pengukuran nilai IKPA Pangkalan PSDKP Lampulo pada tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	001	032	065135	PANGKALAN PSDKP LAMPULO	Nilai	100.00	80.11	93.04	100.00	100.00	93.61	100.00	94.99	100%	0.00	94.99
					Bobot	10	15	20	10	10	25					
					Nilai Akhir	10.00	12.02	18.61	10.00	10.00	9.36	25.00				
					Nilai Aspek	90.06		96.66				100.00				

Capaian IK 24: “Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada tahun 2024 mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada IKU tersebut, antara lain:

1. Penyusunan perencanaan telah berbasis manajemen Risiko mulai proses penganggaran;
2. Dilakukan kontrol capaian secara berkala setiap triwulan; dan
3. Komunikasi yang baik dengan seluruh pengelola keuangan

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target, yaitu terdapat tantangan pelaksanaan kegiatan dengan adanya penyesuaian nilai anggaran pada akhir tahun 2024.

Faktor penunjang yang dapat memaksimalkan pencapaian target, antara lain:

1. Dukungan Pimpinan dalam pengendalian IKPA secara berkala; dan
2. Dilakukan supervisi dan pendampingan setiap pelaksanaan kegiatan yang berpotensi meningkatkan deviasi pencapaian IKPA.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 24 sebesar Rp 73.463.000,00. Sampai dengan tahun 2024, anggaran telah terserap sebesar 73.463.000,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 100%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

IK 25: “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun

rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

- a. Sangat Baik, apabila $NKA > 90$;
- b. Baik, apabila $NKA > 80 - 90$;
- c. Cukup, apabila $NKA > 60 - 80$;
- d. Kurang, apabila $NKA > 50 - 60$;
- e. Sangat Kurang, apabila ≤ 50

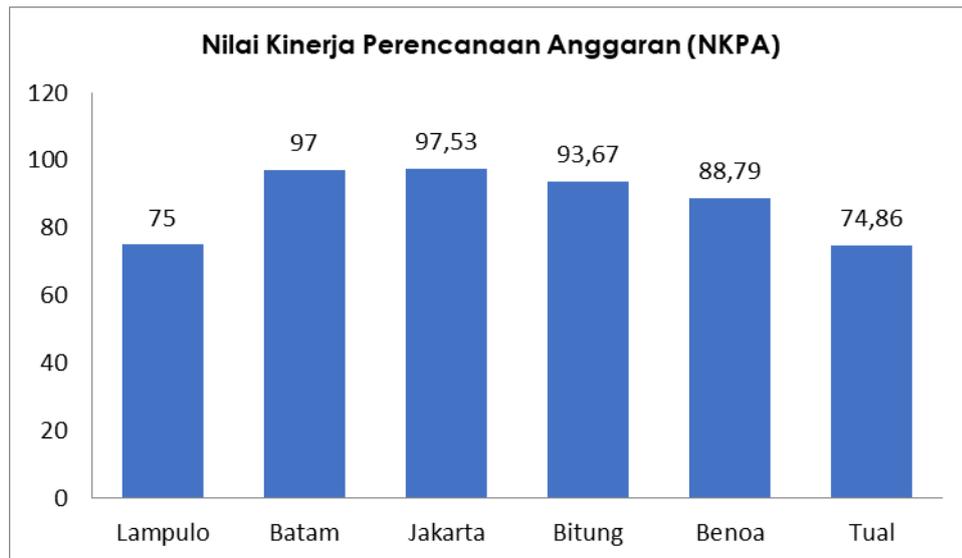
Hasil pengukuran IK 25: “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2024		
	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	71	75	105,63%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui target pada IK 25: “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” dengan nilai sebesar 71, telah tercapai nilai sebesar 75, maka diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 105,63%.

IK 25: “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” merupakan indikator baru yang digunakan pada tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target RPJMN, juga tidak dapat dibandingkan realisasinya dengan tahun – tahun sebelumnya.

Capaian IK 25: “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada tahun 2024, dibandingkan dengan realisasi dari UPT lain disajikan pada grafik berikut:



Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa hasil pengukuran nilai kinerja perencanaan anggaran (NKPA) tertinggi diperoleh Pangkalan PSDKP Jakarta, sedangkan NKPA terendah diperoleh Pangkalan PSDKP Tual. Dari ke-enam UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP, Pangkalan PSDKP Tual masih belum memenuhi target tahunan.

Rincian NKPA Pangkalan PSDKP Lampulo pada tahun 2024, disajikan pada tabel berikut:

No	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	060123	PANGKALAN PSDKP LAMPULO	75,00	94,99	85,00

Capaian IK 25: “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” pada tahun 2024 mengalami keberhasilan pencapaian target. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target pada IKU tersebut, antara lain:

1. Penyusunan perencanaan telah berbasis manajemen Risiko mulai Ratekan sampai Finalisasi;
2. Dilakukan kontrol capaian secara berkala setiap triwulan; dan
3. Komunikasi yang baik dengan seluruh pengelola keuangan.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target, yaitu terdapat penyesuaian perencanaan yang telah ditetapkan sesuai dengan refocusing kegiatan pada saat berjalanya tahun anggaran.

Faktor penunjang yang dapat memaksimalkan pencapaian target, yaitu :

1. Dukungan Pimpinan dalam perencanaan yang berbasis data dukung sesuai kebutuhan; dan
2. Dilakukan supervisi dan pendampingan Eselon I dan APIP dalam penyusunan anggaran.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK 25 sebesar Rp 13.873.301.000,00. Sampai dengan tahun 2024, anggaran telah terserap sebesar Rp 13.447.052.078,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 96,93%. Data diperoleh dari Aplikasi SAKTI.

C. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Pangkalan PSDKP Lampulo tahun anggaran 2024 sebesar Rp 31.315.530.000,00 (Tiga Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah). Sampai dengan 31 Desember 2024, anggaran telah terserap sebesar Rp 31.022.620.640,00 (Tiga Puluh Satu Miliar Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah). Persentase realisasi anggaran diperoleh sebesar 100%. Data tersebut diambil dari Penyerapan Anggaran pada Aplikasi SAKTI.

Rincian realisasi anggaran dan perkembangan realisasi anggaran sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.28. Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2024

Kode	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2350	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	13.406.146.000	13.406.042.582	100%
2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	630.700.000	630.587.910	99,98%
2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	989.500.000	989.479.674	100%
2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	1.6498.222.000	1.497.977.169	99,98%
2355	Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	14.498.812.000	14.498.533.305	100%
Jumlah		31.315.530.000	31.022.620.640	100%

D. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya adalah pemanfaatan sumber daya ekonomi yang minimal untuk perbaikan proses sehingga menghasilkan output yang maksimal. Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin.

Pangkalan PSDKP Lampulo selama tahun 2024 telah menyelesaikan anggaran yang diamanatkan dengan capaian nilai kinerja organisasi sebesar 105,33 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 31.022.620.640,00 (100%). Penghitungan efisiensi atas kinerja dapat mengacu pada perhitungan efisiensi pada aplikasi SMART Kemenkeu yang mana Pangkalan PSDKP Lampulo memiliki nilai Efisiensi SBK sebesar 76,6. Nilai Efisiensi disajikan pada grafik berikut:



Pangkalan PSDKP Lampulo telah menerapkan prinsip efisiensi sumberdaya yaitu, dengan anggaran yang ada dan memperoleh capaian kinerja yang optimal. Adapun upaya yang telah dilaksanakan Pangkalan PSDKP Lampulo, antara lain:

1. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dengan mengutamakan asas prioritas dan melakukan penggabungan kegiatan yang dapat dilaksanakan secara bersamaan, sehingga output yang didapat optimal dengan anggaran yang terbatas;
2. Melakukan perhitungan kembali atas penyimpangan anggaran, sehingga dapat memenuhi target yang dicapai;
3. Melakukan optimalisasi kegiatan pengawasan maupun operasi seperti penggabungan kegiatan pengawasan yang memiliki rentang kendali jauh sehingga dapat dilaksanakan bersamaan dengan gelar operasi;

4. Melakukan internalisasi terkait kemampuan SDM dalam pelaksanaan kegiatan, seperti pendelegasian Pengawas Perikanan, Polsus PWP3K, PPNS, dalam kegiatan bimbingan teknis ataupun penguatan kapasitas pegawai agar dapat meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas; dan
5. Pangkalan PSDKP Lampulo telah melaksanakan kegiatan core value ASN Ber-Akhlak kepada para pegawai sebagai wujud peningkatan kapasitas ASN.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dari hasil penyusunan Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2024, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pangkalan PSDKP Lampulo berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra KKP, Renstra Ditjen. PSDKP, dan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP (sebagai pemberi amanah) dengan Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo (sebagai penerima amanah) sebagai acuan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.
2. Sejalan dengan perkembangan kebijakan dan reformasi birokrasi di KKP, Ditjen. PSDKP telah menetapkan 11 Indikator Kinerja Utama dan 14 Indikator Kinerja Manajerial pada UPT Pangkalan PSDKP Lampulo yang melekat pada 8 (sepuluh) Sasaran Kegiatan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
3. Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 UPT Pangkalan PSDKP Lampulo memberikan gambaran terhadap capaian kinerja selama tahun 2024 sebagai bahan evaluasi dan rencana tindak lanjut dalam rangka pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas capaian kinerja tahun 2024, sebagai upaya peningkatan kinerja berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

Tabel 4.1. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2024

No.	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
1.	Melakukan rapat terkait monitoring dan evaluasi capaian kinerja pada setiap triwulan	Melakukan rapat terkait monitoring dan evaluasi capaian kinerja pada setiap triwulan
2.	Perlu adanya lebih banyak usulan Diklat, Workshop, dan Seminar bagi ASN Pangkalan PSDKP Lampulo.	Mengusulkan pegawai Pangkalan PSDKP Lampulo agar mengikuti Diklat, Workshop dan Seminar bagi ASN Pangkalan PSDKP Lampulo.
3.	Perlu adanya peningkatan keaktifan pegawai yang terdaftar pada Aplikasi Colaboration Office untuk berbagi informasi kegiatan pengawasan SDKP dengan kaidah 5W+1H.	Memberikan informasi rutin pada Aplikasi Colaboration Office melalui laman http://portal.kkp.go.id dengan memenuhi kaidah 5W+1H.
4.	Perlu meningkatkan pengetahuan pegawai Pangkalan PSDKP Lampulo	Melakukan kegiatan <i>Sharing Session</i> bagi pegawai Pangkalan PSDKP Lampulo yang telah mengikuti diklat, seminar, maupun bimbingan teknis



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON: (021) 3519070 FAKSIMILE: (021) 3520346
WEBSITE: www.djpsdkp.kkp.go.id EMAIL: ditiensdkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMPULO**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sahono Budianto

Jabatan : Kepala Pangkalan Pengawasan SDKP Lampulo

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Pung Nugroho Saksono

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Desember 2024

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Lampulo

Sahono Budianto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMPULO**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
KEGIATAN 1. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN				
SK1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (Indeks)	81
SK2	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif	2	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (Indeks)	91
		3	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (Indeks)	91
		4	Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas (%)	100
SK3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	5	Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100
		6	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN				
SK4	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	7	Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	100
KEGIATAN 3. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN				
SK5	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	8	Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	100
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
SK6	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas	9	Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	80
		10	Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	80
SK7	Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang berkualitas	11	Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (Indeks)	93
KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DJEN. PSDKP				
SK8	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	12	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pangkalan PSDKP Lampulo (Nilai)	75

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
13		Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	100
14		Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (Nilai)	70
15		Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (Indeks)	82
16		Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Lampulo (Nilai)	84
17		Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
18		Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	70
19		Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Lampulo (Inovasi)	1
20		Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan publik lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (Indeks)	80
21		Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	94
22		Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	80
23		Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	80
24		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (Nilai)	93,76
25		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (Nilai)	71

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	13.777.648.000
2	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	645.000.000
3	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	1.101.500.000
4	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	1.730.000.000
5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	14.565.051.000
Total Anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2024		31.819.199.000

Jakarta, 27 Desember 2024

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Lampulo



Sahono Budiarto



RENCANA STRATEGIS PANGKALAN PSDKP LAMPULO

Periode 2020-2024



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Kondisi Umum.....	5
1.3 Potensi dan Permasalahan	10
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN KEMENTERIAN/LEMBAGA.....	13
2.1 Visi dan Misi Kementerian/Lembaga	13
2.2 Visi, Misi dan Tujuan Pangkalan PSDKP Lampulo.....	14
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis	14
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	16
3.1 Arah Kebijakan.....	16
3.2 Kerangka Regulasi dan kelembagaan.....	20
BAB IV INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	23
4.1 Target Kinerja	23
4.2 Kerangka Pendanaan	26
BAB V PENUTUP.....	27



Kata Pengantar

Renstra Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan tugas dan fungsi serta berdasarkan analisis lingkungan strategis, tantangan dan isu strategis pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan 5 (lima) tahun ke depan yang memuat analisis lingkungan strategis yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan serta target kinerja beserta kebutuhan pendanaan tahun 2020-2024.

Dengan ditetapkannya Renstra ini, maka harus menjadi pedoman bagi seluruh satuan kerja (Satker) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan evaluasi kinerja setiap tahun mulai tahun 2020 sampai 2024.

Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan Lampulo




Basri, A.Pi, M.Si

Nip. 19750713 199803 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2), telah mengamanatkan kepada pimpinan Kementerian Negara/Lembaga untuk menyiapkan Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra K/L) sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang bersifat indikatif. Hal ini bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sehingga tercapai penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan berkeadilan. Sedangkan Rencana Strategis (Renstra) Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo Tahun 2020-2024 merupakan bagian integral dari Renstra Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo Tahun 2020-2024 yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Indonesia merupakan negara kepulauan jika dilihat berdasarkan Nawa Cita (Sembilan Agenda) dan strategi pembangunan nasional pada RPJMN 2020-2024, urusan kelautan dan perikanan memiliki kaitan erat dengan salah satu dari 3 Dimensi Pembangunan Nasional, yaitu: Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan yang merupakan penjabaran dari Nawa Cita Pertama: Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; Nawa Cita Keempat: Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; serta Nawa Cita Keenam: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Sedangkan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berkaitan erat dengan Nawa Cita Pertama dan Keempat.

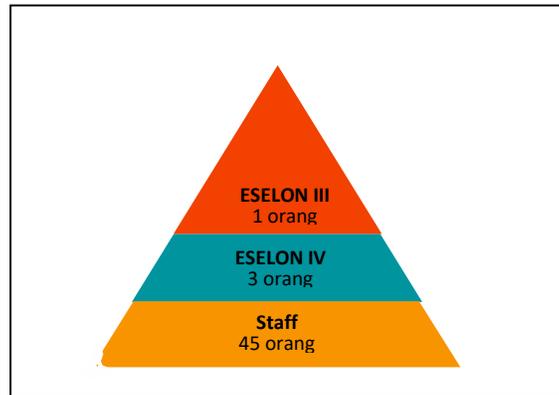
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau di Indonesia kurang lebih 17.504, dan yang sudah dibakukan dan didaftarkan ke PBB sejumlah 16.056 pulau. Luas perairan Indonesia adalah 6,4 juta km² yang terdiri dari luas laut teritorial 0,29 juta km², luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan 3,11 juta km², dan luas ZEE Indonesia 3,00 juta km². Selain itu Indonesia memiliki luas Zona Tambahan perairan 0,27 juta km², luas landas kontinen 2,8 juta km² dan panjang garis pantai 108.000 km (Kemenko Maritim, 2018) sebagaimana Gambar 1.

Sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan alam sangat besar dan beragam, baik berupa SDA terbarukan (perikanan, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, rumput laut, dan produk bioteknologi), SDA tak terbarukan (minyak, gas bumi, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya), energi kelautan (seperti pasang-surut, gelombang, angin, OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion), maupun jasa-jasa lingkungan kelautan dan pulau-pulau kecil untuk pariwisata bahari, transportasi laut, dan sumber keragaman hayati serta plasma nutfah. Kekayaan alam tersebut menjadi salah satu modal dasar yang harus dikelola dengan optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Salah satu aspek pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan adalah "Pengawasan" yang memiliki peran utama dalam memastikan bahwa pemanfaatan atau eksploitasi sumber daya tersebut dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan tata kelola yang telah ditetapkan. Di samping itu, pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan juga berperan dalam mencegah terjadinya pencurian atau pemanfaatan secara illegal oleh pihak-pihak di luar pemangku kepentingan (stakeholders) kelautan dan perikanan Indonesia.



Gambar 1. Peta Perairan Indonesia

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan, Pangkalan PSDKP Lampulo, memiliki area pengawasan meliputi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI 572) didukung oleh 90 (Sembilan puluh orang pegawai) yang terdiri dari 49 (Empat puluh Sembilan) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 41 (Empat puluh satu) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dari tingkat pejabat eselon III sampai dengan pelaksana/staf (Gambar 2). Jumlah ini tentu di luar ASN Daerah pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, terdapat 11 (Sebelas) ASN yang memiliki kewenangan khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Sedangkan pelaksana/staf terdiri dari: 15 (lima belas) JFT pengawas perikanan, 11 Awak Kapal Pengawas (AKP PNS) 2 Awak Kapal Pengawas (PPNPN), 30 (tiga puluh) Pejabat Fungsional Umum, dan 15 (lima belas) Pejabat Fungsional Tertentu.



Gambar 2. Komposisi ASN Pangkalan PSDKP Lampulo

Dari segi kuantitas, tentu jumlah tersebut masih jauh dari cukup untuk mengawasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di seluruh wilayah WPPNRI 572. Kemudian dalam hal kompetensi, pada dasarnya seluruh ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo telah memiliki kompetensi dasar sesuai dengan bidang kewenangannya masing-masing namun seiring dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan dan tantangan di lingkungan strategis tentu peningkatan kompetensi ASN Pangkalan PSDKP Lampulo secara terus-menerus harus menjadi salah satu agenda utama sebagai modalitas yang menopang pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP.

Secara kelembagaan, Pangkalan PSDKP Lampulo memiliki 1 (satu) Kepala Pangkalan dan 3 (tiga) Kepala Seksi yang terdiri dari: Subag Tata Usaha, Seksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran, dan Seksi Sarana dan Prasarana. Satuan Pengawasan Pangkalan PSDKP Lampulo tersebar di sepanjang pantai barat Sumatera terdiri dari: Satuan Pengawasan SDKP Aceh Barat, Satuan Pengawasan SDKP Simeulue, Satuan Pengawasan SDKP Sibolga, Satuan Pengawasan SDKP Padang, dan Satuan Pengawasan SDKP Bengkulu.

Sarana dan prasarana Pangkalan PSDKP Lampulo terdiri dari 1 (satu) unit kapal pengawas perikanan dan 5 (lima) unit Speed Boat.

Distribusi kapal pengawas perikanan yaitu: 1 (satu) unit kapal pengawas Tipe C dioperasikan menyisir perairan WPPNRI 572, dan speed boat lebih kecil dioperasikan di 3 (tiga) Satwas dan UPT Pangkalan PSDKP Lampulo. Kemudian prasarana yang

sangat diandalkan dalam melakukan pemantauan kapal-kapal ikan adalah Pusat Pengendalian Regional Monitoring Center (RMC) yang berada di Satwas SDKP Sibolga. Pengoperasian Pusdal mengintegrasikan data dari Vessel Monitoring System (VMS), sehingga diperoleh informasi yang bermanfaat baik dalam hal pengambilan keputusan maupun dalam hal operasi pencegahan (intercept) oleh armada kapal pengawas.

1.2 Kondisi Umum

Pada periode Renstra Pangkalan PSDKP Lampulo tahun 2017-2019 sektor pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan memegang peranan strategis dalam mendukung 3 [tiga] pilar pembangunan kelautan dan perikanan khususnya dalam penegakan kedaulatan [soverignity] pembangunan kelautan dan perikanan dalam pemberantasan dan penanggulangan IUU Fishing.

Capaian utama program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2015-2019 merupakan pilar strategis yang menjadi fondasi untuk pelaksanaan program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan periode RPJMN ke-3 tahun 2017-2019, capaian-capaian tersebut sebagai berikut :

1. Peningkatan operasional pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan

- a. Pemantauan Kapal perikanan

Kebijakan pemantauan kapal perikanan diwajibkan bagi semua kapal perikanan yang berukuran di atas 30 GT, kapal perikanan tersebut dipasang transmitter VMS yang terintegrasi dengan pusat pemantauan kapal perikanan. Pemasangan transmitter online ini merupakan tools bagi pemerintah untuk mengontrol kegiatan/aktivitas kapal perikanan di laut agar sejalan dengan konsep pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab.

- b. Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan

Salah satu kunci keberhasilan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan adalah tersedianya sarana dan prasarana pengawasan yang mencukupi, sampai

dengan tahun 2019 kinerja pengembangan sarana dan prasarana pengawasan yang dicapai sebagai berikut:

1) Armada Kapal Pengawas

Kapal pengawas merupakan sarana pengawasan yang berfungsi untuk pengawasan secara langsung di laut. Kapal pengawas harus mampu beroperasi pada rentang jarak (range) tertentu dan daya jelajah (endurance) pada rentang waktu tertentu disamping memiliki ketetapan deteksi, oleh gerak (manuver) serta strategi operasi mandiri.

2) Pembangunan Prasarana Pengawasan

Pembangunan prasarana pengawasan yang dilaksanakan sampai tahun 2019 yaitu pembangunan fasilitas sarana dan prasarana kantor UPT Pengawasan SDKP, pos pengawasan, ruang tahanan (detention center), mess ABK, mess operator dan prasarana pengawasan lainnya.

3) Sarana Pengawas perikanan

Pengadaan sarana pengawas perikanan sampai dengan tahun 2019 yaitu Pengadaan kendaraan roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) sebagai sarana mobilisasi dan pelaksanaan tugas di lapangan.

2. Peningkatan Operasional Pengawasan sumber daya perikanan

1) Pengawasan Ketaatan Kapal Perikanan

Pengawasan ketaatan kapal perikanan bertujuan untuk memastikan bahwa kapal-kapal perikanan telah mentaati ketentuan peraturan dibidang penangkapan ikan. Pengawasan penangkapan ikan dilakukan sebagai upaya tindakan pencegahan [preventif] kegiatan penangkapan ikan illegal, kegiatan pengawasan tersebut dilakukan sebelum operasi penangkapan [before fishing], pada saat pendaratan [during landing] dan setelah pendaratan [post landing].

2) Pengawasan Usaha Budidaya Perikanan

Pengawasan usaha budidaya ikan bertujuan untuk memastikan bahwa usaha budidaya perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang perikanan. Hasil pengawasan usaha budidaya perikanan Pada tahun 2017 sebanyak 46 unit usaha

budidaya telah dilakukan verifikasi pengawasan, tahun 2018 sebanyak 25 unit usaha, dan tahun 2019 sebanyak 25 unit usaha, telah dilakukan verifikasi dan pengawasan.

3) Pengawasan usaha pengolahan dan pengangkutan, pemasaran Hasil Perikanan
Hasil pengawasan usaha pengolahan dan pengangkutan, pemasaran hasil perikanan pada tahun 2017 yaitu telah dilakukan verifikasi dan pengawasan usaha pengolahan dan pengangkutan, pemasaran hasil perikanan sebanyak 48 unit usaha, tahun 2018 difokuskan pada pengawasan Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala besar dan kecil sebanyak 23 unit, dan tahun 2019 difokuskan kembali pada pengawasan Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala besar dan kecil sebanyak 25 unit dari hasil pengawasan tersebut telah ditindaklanjuti dengan proses penegakan peraturan terkait dengan pelanggaran atas izin yang diberikan.

4) Pemberdayaan dan Pembinaan POKMASWAS

Dengan keterbatasan jumlah SDM pengawasan yang ada saat ini, melihat potensi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan memberikan andil besar, hal tersebut mendorong Pangkalan PSDKP Lampulo untuk melakukan pemberdayaan seluruh lapisan masyarakat agar berpartisipasi dalam pengawasan SDKP. Upaya tersebut melalui peningkatan antusiasme masyarakat untuk membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dikembangkan melalui program Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISWASMAS).

Peran dan fungsi POKMASWAS selama ini cukup efektif untuk memberikan informasi yang akurat atas pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang disampaikan ke aparat penegak hukum. Sampai dengan tahun 2019 telah terbentuk sebanyak 119 kelompok, sebanyak 119 kelompok yang tersebar di seluruh lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo. Upaya yang dilakukan dalam rangka mengembangkan Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISWASMAS) yaitu melalui pemberian sarana dan prasarana kepada POKMASWAS, serta bimbingan teknis dan sosialisasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

3. Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan

1) Pengawasan ekosistem perairan dan kawasan konservasi perairan

Selama kurun waktu tahun 2017-2019 telah dilakukan pengawasan ekosistem perairan terkait dengan penggunaan bahan peledak dan beracun, potasium dan bahan berbahaya lainnya dalam kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan di WPPNRI 572. Hasil pengawasan ekosistem perairan dan kawasan konservasi perairan tahun 2017 - 2019 sebagai berikut:

2) Pengawasan Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Hasil pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil diperoleh data dan informasi adanya tambang pasir besi, perubahan alih fungsi lahan mangrove menjadi pertambakan, penebangan mangrove, penambangan karang dan penambangan pasir besi yang menyebabkan sedimentasi dan kerusakan terhadap ekosistem perairan. Tindak lanjut dan rekomendasi hasil pengawasan tersebut telah disampaikan ke Instansi yang berwenang dan Pemerintah Daerah untuk ditindak lanjuti.

3) Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya Non Hayati

Pengawasan jasa kelautan dan sumber daya non hayati meliputi pengawasan pemanfaatan pasir laut, aktivitas bahari dan sumber daya non hayati, serta pengawasan pengelolaan BMKT yang legal atau telah mendapat ijin dari pihak berwenang, pengawasan pengelolaan BMKT.

4. Peningkatan Operasional dan pemeliharaan kapal pengawas

a. Operasi penanggulangan IUU Fishing

Dalam periode tahun 2017-2019 telah dilakukan operasi penanggulangan IUU Fishing melalui kegiatan operasi kapal di laut. Tujuan operasi kapal pengawas yaitu memastikan bahwa selama kegiatan penangkapan ikan [while fishing] telah mematuhi [compliance] terhadap ketentuan dan perijinan yang diberikan serta mencegah dan menanggulangi kegiatan IUU Fishing.

b. Kerjasama operasi pengawasan

Selain operasi mandiri, Pangkalan PSDKP Lampulo melakukan kerjasama operasi pengawasan dengan instansi terkait yaitu TNI-AL, POLAIR, dan

BAKORKAMLA. Operasi tersebut dilakukan di perairan perbatasan ZEEI yang dianggap rawan pelanggaran.

c. Pembinaan dan pengembangan karier awak kapal pengawas

Pembinaan dan pengembangan karir awak kapal pengawas dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan kemampuan Awak Kapal Pengawas baik dasar atau lanjutan. Sejak tahun 2017 - 2019 Awak Kapal Pengawas yang telah diberikan pelatihan sebanyak 4 orang.

5. Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

Penanganan tindak pidana pelanggaran bertujuan untuk menegakkan atas pelanggaran dibidang kelautan dan perikanan, disamping itu penanganan pelanggaran dapat memberikan efek jera. Ruang lingkup penanganan pelanggaran yaitu sampai pada tahap P-21 [berkas dinyatakan lengkap].

Kebijakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan Indonesia bebas illegal fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan. Sejalan dengan kebijakan tersebut Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 /PERMEN-KP/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan maka Pangkalan PSDKP Lampulo memiliki tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelayanan penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan;
- b. Pelayanan penerbitan Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan (LVHPI).

Fungsi pelayanan tersebut tentu sejalan dengan persiapan sistem kinerja yang direncanakan dengan efektif seperti capaian kinerja tahun 2019 yang secara garis besar Pangkalan PSDKP Lampulo dapat memenuhi seluruh target yang ditetapkan dan mendapatkan notifikasi berwarna hijau.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori sangat baik dengan rata-rata capaian keseluruhan indikator sebesar 104,64%. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP dicapai 110,00%;
2. Sasaran Strategis 2 Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan SDKP secara profesional dan partisipatif dicapai 110,91%;
3. Sasaran Strategis 3 Tersedianya infrastruktur pengawasan SDKP dan sistem informasi dan komunikasi pengawasan SDKP dicapai 100,00 %.
4. Sasaran Strategis 4 Terwujudnya ASN Pangkalan PSDKP Lampulo yang kompeten profesional dan berintegritas dicapai 88,19 %
5. Sasaran Strategis 5 Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses dicapai 102,41%.
6. Sasaran Strategis 6 Terwujudnya birokrasi Pangkalan PSDKP Lampulo yang efektif efisien dan berorientasi pada layanan prima dicapai 102,38 %.
7. Sasaran Strategis 7 Terkelolanya anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo secara efisien dan akuntabel dicapai 100,88 %.

Penyusunan rencana strategis Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2019 - 2024, mengacu kegiatan yang mendukung program prioritas nasional untuk penanggulangan Illegal, Unregulated and Unreported Fishing .

1.3 Potensi dan Permasalahan

Sebagai gambaran umum bahwa meskipun KKP sejak lahirnya pada tahun 2000 senantiasa memiliki komitmen yang kuat dalam pemberantasan IUU fishing namun praktik-praktik ini masih marak terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) baik dalam bentuk pencurian ikan oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA) maupun penangkapan ikan dengan cara merusak (destructive

fishing) dan tidak sesuai ketentuan oleh kapal-kapal perikanan Indonesia (KII) ditambah lagi dengan kompleksitas pemanfaatan sumber daya kelautan yang memberi dampak eksternalitas bagi sumber daya ikan dan lingkungannya. Hal ini tentu memberikan kerugian yang sangat nyata bagi Indonesia baik dalam aspek sosial, ekologi/lingkungan, maupun ekonomi.

Kerugian secara sosial tercermin dari masih sering terjadinya konflik horizontal antar nelayan di beberapa daerah, seperti: Lampung, Sumatera Utara, pantai selatan Jawa, pantai utara Jawa, perairan Masalembo, Bali, NTT, Jambi, dan beberapa daerah lain yang sebagian besar terkait dengan operasional nelayan andon. Upaya yang se lama ini dilakukan oleh aparaturng Pangkalan PSDKP Lampulo bersama pemerintah daerah dengan melibatkan tokoh masyarakat adalah melalui mediasi dan pendekatan persuasif.

Kerugian secara ekologi/lingkungan dari praktik IUU fishing dan kegiatan yang merusak adalah menurunnya potensi sumber daya ikan dan kualitas lingkungan sumber daya ikan. Belum ada perhitungan secara ilmiah terhadap kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya akibat praktik IUU fishing dan kegiatan yang merusak namun hal ini dapat dibuktikan secara terbalik bahwa ketika praktik-praktik tersebut ditekan dan dikendalikan maka terjadi kemelimpahan potensi sumber daya ikan. Laporan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) pada High Level Panel (HPL) for Sustainable Ocean Economy-Regional Sherpas Meeting tahun 2019 di Canberra, Australia menyatakan bahwa Stok Ikan Indonesia sebesar 7,3 juta ton pada tahun 2015 meningkat menjadi 12,54 juta ton pada tahun 2017 dan 13,1 juta ton pada tahun 2018 (news.kkp.go.id).

Selain itu masalah perbatasan laut merupakan salah satu kendala dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan mengingat kasus pencurian ikan masih marak terjadi di wilayah perairan perbatasan seperti, Laut Natuna sebelah utara, Laut Sulawesi sebelah utara, dan Selat Malaka yang masih terdapat unresolved area dengan negara tetangga. Hal ini menjadikan kasus perikanan di wilayah perbatasan akan terus menjadi tantangan tersendiri.

Seluruh potensi dijadikan modal untuk mendukung keberhasilan visi dan misi Pangkalan PSDKP Lampulo kedepan yang dalam penerapannya akan menemukan beberapa tantangan dan permasalahan diantaranya:

- Kegiatan IUU fishing oleh Kapal Ikan Asing [KIA] dan Kapal Ikan Indonesia [KII] yang masih banyak terjadi di wilayah perairan Indonesia;
- Usaha penangkapan budidaya perikanan tidak sesuai dengan ketentuan dan izin yang berlaku;
- Kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dengan cara merusak (destructive fishing);
- Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan cara merusak dan tidak sesuai dengan ketentuan;
- Sumber daya manusia (SDM) pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan masih terbatas;
- Sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan masih terbatas;
- Tata kelola pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan belum optimal;
- Teknologi informasi dan komunikasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegrasi belum tersedia;
- Penegakkan hukum (law enforcement) belum konsisten;
- Pemberdayaan PPNS Perikanan, Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K belum optimal.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

2.1 Visi dan Misi Kementerian/Lembaga

Visi KKP 2020-2024 yang ditetapkan adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rangka mewujudkan Visi KKP 2020-2024 maka ditetapkan Visi Direktorat Jenderal PSDKP 2020-2024, yaitu: “Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Misi KKP 2020-2024, yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan;
- 2) Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
- 3) Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- 4) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan misi KKP 2020-2024 maka ditetapkan Misi Direktorat Jenderal PSDKP 2020-2024, adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi;
- 2) Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;

- 3) Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab;
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen. PSDKP.

2.2. Visi, Misi, dan Tujuan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo

- Visi

Visi pembangunan Kelautan dan Perikanan Pangkalan PSDKP Lampulo 2020-2024 yaitu “Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP di WPPNRI 572 yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

- Misi

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang telah ditetapkan, maka dirumuskan Misi Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2020-2024 :

- Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi;
- Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;
- Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab;
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo.

2.3 Tujuan, dan Sasaran Strategis Kegiatan

Sebagai penjabaran dari Visi Pangkalan PSDKP Lampulo maka dirumuskan beberapa Tujuan Pangkalan PSDKP Lampulo 2020-2024 yang dilengkapi dengan Sasaran Strategis berikut indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan bagian dari rumusan Tujuan pada Renstra Ditjen PSDKP tahun 2020-2024, yaitu:

- 1) Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui pencapaian Sasaran Strategis Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Meningkat dengan indikator kinerja Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) dari 59,16 pada tahun 2020 menjadi 63,87 pada tahun 2024. Ditjen. PSDKP dan Pangkalan PSDKP Lampulo mendukung secara tidak langsung terhadap pencapaian IKU IKMKP melalui kontribusi data Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP sebagai salah satu komponen pendukung pada formula perhitungan IKMKP, terutama pada aspek sosial-kelembagaan.
- 2) Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui pencapaian beberapa Sasaran Strategis, diantaranya:
 - a. Tata kelola SDKP bertanggung jawab dengan indikator kinerja Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, dari 94% pada tahun 2020 menjadi 98% pada tahun 2024;
 - b. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Integratif dengan indikator kinerja:
 - c. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing, dari 54,18% pada tahun 2020 menjadi 75% pada tahun 2024;
 - d. Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan, dengan target 93% dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- 3) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui pencapaian Sasaran Strategis Tatakelola Pemerintahan yang Baik dengan indikator kinerja berikut ini:
 - a. Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP dari 80 pada tahun 2020 menjadi 85 pada tahun 2024; dan
 - b. Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP dari 88 pada tahun 2020 menjadi 90 pada tahun 2024.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan

3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan SDKP

Arah kebijakan dan strategi pada dasarnya merupakan hasil dari analisis potensi dan permasalahan sehingga diperoleh rumusan solusi yang penting, mendesak dan memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian Sasaran Nasional, Sasaran Strategis K/L, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan.

KKP telah merumuskan 5 (lima) Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2020-2024 yang salah satunya diamanatkan kepada Ditjen. PSDKP dan diturunkan ke Pangkalan PSDKP Lampulo, yaitu: Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Di samping itu, terdapat pula arahan direktif Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Ditjen. PSDKP untuk terus menjadi garda terdepan dalam mengamankan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia melalui:

Penindakan tegas terhadap kapal perikanan asing (KIA) pelaku illegal fishing dan destructive fishing; dan

Pembinaan (penaatan) terhadap nelayan lokal.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 dan arahan direktif Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut, maka dirumuskan arah kebijakan dan rincian strategi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2020-2024, sebagai berikut:

- Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, dengan cara:
 - Membangun budaya kerja Pangkalan PSDKP Lampulo;
 - Mengembangkan kompetensi SDM Aparatur Pangkalan PSDKP Lampulo;
 - Membangun pola karir PNS Pangkalan PSDKP Lampulo;
 - Meningkatkan jumlah dan sebaran SDM Aparatur Pangkalan PSDKP Lampulo.

- Peningkatan kapasitas teknologi pemantauan, sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, dengan cara:
 - Membangun sarana pengawasan;
 - Membangun prasarana pengawasan yang memadai;
 - Meningkatkan pemeliharaan kapal pengawas agar siap operasional;
 - Mengembangkan kelembagaan pengawasan.
- Penguatan sinergi dengan penegak hukum (TNI AL, POLRI, Bakamla dan Instansi terkait lainnya), dengan cara:
 - Operasi bersama pengawasan di laut dan di darat (TNI AL, POLRI, Bakamla, Bea Cukai, KLHK);
 - Pertukaran data/informasi (intelijen, operasi);
 - Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
 - Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan;
 - Forum koordinasi tindak pidana perikanan (TNI AL, POLRI, Bakamla dan Kejaksaan Agung).
- Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dengan cara:
 - Memperkuat sinergitas dan harmonisasi pengawasan SDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor di tingkat Pusat;
 - Memelihara komitmen bersama dengan lembaga internasional dan regional dalam pemberantasan IUU fishing;
 - Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (preventif), pembinaan, penegakan hukum dengan pendekatan sanksi pidana sebagai pilihan terakhir (ultimum remedium);
 - Menerapkan metode auditing dalam pengawasan SDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan.

- Peningkatan kesadartahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP, dengan cara:
- Meningkatkan kesadartahuan masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab;
- Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain ;
- Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan SDKP melalui POKMASWAS;
- Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar.

3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian/Lembaga

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) di dalam dokumen Renstra Pangkalan PSDKP Lampulo 2020-2024 merupakan suatu bentuk upaya inovatif-adaptif di dalam penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi katalis untuk mempercepat pencapaian target sekaligus memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024, terdapat 4 (empat) pengarusutamaan, yaitu:

1) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pangkalan PSDKP Lampulo senantiasa berkomitmen dalam agenda memerangi IUU fishing sambil terus mengembangkan secara simultan indikator-indikator yang esensial dan operasional di lapangan. Berkaitan dengan indikator persentase kepatuhan pelaku usaha dan perikanan yang sudah tercantum baik di dalam RPJMN 2020-2024 maupun Renstra KKP 2020-2024, Pangkalan PSDKP Lampulo akan mengadopsi langsung sebagai indikator kinerja utama pada level program yang secara simultan terus melakukan pengembangan dalam hal metode pemeriksaan kepatuhan maupun metode pengukurannya sehingga dapat menggambarkan kondisi kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang sebenarnya.

2) Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, melalui strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan khususnya di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

3) Pendekatan Sosial Budaya

Pendekatan sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan lokal (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

Pembangunan kebudayaan ingin memastikan bahwa setiap individu maupun kelompok memperoleh perlindungan hak kebudayaan dan kebebasan berekspresi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Peningkatan pembangunan inklusif dan berwawasan budaya lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, diantaranya adalah (1) Pelaksanaan penyadartahuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab senantiasa memperhatikan nilai budaya, kearifan lokal dan keragaman SDA hayati, (2), Penumbuhan partisipasi masyarakat dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara inklusif dan terbuka (3) Pengembangan dan penguatan budaya kerja serta budaya organisasi lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dilakukan secara kolektif, adaptif, dan inovatif menggunakan berbagai pendekatan yang efektif dalam menjawab tantangan kompleksitas permasalahan pada lingkungan strategis.

4) Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan

transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand) dan pengelolaan big data.

Optimalisasi teknologi digital sebagai salah satu arus utama pada lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dilakukan melalui: (1) Optimalisasi peranan Regional Monitoring Center (RMC) Pangkalan PSDKP Lampulo dalam mengintegrasikan berbagai teknologi pemantauan jarak jauh terhadap seluruh aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menghasilkan informasi yang cepat dan akurat dalam mendukung setiap operasi pengawasan, (2) Pengembangan sistem pengelolaan data pengawasan sumber daya kelautan berbasis digital, (3) Pemanfaatan Information Technology Forensic (teknologi forensik digital) dan intelegent open source untuk pengembangan kasus tindak pidana kelautan dan perikanan (TPKP).

3.2 Kerangka Regulasi dan Kelembagaan

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2020-2024, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi untuk memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara.

Bahwa penyusunan program peraturan perundang-undangan di lingkungan KKP disusun berdasarkan program tahunan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri KP, selain itu penyusunan peraturan didasarkan pada kebutuhan strategis KKP dalam rangka pelaksanaan visi dan misi presiden 2020-2024 khususnya di sektor kelautan dan perikanan.

Untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang transparan, akuntabel, dan implementatif, maka diperlukan masukan dari masyarakat, pemangku kepentingan, pemerintah, dan/atau pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diperlukan uji publik atau konsultasi yang dalam hal ini dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan melibatkan para pakar yang tergabung dalam Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan.

Adapun mekanisme pelaksanaan dari konsultasi publik atau uji publik tersebut, yaitu setiap rancangan peraturan perundang-undangan yang berdampak kepada

masyarakat/publik terlebih dahulu harus disampaikan ke publik guna mendapatkan masukan/tanggapan.

Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, maka:

- a. dalam hal kebijakan berpotensi pada aspek perekonomian dan aspek penciptaan lapangan kerja, maka Kepala Pangkalan menyampaikan kebijakan tersebut kepada Direktur Jenderal PSDKP untuk mendapatkan pertimbangan sebelum kebijakan tersebut ditetapkan;
- b. dalam hal kebijakan berpotensi pada disharmonisasi kewenangan dan berpotensi pada tidak terlaksananya tugas dan fungsi kementerian/lembaga, maka menteri menyampaikan kebijakan tersebut secara tertulis kepada Direktur Jenderal PSDKP yang lingkup koordinasinya terkait dengan kebijakan tersebut untuk dibahas dalam Rapat Koordinasi guna mendapatkan kesepakatan; dan
- c. dalam hal kebijakan berpotensi pada stabilitas nasional, Kepala Pangkalan menyampaikan rencana kebijakan tersebut secara tertulis kepada Direktur Jenderal PSDKP guna mendapatkan keputusan.

Kerangka kelembagaan yang dimaksud merupakan perangkat Pangkalan PSDKP Lampulo (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsi Pangkalan PSDKP Lampulo yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024, Renstra KKP 2020-2024, dan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024.

Penataan kelembagaan Pangkalan PSDKP Lampulo akan disesuaikan dengan arahan Presiden terkait transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional. Penataan kelembagaan Pangkalan PSDKP Lampulo selanjutnya akan menyesuaikan dengan rencana redesign nomenklatur program dan kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kerangka kelembagaan dalam Renstra Pangkalan PSDKP Lampulo tahun 2020-2024 difokuskan untuk melaksanakan program/kegiatan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Kelembagaan yang dikembangkan dalam Renstra Pangkalan PSDKP Lampulo 2020-2024 harus tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses yang menekankan nilai *structure follow strategy*, dan diharapkan akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan. Adapun urgensi kerangka kelembagaan dalam dokumen perencanaan, diantaranya adalah mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

BAB IV

INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

SASARAN STRATEGIS [SS] DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA [IKU]		TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
SS 1. Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat						
1	Persentase tindak lanjut informasi pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	70				
SS 2. Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan						
2	Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo [pelaku usaha]	21				
3	Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	100				
SS 3. Terselenggaranya Pemantauan SDKP						
4	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	0,72				
5	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP	0.06				

	Lampulo (%)					
6	Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP (%)	70				
SS 4. Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP						
7	Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (unit)	1				
8	Jumlah speedboat yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (unit)	5				
SS 5. Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP						
9	Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas (unit)	90				
10	Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan speedboat (unit)	75				
11	Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (hari operasi)	90				
12	Jumlah hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (hari operasi)	35				
13	Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (orang)	13				

SS 6. Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan						
14	Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	100				
15	Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	93				
16	Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)	93				
SS 7. Tata kelola pemerintahan yang baik						
17	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo [Indeks]	72				
18	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup [%]	82				
19	Persentase Pemenuhan dokumen RB lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo [%]	100				
20	Persentase Pemenuhan dokumen SPIP lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo [%]	100				
21	Persentase Pemenuhan dokumen AKIP lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo [%]	100				

22	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan [Indeks]	80				
23	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	88				
24	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Pangkalan PSDKP Lampulo dibandingkan Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo TA. 2019 [%]	1				
25	Persentase pemenuhan layanan dukungan manajemen Satker lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo [%]	100				
26	Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo [%]	100				
27	Persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo [%]	100				

4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang kaitannya dengan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Pangkalan PSDKP Lampulo bersumber dari dana APBN yang direncanakan dengan mempertimbangkan luasan wilayah kerja dan beban kerja pengawasan SDKP yang ada dilapangan dan mengacu pada program kerja yang mendukung visi dan misi Kementerian/Lembaga.

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2020 - 2024 merupakan acuan bagi seluruh satuan pengawasan dan wilker pengawasan SDKP di lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran strategis Direktorat Jenderal PSDKP sehingga tercapai visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024. Reviu Rencana strategis dilakukan setiap tahun dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra. Hasil reviu Renstra ini adalah hasil perubahan Renstra yang telah ditetapkan sebelumnya, yang disusun dengan mempertimbangkan penetapan kinerja Ditjen PSDKP. Perubahan-perubahan yang terjadi pada Renstra dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa merubah sasaran kinerja agar tetap memiliki relevansi sebagai dokumen acuan pelaksanaan program pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2020-2024. Keberhasilan pencapaian Renstra (Rencana Strategis) Pangkalan PSDKP Lampulo tahun 2020-2024 memerlukan komitmen dan kerja keras semua pihak, baik Satwas maupun Wilker lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo.

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo




Basri, A.Pi, M.Si
Nip. 19750713 199803 1 003